



UNIVERSITAS INDONESIA

**IDENTIFIKASI FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT KEMISKINAN DI SULAWESI UTARA**

TESIS

**Patrick Charles Wauran
0806430374**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JULI 2010**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 16 Juli 2010




(Patrick Charles Wauran)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Patrick Charles Wauran

NPM : 0806 43 0374

Tanda tangan : 

Tanggal : 16 - Juli - 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Patrick Charles Wauran

NPM : 0806 43 0374


Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik

Judul Tesis : Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Utara

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada program studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

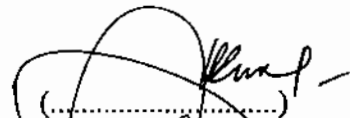
DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Vivi Yulaswati




(.....)

Penguji : Iman Rozani, SE., M.Soc.Sc.



(.....)

Penguji : Darlis Rabai, SE., MA.



(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 16 Juli 2010

KATA PENGANTAR

Syaloom,

Segala Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan kuasa-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan study dan tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mengapai gelar Magister Ekonomi program studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyelesaian tesis, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Vivi Yulaswati selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk membimbing saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Pimpinan, Dosen dan Staf Administrasi MPKP FE UI, yang telah membantu di dalam penyelesaian tesis dan penyelesaian studi saya.
3. Pihak Badan Pusat Statistik di tingkat Pusat maupun di propinsi Sulawesi Utara, yang telah membantu memberikan data-data yang saya perlukan.
4. Pihak Bank Indonesia di tingkat Pusat maupun di cabang Manado yang telah membantu memberikan data-data yang saya perlukan.
5. Seluruh pemerintah daerah di propinsi Sulawesi Utara yang telah membantu memberikan data-data yang saya perlukan.
6. Pimpinan Fakultas, baik Dekan maupun Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi beserta seluruh rekan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado yang memberikan dukungan baik materiil dan moral kepada saya untuk dapat mengikuti tugas belajar di FE Universitas Indonesia.
7. Istriku tercinta, Farah B.I Winerungan dan Anakku tersayang, Benedicta Virginia Wauran, yang telah tabah dan sabar untuk saya tinggalkan sementara waktu di Manado.
8. Orang tua yang terkasih yang ada di Manado, yang telah memberikan dukungan baik materiil dan moral.
9. Kakakku, Kak Pierre dan Kak Jully yang telah memberikan tumpangan hidup dan dukungan materiil maupun moral selama aku study di Jakarta beserta keponakan-keponakanku Angelica, Bryan dan Jeniffer, yang telah membantu menghibur diriku, Kak Peggy dan Broer David yang ada di Amerika Serikat, yang telah membantu memberikan dukungan baik materiil maupun moral.

10. Teman-teman kelasku angkatan XIX kelas B sore, yang telah bersama-sama dalam suka dan duka belajar bersama di kelas hingga penyelesaian studi.
11. Sahabatku Bobby Hamenda, Melky Buatasik, Roy Lambey, Arthur Sumilat, Michael Rantung, Marthen Paulus, Richard Rorong, Alex Kambey, Alexi Puasa, Steven Panjank, teman-teman Alumni PPA BKK FE Unsrat se-Jabotabek dan teman-teman di IKAMAFE 9598 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada kesempatan ini, yang telah banyak membantu baik dengan doa dan moral.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang membangun saya terima dengan hati yang terbuka. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu di kemudian hari.

Akhir kata, saya memohon maaf apabila di dalam penulisan tesis ini ada kalimat ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati. Tuhan memberkati kita semua.

Pakatuan wo Pakalawiren.

Jakarta, Juni 2010

Penulis

**PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPETINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Patrick Charles Wauran
NPM : 0806 43 0374
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Propinsi Sulawesi Utara”

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan. Mengelola dalam bentuk pangkalan data (Data Base), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Juni 2010

Yang Menyatakan,



(Patrick Charles Wauran)

ABSTRAK

Nama : Patrick Charles Wauran
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Utara

Masalah kemiskinan merupakan bagian yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Tidak berbeda dengan permasalahan yang dihadapi oleh berbagai negara lain, khususnya negara-negara berkembang, Indonesia juga menghadapi masalah kemiskinan yang perlu ditanggulangi secara berkelanjutan. Masalah kemiskinan juga dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan masalah multidimensi. Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Strategi penanggulangan kemiskinan di daerah Sulawesi Utara masih belum efektif, meskipun jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang melesat tinggi, tetapi dari segi kualitas yaitu kedalaman dan keparahan kemiskinan cenderung tidak berubah. Untuk memperbaiki itu perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara.

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan digunakanlah variabel-variabel kesejahteraan rakyat yaitu pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, fertilitas, perumahan, taraf pola konsumsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penetapan variabel kesejahteraan rakyat ini dilakukan dengan mengambil definisi yang berasal dari badan pusat statistik dan variabel anggaran pendapatan belanja daerah dilihat dari pengeluaran pembangunan pemerintah daerah. Indikator tingkat kemiskinan yang akan diukur di dalam penelitian ini adalah persentase penduduk miskin (P0) yakni jumlah penduduk yang berada dibawah suatu batas yang disebut batas garis kemiskinan yang merupakan nilai rupiah dai kebutuhan minimum makanan dan non-makanan. Kemudian indeks kedalaman kemiskinan (P1) yakni ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin serta indeks keparahan kemiskinan (P2) yakni ukuran rata-rata ketimpangan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin yang terjadi menurut versi Badan Pusat Statistik.

Hipotesis penelitian ini adalah bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berhubungan signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Propinsi Sulawesi Utara. Kemudian, variabel kesejahteraan rakyat yang didalamnya terdapat variabel pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, fertilitas, taraf dan pola konsumsi serta perumahan dan lingkungan juga berhubungan signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Propinsi Sulawesi Utara.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis kuantitatif regresi data panel. Teknik regresi ini digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel kesejahteraan rakyat terhadap tingkat kemiskinan selama selang waktu 4

tahun dengan 9 daerah kabupaten/kota di Sulawesi Utara dan untuk menganalisa lebih mendalam digunakan metode wawancara mendalam dan observasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara. Faktor-faktor yang mempengaruhi indikator kemiskinan penduduk miskin adalah variabel penduduk berusia 10 tahun keatas tamat SMA/Umum (SMA), wanita berumur 15 – 49 tahun berstatus kawin yang masih ikut keluarga berencana (MSHKB), rumah tangga menggunakan air bersih (AIR) dan variabel rata-rata pengeluaran/kapita/bulan penduduk menurut konsumsi bukan makanan (BKNMKN). Sedangkan Faktor-Faktor yang mempengaruhi indikator kemiskinan lainnya yaitu kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan adalah variabel penduduk berusia 10 tahun keatas tamat SMA/Umum (SMA), rumah tangga menggunakan air bersih (AIR) dan variabel rata-rata pengeluaran/kapita/bulan penduduk menurut konsumsi bukan makanan (BKNMKN).

Rekomendasi yang diberikan untuk menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan di Propinsi Sulawesi Utara adalah di bidang pendidikan, para siswa dari keluarga kurang mampu untuk bersekolah sampai di tingkat pendidikan menengah kejuruan agar mempunyai keahlian/ketrampilan, dan dibantu dengan program sekolah gratis dengan pembebasan SPP, pemberian biaya buku, biaya seragam dan biaya transport serta pemberian beasiswa ke perguruan tinggi khusus siswa miskin yang berprestasi di tiap sekolah negeri. Di bidang fertilitas dan kesehatan, perlu adanya peningkatan bagian penyuluhan/pemberdayaan di bidang keluarga berencana (eks BKKBN) di tiap kabupaten/kota agar program KB terus berjalan dan dimasukkannya program KB ini ke dalam muatan lokal di sekolah-sekolah menengah, selain itu perlu adanya perbaikan/peningkatan sistem pelayanan asuransi kesehatan dan pendataan yang akurat bagi penduduk miskin. Di bidang Taraf dan Pola Konsumsi, dengan kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan bahan kebutuhan dengan program subsidi beras bagi penduduk miskin terus dipertahankan, perlu adanya stabilisasi harga kebutuhan pokok di pasar, perlu adanya penyuluhan secara berkala kepada masyarakat untuk mengurangi budaya konsumtif yang berlebihan dalam merayakan acara keagamaan ataupun acara budaya lainnya maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Di bidang Perumahan/Infrastuktur, perlu dibuat skema pemberian kredit murah untuk pembelian rumah sederhana dan memberikan subsidi untuk membangun kompleks-kompleks perumahan seperti rumah susun sederhana dengan konsep sewa beli yang terjangkau dan pembangunan penyediaan air bersih khusus untuk daerah-daerah yang kurang terjangkau oleh air bersih.

Kata Kunci : Penduduk Miskin , Indeks Kedalaman Kemiskinan , Indeks
Keparahan Kemiskinan, Variabel Kesejahteraan Rakyat, Sulawesi
Utara.

ABSTRACT

Name : Patrick Charles Wauran
Course : Master of Planning and Public Policy
Title : Identification of Factors Affecting Rate Poverty in North Sulawesi

Poverty's problem is the aspect that always appears in the life of the community in general. Poverty's problem is also faced by North Sulawesi Province which is a multidimensional problem. Central Bureau of Statistics stated that the problem of poverty is not only about the number and the percentage of poor inhabitants, but another dimension to note is the level of the depth and the severity of poverty. Beside to reduce the number of poor inhabitants, the policies of handling poverties must also be able to reduce the level of the depth and the severity of the poverty. The strategies of coping poverty in North Sulawesi have not been effective yet, although the number and the percentage of the poor has decreased in line with economic growth rate which is high, but in terms of quality, the depth and the severity of poverty is unlikely to change. In order to fix it, it is necessary to know what other factors that influence the level of poverty in North Sulawesi.

To see the factors that affect poverty rates, several variables of welfare are used such as education, labor, health, fertility, housing, consumption's pattern and level of the Budget Revenues and Region's Expenditure. The determination of the welfare's variables is done by taking the definition from the Central Bureau of Statistics and the variables of the Budget Revenues and Region's Expenditure which are seen from the development's expenditure of the local government. Poverty's indicators to be measured in this study according to the version of the Central Bureau of Statistics is the percentage of poor population (P0), that is the number of residents who are below a border, the border called the poverty line which is the value of the rupiah from the minimum requirement of food and non-food. Then, the poverty depth index (P1), which is the average size of the expenditure's gap of each poor residents against the border of poverty line and the severity of poverty's index (P2), which is the average size of the inequality of the distribution's expenditure among the poor inhabitants.

The hypothesis of this research is that the Budget Revenues and Region's Expenditure is significantly and negatively related to the poverty's rate in North Sulawesi Province. Then, the variables of welfare which contains the variables of education, fertility, the extent and patterns of consumption and housing which are related significantly and negatively, and the variables of employment (unemployment) and health (pains) in which their relationships are significant and positive to the level of poverty in North Sulawesi Province.

This research will use the analysis of a quantitative regression of the panel data approach. This regression's technique is used to observe the effect of the welfare's variables and the Budget Revenues and Region's Expenditure against the poverty's level during the four-year interval in the nine districts / city in North Sulawesi. To analyze more deeply about it, interviews and observation methods are used.

The results of this study indicate that the Budget Revenues and Region's Expenditure does not significantly influence the level of poverty in North

Sulawesi. Factors that affect the indicators of the poor inhabitants are the inhabitants aged 10 years and older and who have completed senior high school / general (SMA), women aged 15-49 years who is married and still conduct family planning (MSHKB), households using clean water (AIR) and average variable expenditure / capita / month population by non-food consumption (BKNMKN), whereas factors that affect other indicators of poverty such as the poverty depth and severity of poverty is the variables of population aged 10 years and older who have completed high school / general (high school), household using clean water (AIR) and average variable expenditure / capita / month inhabitants based on non-food consumption (BKNMKN).

Given recommendations to structure policies in reducing poverty in North Sulawesi Province are in education, students from poor families to attend school up to secondary level of the occupational education in order to have the expertise / skills, and assisted with free school program with free tuition fees, book's fees provision, the cost of uniforms and transport costs as well as providing college scholarships especially to poor students who excel in every public school. In the field of fertility and health, there is a need for improvements in workshop / empowerment in the field of family planning (ex BKKBN) in each district / city in order to continuing family planning program. In addition, family planning programs should be included in the local content in secondary schools, and besides that, repair / improvement of health care systems and accurate data's collection for the poor are needed. In the area of the Level and Pattern of Consumption, with food's sustainability policies and the availability of basic necessities and even stabilizing the rice subsidy program for poor people which continue to be maintained, episodic workshop for community is needed to reduce excessive consumerist culture in celebrating religious or other cultural events as well as in everyday life. In the field of housing / infrastructure, credit schemes need to be made cheaply and provide subsidies to build areas for housing such as plain apartment with leasing concept which is affordable for the poor and the construction of basic infrastructure such as electricity and clean water supply for the poor.

Keywords:Poor People, Poverty Depth Index, Index Poverty severity, variable Welfare, Budget of the Region, North Sulawesi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR	xvii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kerangka Teoritis	13
2.2 Tinjauan Pustaka	17
2.2.1 Pengertian Kemiskinan	17
2.2.2.1 Kemiskinan Absolut.....	19
2.2.2.2 Kemiskinan Relatif.....	20
2.2.2 Penyebab Kemiskinan	21
2.2.3 Pengukuran Kemiskinan.....	23
2.2.4 Indikator Kemiskinan	25
2.2.5 Ketimpangan Pendapatan	26
2.2.6 Pertumbuhan Ekonomi, Ketidakmerataan Pendapatan dan Kemiskinan.....	31
2.2.7 Disparitas Pembangunan dan Disparitas Pendapatan Antar Wilayah	33
2.2.8 Determinan Kemiskinan.....	35
2.2.9 Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Kemiskinan...	43
2.2.10 Kerangka Berpikir Pemecahan Masalah	54
2.3 Penelitian-Penelitian Sebelumnya	55
2.4 Perumusan Hipotesis	57
3. METODE PENELITIAN.....	58
3.1 Pendekatan Penelitian	58
3.2 Jenis dan Sumber Data	58
3.3 Spesifikasi Model.....	58
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	59
3.5 Metode Analisis.....	61
3.5.1 Analisis Regresi Data Panel	61
3.6 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	61
3.6.1 Pemilihan Spesifikasi Model Terbaik	62

4. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	66
4.1 Gambaran Umum Propinsi Sulawesi Utara.....	66
4.1.1 Lokasi dan Luas Propinsi Sulawesi Utara	66
4.1.2 Perekonomian Propinsi Sulawesi Utara.....	68
4.1.3 Kependudukan Propinsi Sulawesi Utara	69
4.1.4 Gambaran Kemiskinan di Propinsi Sulawesi Utara.....	70
4.2 Tingkat Kesejahteraan Rakyat Propinsi Sulawesi Utara	75
4.2.1 Pendidikan	75
4.2.2 Tenaga Kerja.....	79
4.2.3 Kesehatan.....	82
4.2.4 Fertilitas	84
4.2.5 Rumah.....	86
4.2.6 Pengeluaran Konsumsi	89
4.2.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Propinsi Sulawesi Utara	91
5. HASIL PEMBAHASAN ANALISIS EKONOMETRIK	97
5.1 Hasil Estimasi Model	97
5.1.1 Hipotesis Tanda	97
5.1.2 Hasil Pemilihan Variabel	100
5.1.3 Hasil Estimasi Regresi Penduduk Miskin.....	101
5.1.4 Hasil Estimasi Regresi Kedalaman Kemiskinan.....	109
5.1.5 Hasil Estimasi Regresi Keparahan Kemiskinan	115
5.2 Analisa Hasil Regresi dan Implikasi Kebijakan.....	122
6. KESIMPULAN DAN SARAN	134
6.1 Kesimpulan	134
6.2 Saran dan Implikasi Kebijakan.....	137
Daftar Referensi	141
Lampiran	146

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Pengeluaran APBD di Propinsi Sulawesi Utara	6
Tabel 3.1	Variabel Endogen, Simbol, Satuan, Jenis data model kemiskinan di Propinsi Sulawesi Utara	61
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kabupaten / Kota dan Persentase Luas Wilayah Terhadap Luas Propinsi Sulawesi Utara.....	66
Tabel 4.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sulawesi Utara menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan 2000 (%).....	68
Tabel 4.3	Persentase Jumlah Penduduk per Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara	69
Tabel 4.4	Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara.....	70
Tabel 4.5	Indeks Kedalaman Kemiskinan per Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara.....	72
Tabel 4.6	Indeks Keparahan Kemiskinan per Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Utara.....	73
Tabel 4.7	Rasio Gini Propinsi Sulawesi Utara dan Indonesia	74
Tabel 4.8	Persentase Penduduk yang Buta Huruf per Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara	77
Tabel 4.9	Persentase Penduduk Bekerja pada Sektor Pertanian per Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara.....	79
Tabel 4.10	Persentase Penduduk Bekerja pada Sektor Formal per Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara.....	80
Tabel 4.11	Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama per Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara	82
Tabel 4.12	Angka Harapan Hidup per Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara	84
Tabel 4.13	Persentase Wanita Berusia 15 – 49 Tahun Bestatus Kawin yang Masih KB per Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara.....	86
Tabel 4.14	Persentase Rumah Milik Sendiri per Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara.....	87

Tabel 4.15	Persentase Rumah Tangga dengan Luas Lantai Rumah < 20 m ² per Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara	88
Tabel 4.16	Persentase Rata-Rata Pengeluaran/Kapita/Bulan Penduduk menurut Konsumsi Bukan Makanan per Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara.....	90
Tabel 4.17	Jumlah Penerimaan APBD per Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2008	91
Tabel 4.18	Pendapatan Asli Daerah per Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2008	92
Tabel 4.19	Dana Perimbangan per Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2008.....	94
Tabel 4.20	Persentase Dana Perimbangan Terhadap APBD per Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2008	95
Tabel 5.1	Hasil Uji Chi-Kuadrat Model Penduduk Miskin Propinsi Sulawesi Utara	102
Tabel 5.2	Hasil Uji Hausman Penduduk Miskin Sulawesi Utara.....	102
Tabel 5.3	Hasil Estimasi Model Persentase Penduduk Miskin (P0) Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2008.....	103
Tabel 5.4	Matriks Koefisien Korelasi Antar Variabel Bebas Model Penduduk Miskin Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2008	106
Tabel 5.5	Hasil Uji Chi-Kuadrat Model Kedalaman Kemiskinan Propinsi Sulawesi Utara	109
Tabel 5.6	Hasil Uji Hausman Model Kedalaman Kemiskinan Propinsi Sulawesi Utara	110
Tabel 5.7	Hasil Estimasi Indeks Kedalaman Kemiskinan Propinsi Sulawesi Utara	111
Tabel 5.8	Matriks Koefisien Korelasi Antar Variabel Bebas Model Kedalaman Kemiskinan Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2008	113
Tabel 5.9	Hasil Uji Chi-Kuadrat Keparahan Kemiskinan Propinsi Sulawesi Utara	116
Tabel 5.10	Hasil Uji Hausman Keparahan Kemiskinan Propinsi Sulawesi Utara	117

Tabel 5.11	Hasil Estimasi Indeks Keparahan Kemiskinan Propinsi Sulawesi Utara	117
Tabel 5.12	Matriks Koefisien Korelasi Antar Variabel Bebas Model Keparahan Kemiskinan Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2008.....	120

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Persentase Penduduk Miskin Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2002 – 2009	3
Grafik 1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2002 – 2009	4
Grafik 1.3	Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Tahun 2002 – 2009.....	7
Grafik 4.1	Persentase Penduduk yang belum pernah sekolah per Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara.....	76
Grafik 4.2	Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun keatas Tamat SMA/Umum per Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara	78
Grafik 4.3	Persentase Angkatan Kerja yang Belum Bekerja per Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara.....	81
Grafik 4.4	Persentase Penduduk dan Keluhan Kesehatan per Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara	83
Grafik 4.5	Rata-Rata Anak Lahir Hidup per Wanita per Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara	85
Grafik 4.6	Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih per Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kurva Lorenz.....	27
Gambar 2.2	Lingkaran Kemiskinan Sisi Penerimaan dan Sisi Penawaran Nurkse	35
Gambar 4.1	Peta Propinsi Sulawesi Utara.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

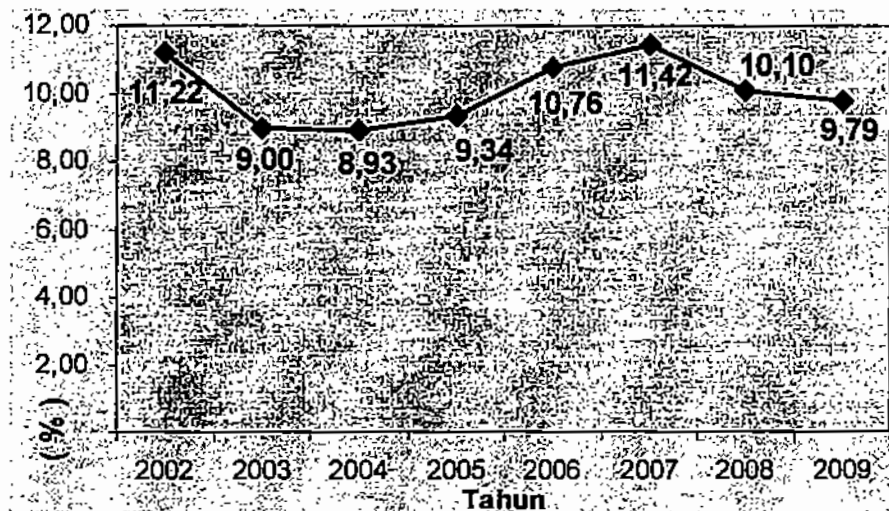
Dalam beberapa dekade terakhir ini pengertian dan pemahaman tentang kemiskinan telah banyak bergeser dari pengertian dan pemahaman sebelumnya. Apabila pada masa-masa sebelumnya kemiskinan diartikan dengan pandangan yang sempit yang hanya menyangkut aspek ekonomi saja, dewasa ini pengertian dan pemahaman kemiskinan berkembang mencakup aspek-aspek kehidupan yang jauh lebih luas. Secara umum, pengertian kemiskinan telah berkembang mencakup aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik. Dimensi kemiskinan yang mudah diamati adalah bahwa suatu keluarga disebut miskin apabila keluarga tersebut tidak mampu untuk memenuhi standard minimum kebutuhan pokok keluarga agar dapat hidup secara layak. Dimensi kemiskinan yang lebih luas lagi antara lain ada pendapat yang menyatakan bahwa kemiskinan timbul karena adanya ketidakadilan dalam pemilihan faktor-faktor produksi; ada yang menyatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap dan budaya hidup dalam suatu kelompok masyarakat; dan ada pula yang menyatakan bahwa kemiskinan terkait dengan ketidakberdayaan suatu kelompok masyarakat terhadap sistem dan kebijakan pemerintah yang diberlakukan sehingga mengakibatkan mereka dalam posisi yang lemah dan rentan serta tereksplotasi dan terpinggirkan (Alfian, 1980).

Masalah kemiskinan ini juga merupakan bagian yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Tidak berbeda dengan permasalahan yang dihadapi oleh berbagai negara lain, khususnya negara-negara berkembang, Indonesia juga menghadapi masalah kemiskinan yang perlu ditanggulangi secara berkelanjutan. Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar seharusnya dapat memanfaatkannya sebagai modal penting dalam upaya memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Namun kenyataannya, sampai saat ini masih sangat banyak penduduk Indonesia yang kehidupannya berada di bawah garis kemiskinan, yang ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keteriolasian, dan ketidakmampuan menyampaikan aspirasinya. Sampai dengan tahun 2009 per bulan Maret, Indonesia telah berhasil

menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan secara signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik, sejak tahun 2002 sampai tahun 2009 (bulan Maret), jumlah penduduk miskin dari 38,4 juta jiwa (18,2%) yang tersebar di perkotaan sebanyak 13,30 juta jiwa (14,5%) dan di perdesaan sebanyak 25,1 juta jiwa (21,2%) mengalami penurunan menjadi 32,50 juta jiwa (14,15%) yang tersebar di perkotaan sebanyak 11,91 juta jiwa (10,72%) dan di perdesaan sebanyak 20,61 juta jiwa (17,35%). Meskipun demikian, bersamaan dengan keberhasilan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin tersebut, telah terjadi pula ketidakmerataan pendapatan yang mencakup ketidakmerataan antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah.

Masalah kemiskinan yang dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Utara merupakan masalah multidimensi. Hal ini menjadikan pengentasan kemiskinan senantiasa sebagai salah satu program pokok Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di daerah Sulawesi Utara. Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara mencatat berdasarkan data di tahun 2002 jumlah penduduk Sulawesi Utara tercatat sebanyak 2.044.070 orang, pada tahun 2005 berjumlah 2.189.273 orang dan pada tahun 2007 berjumlah 2.186.810 orang. Untuk tahun 2008, jumlah Penduduk berjumlah 2.208.012 jiwa. dengan luas wilayah 15.273,10 km², berarti kepadatan penduduknya mencapai 144,57 jiwa/km². Secara umum, jumlah penduduk laki-laki relatif lebih besar dari jumlah penduduk perempuan. Proporsi jumlah penduduk laki-laki sebesar 50,97 persen dan penduduk perempuan sebesar 49,03 persen dari jumlah penduduk.

Kemudian pada Grafik 1.1 , untuk jumlah dan persentase penduduk miskin Propinsi Sulawesi Utara dari periode 2002 sampai dengan tahun 2009 cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Untuk periode 2002 – 2004 dan 2007 – 2009 terjadi penurunan, sedangkan pada periode 2004 – 2007 terjadi kenaikan. Jumlah Penduduk miskin pada tahun 2002 sebesar 229,30 ribu (11,22%) terjadi peningkatan di tahun 2007 sebesar 250,10 ribu (11,42%) dan kembali terjadi penurunan setelah itu sampai di tahun 2009 sebesar 219,60 (9,78%). Peningkatan jumlah penduduk miskin dan persentasenya di tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 di Sulawesi Utara merupakan dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM di tahun 2005 sebesar 114% oleh Pemerintah Pusat.



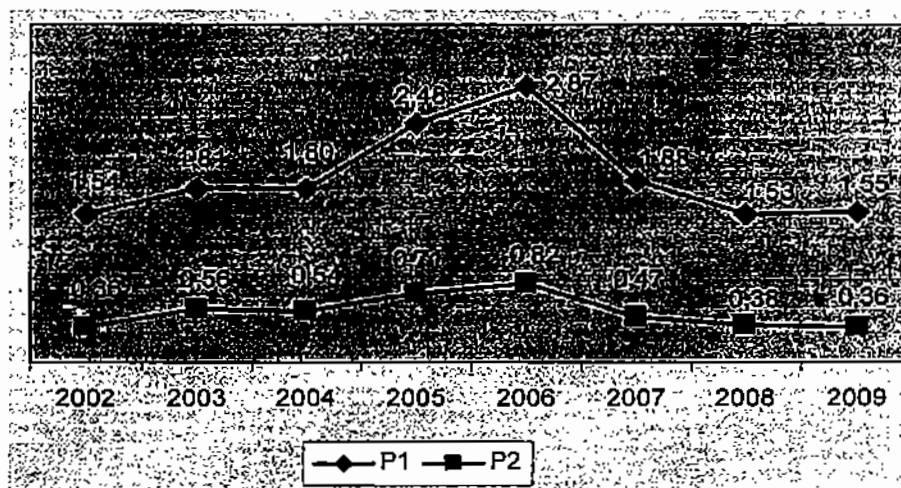
Sumber : BPS, Data dan Informasi Kemiskinan (2003 – 2009)

Grafik 1.1 Persentase Penduduk Miskin Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2002 – 2009 (%)

Selain itu, berdasarkan pada Grafik 1.2 terlihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) pada periode 2002 – 2009 mengalami kecenderungan fluktuasi. Pada periode 2002 - 2006, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) mengalami peningkatan dari posisi 1,54 naik perlahan-lahan menjadi 2,87 di tahun 2006 yang merupakan angka tertinggi dalam satu dasawarsa.

Namun di periode 2006- 2009 angka indeks P_1 ini mengalami penurunan dari angka tertingginya di 2,87 turun menjadi 1,53 di tahun 2009. Keadaan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil, yang artinya semakin rendah nilai indeks, maka semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Begitu pula dengan indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) pada periode 2002 – 2009 pada Grafik 1.2 mengalami kecenderungan fluktuatif dan hampir sama mengikuti pola dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1).



Sumber : BPS, Data dan Informasi Kemiskinan (2003 – 2009)

Grafik 1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) & Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2002 – 2009

Pada periode 2002 – 2006, Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengalami peningkatan dari 0,36 di tahun 2002 perlahan naik menjadi 0,82 di tahun 2006 yang merupakan angka tertingginya. Pada periode 2006-2009, angka indeks ini (P_2) mengalami penurunan secara perlahan juga turun dari 0,82 menjadi 0,36 di tahun 2009. Kecenderungan menurun dari waktu ke waktu ini merupakan indikasi bahwa dalam periode tersebut ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin secara umum semakin berkurang. Ini juga menunjukkan telah terjadi perbaikan dalam pengentasan kemiskinan dan tingkat kemiskinan bisa saja tidak turun tapi tingkat keparahannya berkurang.

Bila dibandingkan dengan P_1 dan P_2 Nasional yaitu pada tahun 2002 masing-masing sebesar 3,01 dan 0,79 lalu meningkat 3,13 dan 0,85 di tahun 2003 kemudian pada tahun 2006 naik menjadi 3,43 dan 1,00 tetapi di tahun berikutnya turun menjadi 2,99 dan 0,84 selanjutnya tahun 2008 terus turun menjadi 2,77 dan 0,76 dan terus turun di tahun 2009 sebesar 2,50 dan 0,68 maka penurunan yang konstan ini di tingkat Nasional masih lebih baik dibandingkan di Sulawesi Utara. Hal ini kemungkinan adanya program penanggulangan kemiskinan di tingkat Nasional dengan program PNPB Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat yang dimulai pada tahun 2007, secara konsisten dan konstan dapat menurunkan tingkat kemiskinan dibandingkan “*crash program*” penanggulangan kemiskinan dari

Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara yang berupa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan revitalisasi pertanian komoditas jagung dan rumput laut dengan skim Program Pelayanan Pembiayaan SP3.

Namun bila dicermati pada grafik 1.2, terlihat pada periode 2008 – 2009, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) tahun 2008 dari 1,53 naik menjadi 1,55 di tahun 2009 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) tahun 2008 dari 0,38 turun sedikit menjadi 0,36 di tahun 2009. Perubahan kedua Indeks ini cenderung tidak berubah karena kecilnya perubahan. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung sama dengan kondisi periode lalu mendekati garis kemiskinan begitu pula dengan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskinnya. Kenaikan P_1 bisa juga disebabkan oleh kenaikan tingkat Inflasi bila diatas rata-rata nasional. Berdasarkan data Bank Indonesia (2009) pergerakan angka inflasi Manado dan Nasional pada tahun 2008 masing-masing 9,71 dan 11,06 menurun pada tahun 2009 menjadi 2,31 dan 2,45 maka dapat dikatakan bahwa inflasi Manado masih dibawah inflasi Nasional sehingga kenaikan P_1 tidak semata-mata berasal dari tingkat Inflasi saja tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya dan hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dapat diteliti lebih lanjut.

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan (BPS, 2008).

Selain itu, dengan berlakunya otonomi daerah maka tanggung jawab untuk memerangi kemiskinan bergeser ke Pemerintah Daerah, meskipun Pemerintah Pusat juga tidak melepaskan bertanggung jawabnya tersebut. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan dapat terlihat dalam pengeluaran pembangunan di dalam APBD pada tabel 1.1. Pada struktur pengeluaran daerah masih didominasi oleh pengeluaran rutin, yaitu 80,9% pada tahun 2005, 76,89 % pada tahun 2006 turun menjadi 50,11% pada tahun 2007 dan bertahan pada angka 52,25 % pada tahun 2008. Sementara itu, untuk

Universitas Indonesia

pengeluaran pembangunan mengalami perubahan positif, dari 19,1% pada tahun 2005, naik sedikit menjadi 23,10% pada tahun 2006, kemudian naik tinggi menjadi 49,88 % pada tahun 2007 dan sedikit turun menjadi 43,69 % pada tahun 2008.

Tabel 1.1 Realisasi Pengeluaran APBD Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2008

JENIS PENGELUARAN	2005	2006	2007	2008
PENGELUARAN BUDGET	344.611.840.000 80,9 %	495.894.100.000 76,89 %	390.309.884.617 50,11 %	481.829.000.000 52,25 %
PENGELUARAN PERLE	81.359.950.000 19,1 %	148.973.350.000 23,10%	388.528.532.750 49,88 %	402.883.000.000 43,69 %

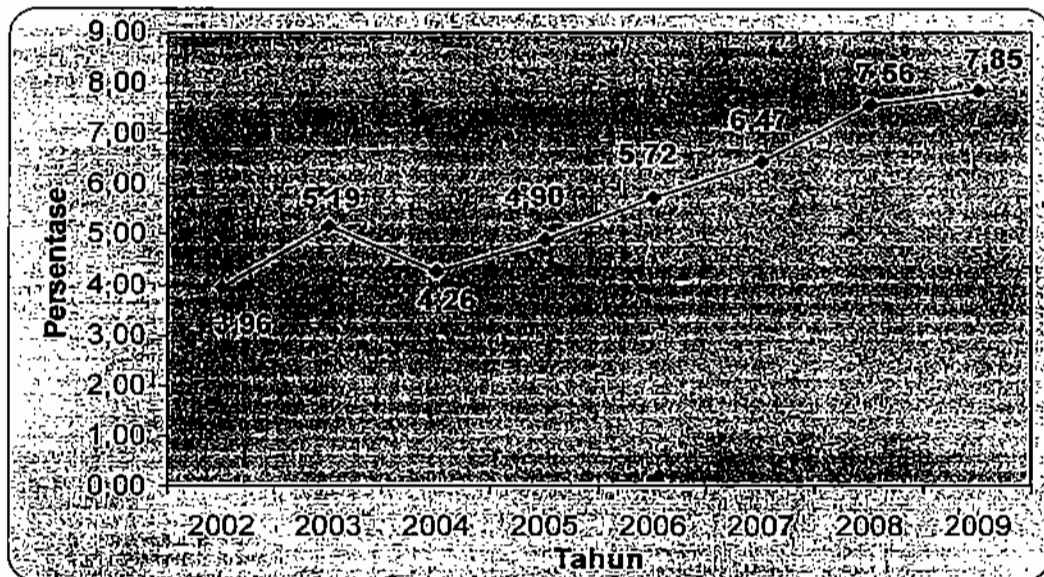
Sumber : Kajian Daerah Sulut, 2010. Diolah.

Apabila data-data tersebut ditarik keterkaitannya, maka ada kemungkinan bertambahnya transfer dana ke pengeluaran pemerintah dalam APBD akan membawa pengaruh pada penurunan angka kemiskinan di Propinsi Sulawesi Utara dan juga khususnya di masing-masing daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya untuk melihat gambaran keadaan perkembangan perekonomian suatu daerah dapat tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi. Seperti yang terlihat pada Grafik 1.3 , laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Utara periode 2002 – 2009 kecenderungan tumbuh positif kecuali pada tahun 2004 yang mengalami penurunan.

Pada tahun 2002 laju pertumbuhan ekonomi pada angka 3,96% dan naik pada tahun berikutnya di angka 5,19%, namun di tahun 2004 mengalami penurunan di posisi 4,26%. Pada tahun selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi melesat naik dari 4,90% di tahun 2005 dan terus naik sampai tahun 2009 di angka 7,85%. Kenaikan Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara ini diatas rata-rata Nasional.

Bila dilihat laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dari tahun 2004 sampai tahun 2009 melesat diatas rata-rata nasional khususnya di tahun 2008 dan 2009 diatas 7 persen, tetapi hal ini tidak memberikan dampak yang besar secara sektoral pada pertumbuhan sektor pertanian dan juga kontribusi sektor pertanian pun mengalami penurunan dari tahun ke tahun.



Sumber : BPS Sulut, Sulut dalam Angka (2003 – 2009)

Grafik 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara
Tahun 2002 – 2009

Tentu hal ini akan memberikan masalah yang tersembunyi pada pengentasan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara karena sebagian besarnya berada di daerah pedesaan. Dikatakan menjadi masalah tersembunyi karena penurunan tingkat kemiskinan di tahun 2007 terkena imbas dari pembangunan besar-besaran infrastruktur untuk persiapan *World Ocean Conference* dan *Sail Bunaken* tahun 2009 di Manado (BI Manado, 2009).

Hal ini juga didukung oleh laju pertumbuhan sektor Bangunan dan Perdagangan Hotel Restoran di dalam PDRB Sulawesi Utara dari tahun 2005 – 2008 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu masing-masing pada tahun 2005 sebesar 15,70% dan 14,57% meningkat di tahun 2008 menjadi 16,39% dan 15,42%. Kedua sektor ini mengalami pertumbuhan yang konsisten dibandingkan dengan sektor lainnya yang mengalami laju yang fluktuatif bahkan

ada yang mengalami kemunduran (BPS Sulut, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan laju pertumbuhan kedua sektor ini disebabkan adanya pembangunan infrastruktur yang dominan di Sulawesi Utara.

Dengan memperhatikan data-data diatas memperlihatkan masih adanya persoalan di dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat terlihat dari segi kuantitas yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan, sedangkan dari segi kualitas yaitu kedalaman dan keparahan kemiskinan cenderung tidak berubah terutama di tahun 2008 – 2009, padahal di tahun tersebut laju pertumbuhan ekonomi melesat tinggi.

Untuk menggali lebih lanjut mengenai hal-hal yang terkait dengan perkembangan tingkat kemiskinan, perlu dilihat pandangan-pandangan mengenai kemiskinan yang ada.

Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah antara lain dengan adanya Perpres Nomer 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang menggantikan Perpres No. 13 / 2010 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dimana Pemerintah Pusat telah membentuk Tim Nasional Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Komisi ini bertugas melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan yaitu pemerintah pusat dan daerah, wakil-wakil dari badan legislatif, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Barata dan Bambang (2004) bahwa pencapaian kemakmuran secara umum harus dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah. Mereka juga mengatakan bahwa sesuai dengan konstitusi setiap negara termasuk Indonesia, bahwa melaksanakan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran dalam masyarakat adalah kewajiban negara yang paling utama.

Kewajiban negara inilah yang mengatur agar pemerintah sebagai eksekutif dapat berperan aktif dalam mengatasi masalah kemiskinan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, fertilitas serta perumahan dan lingkungan. Peran Pemerintah salah satunya adalah dengan ketersediaan dana pemerintah sebagai

modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah sejak tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004, akan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk makin mendorong upaya penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh dan berkesinambungan yang dapat mendekati keinginan kelompok-kelompok masyarakat yang didera oleh kemiskinan. Melalui Otonomi Daerah maka pemerintah pusat akan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus kepentingan dan tanggung jawabnya, seperti urusan umum dan pemerintahan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan hingga masalah sosial budaya. Harapannya, melalui peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas tersebut akan dapat mengurangi kemiskinan, dimana hal ini akan tercermin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas memperlihatkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan di daerah Sulawesi Utara masih belum efektif, meskipun jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang melesat tinggi, tetapi dari segi kualitas yaitu kedalaman dan keparahan kemiskinan cenderung tidak berubah terutama di tahun 2008 – 2009.

Untuk menyempurnakan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat bagi Sulawesi Utara, diperlukan pemahaman terhadap permasalahan yang mendasari kemiskinan di propinsi ini. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, permasalahan yang ada dan variabel kunci penyelesaian permasalahan kemiskinan di Sulawesi Utara. Pertanyaan utama yang akan digunakan sebagai landasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel-variabel kunci apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di Propinsi Sulawesi Utara ?
2. Seberapa besar signifikansi pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap tingkat kemiskinan ?

3. Bagaimana implikasinya terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan Propinsi Sulawesi Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dan anggaran pendapatan belanja daerah serta persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Propinsi Sulawesi Utara, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi dimensi kemiskinan (indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, fertilitas, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan serta APBD) di kabupaten dan kota di seluruh Propinsi Sulawesi Utara.
2. Mengidentifikasi variabel-variabel kunci dan berapa besar pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di Propinis Sulawesi Utara.
3. Memberikan rekomendasi alternatif kepada pemerintah propinsi Sulawesi Utara mengacu pada temuan yang didapat pada penelitian ini agar dapat menjadi alternatif kebijakan dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Analisa penelitian ini menitikberatkan pada masalah kemiskinan dan ketersediaan anggaran pendapatan belanja daerah serta variabel-variabel kesejahteraan rakyat yang ada di setiap kabupaten / kota di Propinsi Sulawesi Utara. Data yang dipergunakan untuk penelitian ini merupakan data per kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2005 - 2008. Tahun pengamatan ini diambil untuk data tahun 2005 saat otonomi daerah sesuai UU No. 32 Tahun 2004 telah terlaksana sepenuhnya, sampai dengan tahun 2008.

Variabel kesejahteraan yang diuji merupakan variable-variabel yang terdapat pada Statistik Kesejahteraan Rakyat kabupaten/kota publikasi Badan Pusat Statistik propinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, fertilitas serta perumahan dan lingkungan.

Indikator kemiskinan yang akan diukur di dalam penelitian ini adalah persentase penduduk miskin (P0) yakni jumlah penduduk yang berada dibawah suatu batas yang disebut batas garis kemiskinan yang merupakan nilai rupiah dai kebutuhan minimum makanan dan non-makanan. Kemudian indeks kedalaman kemiskinan (P1) yakni ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin serta indeks keparahan kemiskinan (P2) yakni ukuran rata-rata ketimpangan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin yang terjadi menurut versi Badan Pusat Statistik. (BPS Pusat, 2008).

Untuk variabel anggaran pendapatan belanja daerah, digunakan data pengeluaran publik pemerintah di dalam APBD sebagai proyeksi besarnya anggaran yang digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Untuk daerah pengamatan di dalam penelitian ini adalah daerah-daerah otonom tingkat II yaitu kabupaten / kota yang ada di wilayah Propinsi Sulawesi Utara yang sudah terbentuk pada tahun 2005. Untuk penghitungan daerah pemekaran setelah tahun 2005 tidak diikutsertakan secara tersendiri melainkan digabung dengan daerah induknya sehubungan adanya keterbatasan data di lapangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah dan Masyarakat, melalui hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan dalam hal pengentasan kemiskinan di propinsi Sulawesi Utara.
2. Bagi kemajuan ilmu pengetahuan, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ide pemikiran tentang pengentasan kemiskinan dan variabel kesejahteraan rakyat serta pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penulisan tesis ini, maka dikemukakan sistematika penulisan secara keseluruhan yang disajikan ke dalam lima bab.

- Bab I : Pendahuluan, yakni penjelasan secara garis besar mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka, yang memberikan gambaran tentang kemiskinan termasuk di dalamnya pengertian kemiskinan dan indikator kemiskinan yang terdiri dari persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan. Variabel-variabel kesejahteraan rakyat yang terdiri dari pendidikan, angkatan kerja, kesehatan, fertilitas serta perumahan dan lingkungan. Pengertian anggaran pendapatan belanja daerah. Bab ini diakhiri dengan penjelasan mengenai hipotesa penelitian.
- Bab III : Metode Penelitian, yang menguraikan tentang pendekatan penelitian dan metode analisis yang digunakan, jenis dan sumber data, model persamaan regresi yang didalamnya meliputi pengertian dan beberapa pelanggaran asumsi, definisi operasional variabel dan teknik pengumpulan serta pengolahan data.
- Bab IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian Propinsi Sulawesi Utara, menguraikan tentang gambaran umum Propinsi Sulawesi Utara serta identifikasi persentase penduduk miskin serta indeks kedalaman kemiskinan, identifikasi variabel-variabel kesejahteraan dan APBD per-kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Utara.
- Bab V : Hasil Pembahasan Analisis Ekonometrik, menganalisa variabel-variabel utama yang mempengaruhi kemiskinan di Propinsi Sulawesi Utara dan memberikan penjelasan akan hasil yang telah di dapat.
- Bab VI : Kesimpulan dan Saran, yang memuat kesimpulan hasil penelitian serta membuat implementasi kebijakan bagi kebijakan yang diharapkan akan dapat memberikan manfaat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

Kemiskinan merupakan efek dari sebuah proses yang melibatkan banyak aspek, sehingga kemiskinan mempunyai dimensi yang sangat beragam. Bila permasalahan kemiskinan tidak dapat diatasi atau diperbaiki maka akan dapat menimbulkan dampak sosial ekonomi yang tidak baik bagi perekonomian suatu wilayah.

Berdasarkan data-data kemiskinan Propinsi Sulawesi Utara tahun 2005 – 2009 memperlihatkan bahwa pemerintah propinsi Sulawesi Utara menghadapi persoalan di dalam penerapan kebijakan penanggulangan kemiskinan baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. Dari segi kuantitas yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan, sedangkan dari segi kualitas yaitu kedalaman dan keparahan kemiskinan tidak mengalami kemajuan yang berarti dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama 2005 - 2009.

Untuk bisa membantu mengatasi persoalan tersebut, perlu adanya kajian yang mendasar untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di propinsi Sulawesi Utara sehingga pada akhirnya nanti kebijakan yang akan diambil dapat membantu memperbaiki penanggulangan kemiskinan.

Dalam menganalisa kemiskinan, Nurkse (Jhingan, 1994) melihatnya dari sisi pembentukan modal, ia menjelaskan dalam teorinya bahwa adanya lingkaran kemiskinan yang menyebabkan Dunia Ketiga tidak mampu menggulirkan ekonomi diatas kemampuannya sendiri. Dari mata rantai buruknya tingkat pendapatan, dilanjutkan oleh ketidakmampuan menyetor tabungan dan rendahnya kapasitas pembentukan modal serta efisiensi yang rendah.

Di dalam teorinya ini, Nurske berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan pada masa lalu, tetapi juga menimbulkan hambatan pembangunan di masa datang sehingga dapat dikatakan suatu negara miskin karena ia merupakan negara miskin. Lingkaran Kemiskinan yang dimaksud meliputi dua hal yakni permintaan dan penawaran modal.

Dari aspek permintaan modal, kondisi rendahnya pembentukan modal disebabkan oleh sempitnya pasar sebagai konsekwensi dari rendahnya pendapatan masyarakat.

Dari aspek penawaran modal, karakteristik negara berkembang ditandai oleh rendahnya pembentukan modal yang disebabkan oleh rendahnya tabungan. Keadaan ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendapatan sebagai dampak dari produktivitas masyarakat yang rendah. Pembentukan modal yang rendah menyebabkan kekurangan modal yang pada gilirannya juga mempengaruhi produktivitas.

Bila keadaan ini dikaitkan dengan kondisi Negara/daerah maka secara keseluruhan dapat dikemas kedalam dalil yang disebut oleh Nurkse yakni "*a poor country is poor because it is poor*" yang artinya Negara menjadi miskin karena Negara tersebut miskin. Dalam hal ini Nurkse mengisyaratkan bahwa kemiskinan adalah sebagai sebab sekaligus akibat.

Dalam skala daerah, lingkaran kemiskinan berasal dari fakta bahwa produktifitas total di daerah miskin sangat rendah sebagai akibat kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna dan keterbelakangan ekonomi. Lingkaran kemiskinan tersebut kalau dilihat dari sudut permintaan dapat dijelaskan sebagai berikut : rendahnya tingkat pendapatan menyebabkan tingkat permintaan menjadi rendah, sehingga pada gilirannya tingkat investasi pun rendah. Tingkat investasi yang rendah kembali menyebabkan modal kurang dan produktifitas rendah. **Produktifitas** rendah tercermin di dalam pendapatan rendah. **Pendapatan** rendah berarti tingkat tabungan juga rendah. Tingkat tabungan rendah menyebabkan tingkat investasi rendah dan kekurangan modal. Kekurangan modal pada gilirannya bermuara pada **produktivitas** yang rendah. Produktivitas yang rendah tersebut berasal dari faktor-faktor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang tidak memadai.

Menurut Todaro (2006) dilihat dari tujuan inti pembangunan, yang salah satu kunci utamanya adalah **peningkatan standard hidup** yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan, yang tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang

bersangkutan. Pada saat yang sama, pendidikan dan kesehatan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Tidak hanya itu, Todaro juga menyatakan di dalam teorinya bahwa tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yakni : (1) tingkat pendapatan nasional rata-rata dan (2) lebar-sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Bila pendapat Todaro tersebut diterapkan pada wilayah yang lebih sempit yaitu daerah, maka tinggi-rendahnya tingkat kemiskinan di suatu daerah juga tergantung pada dua faktor utama tersebut yaitu tingkat pendapatan daerah rata-rata dan lebar-sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Jadi setinggi apapun tingkat pendapatan daerah per kapita yang dicapai suatu daerah, selama distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut pasti akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, semerata apapun distribusi pendapatan di suatu daerah, jika tingkat pendapatan daerah rata-ratanya tidak mengalami perbaikan, maka kemelaratan juga akan semakin meluas.

Todaro juga menjelaskan bahwa adanya variasi kemiskinan yang disebabkan oleh

- (1) Perbedaan geografis, penduduk dan pendapatan,
- (2) Perbedaan sejarah
- (3) Perbedaan kekayaan Sumber Daya Alam dan kualitas Sumber Daya Manusia
- (4) Perbedaan peranan sektor swasta dan negara
- (5) Perbedaan struktur perindustrian
- (6) Perbedaan pada ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik dari negara lain
- (7) Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan

Todaro (2006) , dalam buku Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, juga memasukkan indikator-indikator sosial dalam penerapan tolok ukur pembangunan. Menurutnya, tolok ukur pembangunan adalah pengurangan

kemiskinan yang didukung oleh indikator-indikator sosial seperti tingkat pendidikan, kondisi dan kualitas pelayanan kesehatan hingga kecukupan akan kebutuhan perumahan. Ia juga menjelaskan, di bidang kesehatan masih kurangnya penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai di negara-negara miskin di dunia ketiga, yang umumnya para dokter dan rumah sakit itu berada di daerah perkotaan dengan tarif yang mahal. Pada sektor pendidikan, bahwa fasilitas-fasilitas pendidikan dan faktor pendukungnya di kebanyakan negara-negara di dunia yang masih belum memadai, dan hal ini diperparah dengan tingkat kegagalan dalam menyelesaikan sekolah dan tingkat buta huruf yang tinggi. Kemudian di bidang ketenagakerjaan, bahwa terdapat masalah pada rendahnya tingkat produktifitas tenaga kerja, yang mana hal ini sejalan dengan sumber daya manusianya yang juga kurang memadai, serta tingkat pengangguran yang tinggi. Pada bidang fertilitas, mengacu pada pendapat argumen garis keras, Todaro, mengatakan bahwa pertambahan jumlah penduduk yang tidak dibatasi dianggap sebagai penyebab pokok terjadinya kemiskinan, standard hidup yang rendah, kekurangan gizi, kesehatan yang buruk dan serta masalah sosial lainnya.

Menurut Nanga (2006), fenomena kemiskinan merupakan suatu yang kompleks namun kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan, yang semuanya berada dalam lingkungan dimensi ekonominya.

Sejalan dengan pemikiran Todaro dan Nanga, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai komponen yang dapat menggambarkan apakah masyarakat tersebut sudah berada pada kehidupan yang sejahtera atau belum. Komponen yang dapat dilihat antara lain keadaan perumahan di mana mereka tinggal, tingkat pendidikan, dan kesehatan. Biro Pusat Statistik menyatakan bahwa komponen kesejahteraan yang dapat dipakai sebagai indikator kesejahteraan masyarakat adalah kependudukan, tingkat kesehatan dan gizi masyarakat, tingkat pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi masyarakat, keadaan perumahan dan lingkungan, dan keadaan sosial budaya.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Pengertian Kemiskinan

Definisi kemiskinan secara luas disepakati dalam Koneferensi Dunia Untuk Pembangunan Sosial (Zulfakar, 2005) yaitu bahwa Kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya, kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya.

Kemiskinan menurut Asian Development Bank (1999) memahami masalah kemiskinan sebagai perampasan terhadap aset-aset dan kesempatan-kesempatan penting dimana individu pada dasarnya berhak atasnya. Dalam pendekatan baru ini diakui adanya hambatan-hambatan struktural yang menyebabkan tidak terealisasinya hak-hak orang miskin. *Office of the High Commissioner for Human Rights*, United Nations menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena adanya pengingkaran hak-hak manusia, karena itu kemiskinan tidak mungkin diatasi tanpa realisasi hak-hak manusia. Secara umum definisi kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan atau ketidaklayakan hidup menurut standar-standar tertentu, ketidak atau kekurangmampuan fisik manusia, ketiadaan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan. (Zulfakar, 2005).

Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi Kondisi tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar atau asasi manusia seperti

sandang, pangan, papan, afeksi, keamanan, identitas kultural, proteksi, kreasi, kebebasan, partisipasi, dan waktu luang (Parwoto, 2001).

Lebih jauh lagi, kemiskinan dipandang tidak hanya menyangkut standar pendapatan atau konsumsi yang rendah melainkan juga rendahnya kebebasan berpolitik dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hal tersebut berkaitan pula dengan keterbatasan fasilitas umum, pilihan, kesempatan serta partisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi (Pandji-Indra, 2001).

Pengertian kemiskinan menurut Sumodiningrat (1999) dapat diklasifikasikan ke dalam lima kelas yakni :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Absolut terjadi jika pendapatan penduduk tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup minimum antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan Relatif terjadi jika pendapatan penduduk di atas garis kemiskinan, namun relative rendah bila dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh factor buday untuk tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.

4. Kemiskinan Kronis

Kemiskinan kronis disebabkan oleh kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif ditambah dengan keterbatasan sumber daya dan keterisolasian daerah dan tidak mendukungnya sumber day aalam serta rendhnya taraf pendidikan, kesehatan, keterbatasan lapangan kerja dan ketiakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar.

5. Kemiskinan Sementara

Kemiskinan sementara terjadi akibat perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal ke krisis ekonomi, perubahan kondisi alam yag terkait dengan petani

atau nelayan serta terjadinya bencana alam atau dampak dari kebijakan tertentu yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Definisi kemiskinan yang digunakan pada penelitian ini adalah berdasarkan definisi Badan Pusat Statistik. Kemiskinan dipandang sebagai sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standard kebutuhan minimum baik untuk makanan maupun non makanan. Dengan definisi ini, BPS telah menentukan suatu garis yang disebut dengan garis kemiskinan. Bagi individu yang pengeluarannya untuk makanan dan non makanan berada pada level dibawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh BPS, maka individu tersebut berada pada kelompok individu yang miskin. (BPS Pusat, 2008).

Definisi kemiskinan BPS ini yang dipilih karena kesesuaiannya dengan indikator kemiskinan yang digunakan pada penelitian ini yang terdiri dari persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Perhitungan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh BPS. Selain alasan tersebut, definisi kemiskinan BPS ini dipilih juga karena sumber data tentang kemiskinan berasal dari Badan Pusat Statistik.

Kemiskinan (Todaro, 2006) dapat dibedakan menurut sifatnya yang terdiri atas (a) kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif; dan (b) kemiskinan sukarela dan kemiskinan terpaksa.

2.2.2.1 Kemiskinan Absolut

Konsep kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum / kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut "tetap" (tidak berubah) dalam hal standard hidup, dan garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Bank Dunia (BPS Pusat, 2008) memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia yaitu : pertama, US\$ 1 perkapita per hari dimana diperkirakan ada sekitar 1,2 milyar penduduk dunia yang hidup dibawah ukuran tersebut, kedua, US\$ 2 perkapita per hari dimana ada lebih 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. US dollar yang digunakan adalah US \$ PPP (*Purchasing Power Parity*), bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

2.2.2.2 Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standard minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk termiskin, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan / pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian kemiskinan relatif sangat bergantung pada distribusi pendapatan / pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti orang miskin selalu hadir bersama kita.

Dalam prakteknya, negara kaya selalu mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi dari pada negara miskin seperti pernah dilaporkan oleh Ravallion. Paper tersebut menjelaskan mengapa, misalnya angka kemiskinan resmi pada awal tahun 1990-an mendekati 15 persen di Amerika Serikat dan juga mendekati 15 persen di Indonesia (negara yang jauh lebih miskin). Artinya, banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan dikatakan sejahtera menurut standard Indonesia. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

2.2.2 Penyebab Kemiskinan

Dari segi faktor penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi **kemiskinan kultural, kemiskinan sumber daya ekonomi dan kemiskinan struktural**. Menurut Surbakti (Suyanto,1996) bahwa kemiskinan kultural bukanlah bawaan melainkan akibat dari ketidakmampuan menghadapi kemiskinan yang berkepanjangan. Kemiskinan bukanlah sebab melainkan akibat. Sikap-sikap seperti ini diabadikan melalui proses sosialisasi dari generasi ke generasi.

Kemiskinan sumber daya ekonomi lebih melihat akar kemiskinan itu yang terletak kepada ketidakpunyaan sumber daya ekonomi, seperti tanah dan modal, pendidikan dan ketrampilan, karena penambahan penduduk yang sangat pesat tidak seiring dengan sumber daya ekonomi yang tersedia. Akibatnya tidak hanya semakin banyak petani gurem dan buruh tani tetapi juga surplus tenaga kerja.

Sedangkan kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang dibuat oleh manusia yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik. Disebut kemiskinan struktural karena yang membuat sebagian masyarakat miskin adalah bukan orang perorangan melainkan struktur ekonomi dan politik yang tidak hanya bersifat eksploitasi terhadap pihak yang kurang memiliki sumber daya tetapi juga hanya berpihak kepada orang-orang yang memiliki akses ekonomi dan politik. Dengan demikian dapat dikatakan kemiskinan di Indonesia termasuk ke dalam kemiskinan struktural yang cenderung diwariskan dari generasi ke generasi.

Betapa pentingnya tolok ukur ini dapat dilihat dari implikasi yang ditimbulkan atas penggunaannya. Berbeda tolak ukurnya akan berbeda pula hasil kemiskinan yang diamatinya. Jadi tepat tidaknya tolak ukur, betul tidaknya pengamatan, pada dasarnya sangat ditentukan oleh "Proxy" yang diambilnya. Dimana "Proxy" ini berupa indikator-indikator yang dianggap mencerminkan kenyataan obyektif, apakah betul-betul mencerminkan kemiskinan yang ada (Suyanto, 1996).

Menurut World Bank, setidaknya ada tiga faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu :

- Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan dan pendidikan;

- Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketidakadaan kekuatan di depan institusi negara dan masyarakat;
- Rentan terkena guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan untuk menanggulangnya.

Penyebab kemiskinan menurut Friedman (1992) dapat dilihat dari pelaku rumah tangga dalam suatu komunitas. Kemiskinan dipahami sebagai ketidak-samaan dalam mengakumulasi basis kekuatan sosial. Menurut Friedman terdapat delapan basis kekuatan sosial untuk memperkokoh rumah tangga dalam menghadapi kemiskinan yaitu :

1. Pertahanan ruang hidup, yang mencakup ruang fisik untuk makan, tidur, memasak dan sebagainya atau biasa disebut rumah;
2. Waktu luang yang merupakan waktu diatas waktu yang digunakan untuk menambah nafkah pekerjaan;
3. Pengetahuan dan ketrampilan yang berguna untuk kepentingan jangka panjang keluarga;
4. Informasi yang tepat untuk mendukung kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup;
5. Organisasi sosial yang meliputi organisasi formal maupun informal;
6. Jaringan sosial;
7. Sarana pekerjaan dan lingkungan;
8. Sumber keuangan. Jaringan pendapatan keluarga baik secara formal dan informal melalui kredit.

Selain itu juga, menurut Tambunan (2006) terdapat banyak faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat kemiskinan, mulai dari produktivitas tenaga kerja, tingkat upah netto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja (termasuk jenis pekerjaan yang tersedia), tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, ketersediaan fasilitas umum (seperti pendidikan dasar, kesehatan, informasi, transportasi, listrik, air bersih, dan lokasi pemukiman), penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam suatu wilayah, etos kerja dan motivasi pekerja, budaya atau tradisi, politik, bencana alam, dan peperangan. Sebagian besar dari faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, tingkat pajak

yang tinggi menyebabkan tingkat upah netto rendah, ini bisa mengurangi motivasi kerja seseorang rendah hingga produktivitasnya menurun. Produktivitas yang turun selanjutnya menyebabkan tingkat upah nettonya berkurang lagi, dan seterusnya.

Perekonomian yang tumbuh dengan baik, dapat membawa perubahan struktural dalam penciptaan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam skala mikro, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan modal insani, produktivitas tenaga kerja, upah/pendapatan dan menurunkan kemiskinan.

Di dalam Teori Fertilitas (Todaro, 2006:339) diasumsikan bahwa permintaan atau hasrat suatu keluarga untuk mendapatkan sejumlah anak ditentukan oleh preferensi keluarga itu sendiri atas jumlah anak yang dianggap bisa terus bertahan hidup (biasanya yang lebih mereka inginkan adalah anak laki-laki). Tingkat permintaan terhadap anak tersebut dipengaruhi pula oleh harga atau biaya oportunitas dari kepemilikan anak-anak, serta oleh tingkat penghasilan keluarga yang bersangkutan. Anak, bagi masyarakat miskin, dipandang sebagai suatu investasi ekonomi yang nantinya diharapkan akan mendatangkan suatu "hasil" baik dalam bentuk tambahan tenaga kerja maupun sumber finansial orang tua di usia lanjut. Jadi mekanisme penentuan jumlah anggota keluarga atau jumlah anak dalam Teori Ekonomi Fertilitas yang berlaku di negara-negara berkembang khusus untuk anak-anak tambahan (*Marginal Children*), atau anak keempat dan seterusnya, secara umum dianggap sebagai suatu bentuk investasi. Dalam memutuskan perlu/tidaknya tambahan anak, para orang tua diasumsikan akan selalu memperhitungkan untung ruginya secara ekonomis. Hal inilah banyak yang terjadi di negara-negara berkembang yang tingkat kemiskinannya masih mendominasi tataran kehidupan masyarakatnya.

2.2.3 Pengukuran Kemiskinan

Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan *basic needs*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang

bersifat mendasar. Berdasarkan pendekatan *basic needs*, ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kemiskinan adalah persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Ukuran kemiskinan tersebut dihitung berdasarkan tingkat pengeluaran per kapitanya sebulan. Mereka yang memiliki tingkat pengeluaran lebih rendah dari garis kemiskinan dikategorikan miskin. Garis kemiskinan adalah suatu standard minimum yang diperlukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan maupun non makanan per kapita sebulan.

Pengukuran tingkat kemiskinan di Indonesia pertama kali secara resmi dipublikasikan BPS pada tahun 1984 yang mencakup data kemiskinan periode 1976-1981. semenjak itu setiap tiga tahun sekali BPS menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin, yaitu pada saat modul konsumsi tersedia. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas, yang disebut batas miskin atau garis kemiskinan. Berdasarkan hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978, Standard minimum untuk makanan yang secara memadai harus dikonsumsi oleh seseorang untuk hidup sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya minimal sebesar 2100 kalori perhari. Mengacu pada ukuran tersebut, maka batas miskin untuk makanan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan energinya sebesar 2100 kalori perhari. (BPS Pusat, 2008).

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai komponen yang dapat menggambarkan apakah masyarakat tersebut sudah berada pada kehidupan yang sejahtera atau belum. Komponen yang dapat dilihat antara lain keadaan perumahan di mana mereka tinggal, tingkat pendidikan, dan kesehatan. Biro Pusat Statistik menyatakan bahwa komponen kesejahteraan yang dapat dipakai sebagai indikator kesejahteraan masyarakat adalah kependudukan, tingkat kesehatan dan gizi masyarakat, tingkat pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi masyarakat, keadaan perumahan dan lingkungan, dan keadaan sosial budaya.

2.2.4 Indikator Kemiskinan

Ukuran kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan versi Badan Pusat Statistik. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, indikator yang melihat kemiskinan adalah :

1. **Head Count Index (HCI – P₀)**, yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Indikator HCI menggambarkan prevalensi kemiskinan dalam suatu masyarakat, namun indikator ini tidak menggambarkan jurang / degree kemiskinan maupun transfer dari si miskin si kaya dalam suatu waktu, dan secara implisit indikator HCI mengasumsikan distribusi yang merata antar si miskin (BPS Pusat, 2008)
2. **Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P₁)**, yang merupakan ukuran kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dengan Indeks ini bisa dihitung jumlah subsidi yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan. Namun dari Indeks tersebut tidak tergambar jumlah si miskin dan distribusi antar si miskin yang lebih timpang (BPS Pusat, 2008).
3. **Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index – P₂)**, indeks ini yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin dan mengukur seberapa parah kemiskinan yang terjadi dengan memberi bobot yang lebih tinggi bagi poverty gap yang lebih miskin dibandingkan kurang miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin (BPS Pusat, 2008).

Penggunaan ketiga indikator ini lebih berguna untuk *policy makers*. Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) dapat digunakan sebagai *target policy variable* bagi kebijakan anti kemiskinan. Sementara indeks kesenjangan kemiskinan – *poverty gap* (P₁) dapat digunakan untuk menghitung besar dan alokasi dana untuk penghapusan kemiskinan.

Penghitungan garis kemiskinan kabupaten/kota merupakan dasar dalam penghitungan persentase penduduk miskin untuk seluruh kabupaten/kota yang dirumuskan oleh Foster-Grees-Thorbecke (BPS Pusat, 2008).

Foster-Grees-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk menghitung ketiga indikator tersebut yaitu

$$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$$

dimana :

Z = Garis Kemiskinan

Y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

q = Banyak penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

α = 0, 1, 2

Jika $\alpha = 0$, diperoleh Head Count Index (P_0), jika $\alpha = 1$ diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P_1) dan jika $\alpha = 2$ disebut Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Indeks – P_2).

2.2.5 Ketimpangan Pendapatan

Di dalam kemiskinan sebaiknya kita dapat melihat lebih jauh mengenai konsep ketimpangan pendapatan yaitu :

a. Koefisien Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus koefisien Gini adalah sebagai berikut :

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n fp_i * (Fc_i + Fc_{i-1})$$

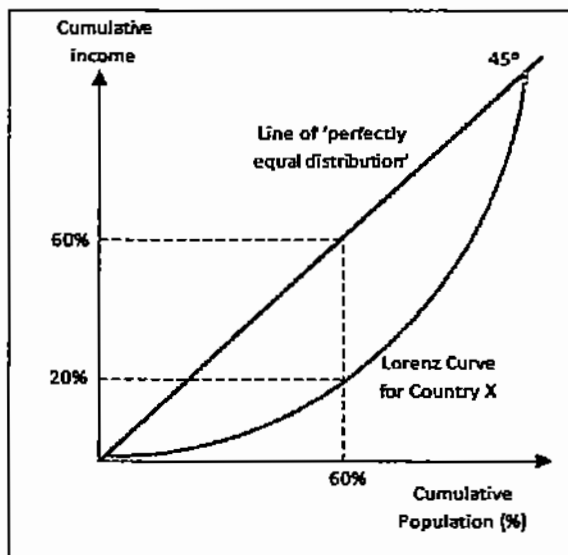
Dimana :

GR = Koefisien Gini (Gini Ratio)

- f_{p_i} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
 F_{c_i} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i
 $F_{c_{i-1}}$ = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Koefisien Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran konsumtif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapat) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kurva Lorenz

Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A = 0$ koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B = 0$ koefisien Gini bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

b. Ukuran Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan : 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Kategori ketimpangan ditentukan menggunakan kriteria sebagai berikut :

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang menengah.
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

c. Indeks Theil dan Indeks-L

Ada sejumlah ukuran ketimpangan yang memenuhi semua kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik. Diantaranya yang paling banyak digunakan adalah Indeks Theil dan Indeks-L (ukuran deviasi log rata-rata). Kedua ukuran tersebut masuk dalam famili ukuran ketimpangan "*generalized entropy*". Rumus "*generalized entropy*" secara umum dapat ditulis sebagai berikut :

$$GE(\alpha) = \frac{1}{\alpha(\alpha - 1)} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)^\alpha - 1 \right]$$

Dimana :

\bar{y} = adalah rata-rata pendapatan (pengeluaran)

Nilai GE bervariasi antara 0 dan ∞ dengan 0 mewakili distribusi yang merata dan nilai yang lebih tinggi mewakili tingkat ketimpangan yang lebih

tinggi. Parameter α dalam kelompok ukuran GE mewakili penimbang yang diberikan pada jarak antara pendapatan pada bagian yang berbeda dari distribusi pendapatan. Untuk nilai α yang lebih rendah, GE lebih sensitif terhadap perubahan pada ekor bawah dari distribusi (penduduk miskin), dan untuk nilai α yang lebih tinggi GE lebih sensitif terhadap perubahan yang berakibat pada ekor atas dari distribusi (penduduk kaya).

Nilai α yang paling umum digunakan adalah 0 dan 1.

- GE (1) dsisebut sebagai indeks Theil, yang dapat ditulis sebagai berikut :

$$GE(1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{y} \right) \ln \left(\frac{y_i}{y} \right)$$

GE (0) juga dikenal dengan indeks-L, disebut ukuran deviasi log rata-rata (mean log deviation) karena ukuran tersebut memberikan standard deviasi dari log (y) :

$$GE(0) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{\bar{y}}{y_i} \right)$$

d. Indeks Ketimpangan Williamson

Williamson (1965) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan (Kuncoro, 2004).

Ketimpangan pembangunan antar kecamatan yang terjadi di Kabupaten Banyumas 1993 – 2000, dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (regional inequality) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson (Sjafrizal, 1997).

Adapun rumus indeks Williamson ini adalah

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Dimana :

Y_i	= PDRB per kapita di kecamatan i
Y	= PDRB per kapita rata-rata Kabupaten/kota
f_j	= jumlah penduduk di kecamatan i
n	= jumlah penduduk kabupaten/kota

Di dalam penelitian oleh Majidi (1997), masalah ketimpangan ekonomi antar daerah tidak hanya tampak pada wajah ketimpangan perekonomian Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa melainkan juga antar Kawasan Barat Indonesia (Kabarin) dan Kawasan Timur Indonesia (Katimin). Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan antar daerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai. Alokasi penganggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tersebut tampaknya perlu diperhatikan di masa mendatang. Strategi alokasi anggaran itu harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan / ketimpangan regional (Kuncoro, 2004).

Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber, berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antardaerah dan antarsektor ekonomi suatu daerah. Bertitik-tolak dari kenyataan itu, penelitian Ardani (1992:3) mengemukakan bahwa kesenjangan / ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

Menurut Myrdal (1957) perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (backwash effects) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (spread effects) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah (Arsyad, 1999: 129).

2.2.6 Pertumbuhan Ekonomi, Ketidakmerataan Pendapatan, dan Kemiskinan

Pengurangan kemiskinan telah lama menjadi pusat perhatian dalam diskusi-diskusi kebijakan pada tingkat pemerintahan nasional maupun pada lembaga dan institusi internasional. Kakwani et.al (2004) menyatakan bahwa tujuan terpenting dari pembangunan adalah pengurangan kemiskinan, yang mana hal ini dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan atau dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Jadi, terdapat hubungan segitiga antara pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan dan kemiskinan, dimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan merupakan hubungan dua arah (Bourguignon, 2004).

Analisa hubungan segitiga antara ketiga hal tersebut diatas telah menjadi bahan perdebatan yang panjang dan sangat menarik diantara para peneliti dan ekonom, melalui penelitian-penelitian yang telah dilakukan untuk kepentingan teoritis keilmuwan. Sedang diantara para pembuat kebijakan, terutama sekali dinegara-negara berkembang, fokus diskusi adalah pada pemilihan strategi pembangunan, yaitu antara mendahulukan pertumbuhan ekonomi atau melaksanakan dengan segera program strategi distribusi pendapatan yang lebih merata, dengan tetap fokus pada pengurangan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi disuatu negara, melalui perubahan yang dilakukannya terhadap struktur ekonomi, secara potensial mempengaruhi distribusi pendapatan. Sacara empiris berdasarkan data antar negara (*cross-section*), Kuznets (1955) mempelopori penelitian mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketidakmerataan pendapatan. Simon Kuznets menemukan adanya suatu hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketidakmerataan pendapatan, yang kemudian lebih dikenal sebagai hipotesa "*inverted U-curve*". Hipotesa tersebut menyatakan bahwa ketidakmerataan pendapatan dalam suatu negara meningkat pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonominya, cenderung tidak berubah pada tahap menengah, dan terus menurun ketika negara tersebut menjadi sejahtera.

Hipotesa Kuznets bersandar pada asumsi bahwa terdapat dua sektor ekonomi dalam suatu negara, yaitu sektor pertanian tradisional didaerah

perdesaan dengan pendapatan per kapita dan ketidakmerataan pendapatan yang rendah dan sektor modern (sektor industri dan jasa-jasa) di daerah perkotaan dengan pendapatan per kapita dan ketidakmerataan pendapatan yang tinggi. Akibatnya terjadi migrasi tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern yang meningkatkan ketidakmerataan pendapatan di negara tersebut.

Kuznets juga menekankan terjadinya perubahan struktural dalam pembangunan ekonomi, dimana dalam prosesnya sektor industri dan jasa-jasa cenderung berkembang dan terjadi pergeseran dari sektor tradisional ke sektor modern. Selama masa transisi tersebut, produktivitas dan upah tenaga kerja di sektor modern lebih tinggi daripada sektor tradisional, sehingga pendapatan per kapita yang diharapkan juga lebih tinggi, akibatnya ketidakmerataan pendapatan antara kedua sektor tersebut meningkat pada awal pembangunan.

Kevalidan hipotesa "*inverted U-curve*" membawa implikasi bahwa jika suatu negara berada pada tahap-tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi akan lebih meningkatkan ketidakmerataan pendapatan sehingga pengurangan kemiskinan akan memakan waktu yang lebih lama (Adam, 2004). Karenanya hipotesa ini sangat kontroversial dan menjadi bahan perdebatan, mempengaruhi pemikiran, dan penelitian selanjutnya mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan.

Hidayat (2007) menyatakan bahwa penelaahan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya juga menjadi sangat menarik karena begitu beragamnya kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari berbagai penelitian tersebut, ada yang hasilnya mendukung penuh hipotesa "*inverted U-curve*" (Oshima, 1962), mendukung sebagian (Ahluwalia, 1976a dan 1976b), ataupun menolaknya sama sekali (Deininger dan Squire, 1996). Akan tetapi, ketiga penelitian tersebut diatas dilakukan dengan menggunakan pendekatan data panel internasional (bukan negara tunggal), sehingga apapun hasil penelitiannya harus ditanggapi secara hati-hati. Hal ini terutama sekali karena data distribusi pendapatan antar negara, betapapun comparability-nya, kemungkinan besar tetap tidak bisa dibandingkan. sebagai akibat adanya perbedaan konsep pendekatan pendapatan/pengeluaran dalam penghitungan ketidakmerataan pendapatan,

perbedaan unit populasi, dan cakupan survei. Galbraith dan Kum (2002), memperlihatkan hal tersebut ketika membahas beragamnya hasil-hasil penelitian yang menggunakan data penelitian Deininger dan Squire.

Perkembangan terakhir dari penelitian-penelitian mengenai pembangunan ekonomi, juga tidak lagi berfokus pada berlaku atau tidaknya hipotesa “*inverted U-curve*” dari Kuznets, tapi lebih kepada pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan dengan kemungkinan terjadi peningkatan ketidakmerataan pendapatan yang mengurangi efektifitas dari pengurangan kemiskinan, seperti yang ditunjukkan oleh Wodon (1999) di Bangladesh dan Lin (2003) di China. Selanjutnya berkembang penelitian-penelitian dengan fokus pada efektifitas pengurangan kemiskinan oleh pertumbuhan ekonomi (*Pro-poor Growth Index*) yang dipelopori oleh Kakwani dan Pernia (2000) dan dilanjutkan oleh Ravallion dan Chen (2003), Son (2003), dan Ravallion (2004), dimana dikatakan bahwa sekalipun pertumbuhan ekonomi meningkatkan ketidakmerataan pendapatan akan tetapi hal itu mungkin tidak mengurangi efektifitas pengurangan kemiskinannya seperti yang juga diperlihatkan oleh Ravallion (2005). Penelitian serupa di Indonesia, secara umum dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tingkat provinsi di Indonesia, memang meningkatkan ketidakmerataan pendapatan. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi tersebut berhasil mengurangi kemiskinan dan bahkan peningkatan ketidakmerataan pendapatan sebagai eksek dari pertumbuhan ekonomi tidaklah mengganggu efektifitas pengurangan kemiskinannya. Jadi, tidak perlu takut dengan (meningkatnya) ketidakmerataan pendapatan (Hidayat, 2007).

2.2.7 Disparitas Pembangunan dan Disparitas Pendapatan Antar Wilayah

Disparitas antar wilayah adalah perbedaan tingkat pertumbuhan antar wilayah. Setiap negara selalu mempunyai wilayah yang maju secara ekonomi dan ada yang tertinggal. Pembangunan wilayah yang merata tidak berarti setiap wilayah mempunyai tingkat pertumbuhan atau perkembangan yang sama, atau mempunyai pola pertumbuhan yang seragam untuk setiap wilayah. Pengertian Pembangunan Wilayah secara menyeluruh sesuai kapasitas dan potensu yang

dimiliki, sehingga dampak positif dari pertumbuhan ekonomi terbagi secara seimbang kepada seluruh wilayah atau daerah.

Azman (1987) menyatakan bahwa pembentukan PDRB per kapita ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor ekonomi maupun non ekonomi. Beberapa hasil penelitian lain mengenai pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap PDRB dengan variasi indikatornya diantaranya hasil penelitian Santoso (1989) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar daerah di Propinsi Bali disebabkan oleh adanya perbedaan potensi sumber daya alam, ketersediaan modal, teknologi, kualitas sumber daya manusia dan fasilitas lainnya seperti prasarana transportasi, komunikasi lembaga keuangan dan sebagainya. (Alam, 2006).

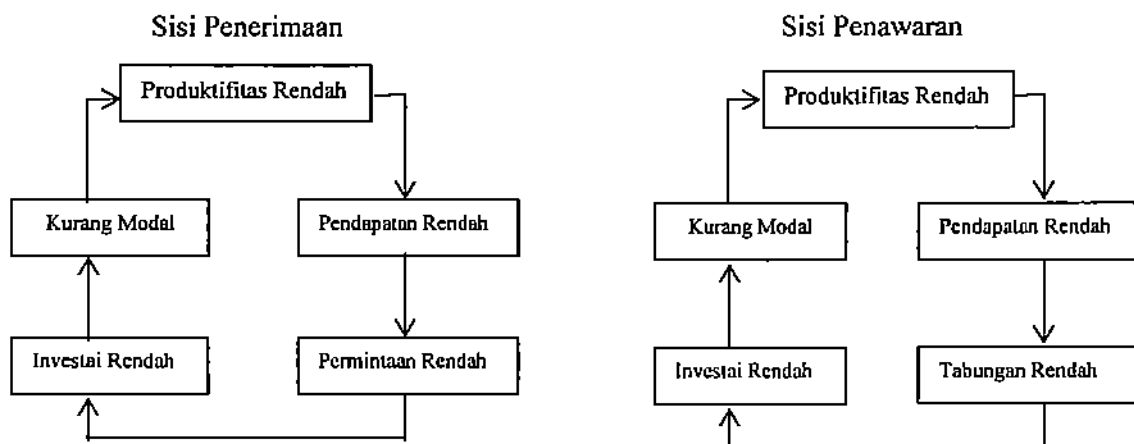
Setyarini (1999) dalam hasil penelitian kesenjangan pembangunan ekonomi antar daerah di Jawa Tengah mengemukakan faktor yang menyebabkan kesenjangan antara lain distribusi persentase sektor industri, pendapatan asli daerah, panjang jalan aspal berpengaruh positif terhadap pendapatan per kapita. Sedangkan hasil penelitian Purwantini (2000), kesenjangan pembangunan di Nusa Tenggara Barat disebabkan oleh faktor distribusi persentase sektor perdagangan, persentase bantuan propinsi dan persentase kredit tersalur.

Azman (1987) dalam hasil penelitiannya mengemukakan faktor yang berpengaruh terhadap PDRB per kapita secara nasional dibagi dalam empat kategori yaitu (1) potensi daerah yang tergambar dalam PDRB sektoral, terutama sektor yang sumbangannya besar terhadap pembentukan PDRB per kapitanya. Variabel yang digunakan untuk menggambarkan potensi daerah antara lain sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor industri pengolahan dan sektor jasa, (2) pendidikan dan kesehatan yang meliputi variabel angka melek huruf, angka harapan hidup dan angka kesakitan. (3) sarana dan prasarana dengan variabel panjang jalan dan realisasi penanaman modal dalam negeri, (4) jumlah penduduk. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap pembentukan PDRB per kapita adalah semua variabel potensi daerah, tingkat buta huruf, total panjang jalan dan jumlah penduduk. (Alam, 2006).

2.2.8 Determinan Kemiskinan

Negara terbelakang umumnya terjat ke dalam apa yang disebut "Lingkaran Kemiskinan". Nurske (Jhingan, 1994) menjelaskan "Lingkaran Kemiskinan" mengandung arti deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain beraksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap dalam keadaan melarat. Si miskin misalnya, selalu kurang makan karena kurang makan, kesehatannya buruk karena fisiknya lemah kapasitas kerjanya rendah, karena kapasitas kerjanya rendah penghasilannya pun rendah, dan itu berarti ia miskin, akhirnya ia tidak akan mempunyai cukup makan, dan seterusnya. Bila keadaan seperti ini dikaitkan dengan negara secara keseluruhan dapat dikemas ke dalam dalil kuno: "Suatu negara miskin karena ia miskin".

Lingkaran kemiskinan tersebut bila dilihat dari **sudut permintaan** dapat dijelaskan sebagai berikut : rendahnya tingkat **pendapatan** nyata menyebabkan tingkat **permintaan** menjadi rendah, sehingga pada gilirannya tingkat **investasi** pun rendah. Tingkat investasi yang rendah kembali menyebabkan **modal** kurang dan **produktivitas** rendah. Inilah yang ditunjukkan dalam Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Lingkaran Kemiskinan Sisi Penerimaan dan Sisi Penawaran Nurske

Produktivitas rendah tercermin di dalam **pendapatan** nyata yang rendah. **Pendapatan** nyata rendah berarti tingkat **tabungan** juga rendah. Tingkat **tabungan** yang rendah menyebabkan tingkat **investasi** rendah dan **modal** kurang. Kekurangan **modal** pada gilirannya bermuara pada **produktivitas** yang rendah.

Dengan demikian lingkaran kemiskinan itu lengkap kalau dilihat dari sudut penawaran. Lingkaran ini dilukiskan juga pada gambar 3.1. Tingkat pendapatan rendah, yang mencerminkan rendahnya investasi dan kurangnya modal, merupakan ciri umum kedua lingkaran kemiskinan tersebut.

Lingkaran kemiskinan yang ketiga menyangkut **keterbelakangan manusia dan sumber alam**. Pengembangan sumber alam pada suatu negara tergantung pada kemampuan produktif manusianya. Jika penduduknya terbelakang dan buta huruf, langka akan ketrampilan teknik, pengetahuan dan aktivitas kewiraswastaan, maka sumber-sumber alam akan tetap terbengkalai, kurang atau bahkan salah guna. Pada pihak lain, keterbelakangan sumber alam ini menyebabkan keterbelakangan manusia. Keterbelakangan sumber alam, karena itu, merupakan sebab dan sekaligus akibat keterbelakangan manusia.

Bila dilihat dari sisi pembentukan modal yang rendah, kemiskinan merupakan penyebab sekaligus akibat dari rendahnya tingkat pembentukan modal suatu negara. Masyarakat suatu negara terbelakang tercekam oleh kemiskinan. Kebanyakan dari mereka **buta huruf dan tidak terdidik**, serta menggunakan **peralatan modal dan metode produksi yang telah usang**. Lapangan usaha hanya bidang **pertanian pangan**, tidak mobile dan tidak banyak bersentuhan dengan sektor pasar perekonomian. Dengan begitu produktivitas marginalnya menjadi sangat rendah. **Produktivitas** rendah menyebabkan **pendapatan** nyata rendah, lalu **tabungan** pun rendah, **investasi** rendah dan tingkat **pembentukan modal** rendah pula. Tingkat **konsumsi** sudah begitu rendah sehingga tidak mungkin lagi dikurangi untuk meningkatkan **cadangan modal**.

Kalaupun ada sedikit pendapatan yang dapat ditabung, uang itu disimpan dalam bentuk mata uang atau dipergunakan untuk membeli **emas** dan permata dan sebagainya. Kecenderungan untuk menyimpan uang seperti ini merupakan akibat dari **ketiadaan fasilitas perbankan** di daerah pedesaan. Tidak mengherankan bahwa pembentukan modal di negara terbelakang sangat rendah. Tetapi apakah sebenarnya yang menghalang gairah menabung dan berinvestasi ? sebab utamanya yang menghambat investasi adalah kebiasaan dimana secara alamiah orang lebih suka mencoba usaha yang sudah dikenal daripada yang belum karena orang tidak mau mengambil **resiko** dalam usaha baru. Sebab *kedua*, sempitnya

pasar domestik. Karena daya beli rendah, kemampuan **pasar domestik** untuk menyerap penawaran barang-barang baru menjadi terbatas. *Ketiga*, kesulitan mendapatkan dana untuk tujuan investasi. Kesulitan ini didapat karena tiadanya **pasar modal** dan **pasar uang**, serta lemahnya sistem **perkreditan** dan **perbankan**. *Keempat*, kurangnya **buruh terampil** dan kendornya mobilitas faktor sehingga mempertinggi biaya produksi dan dengan demikian merintangai calon-calon investor. *Kelima*, ketiadaan atau kurang cukupnya **prasarana** dasar seperti **transportasi**, tenaga dan **persediaan air**, dan sebagainya, ini memperlemah dorongan untuk menanam modal. Terakhir, kemampuan **wiraswasta** sangat langka. Kalaupun ada, ia akan tersingkir oleh tingginya resiko investasi. Para pengusaha dan pedagang biasanya bergerak di bidang ekspor barang-barang primer. Jadi di negara-negara seperti itu tidak ada tambahan terhadap **stok modal riil** yang ada.

Pada kelompok berpendapatan menengah, mereka bergerak di bidang usaha yang sudah mapan dan sedikit beresiko seperti pemasaran dan jasa. Walaupun kelompok ini mempunyai kemampuan wiraswasta, mereka enggan menanam modalnya di bidang industri manufakturing karena alasan-alasan seperti sulitnya mendapatkan dukungan dari **lembaga keuangan**, dukungan dari **teknologi** maju, dan dukungan dari **buruh terlatih** dan manajemen. Kesulitan ini secara kumulatif telah menghadang pertumbuhan modal.

Namun demikian, kesulitan tersebut dapat diatasi jika negara mampu menyediakan overhead-sosial yang diperlukan. Ini akan memberikan dorongan, dalam batas tertentu kepada pembangunan.

Nurske menegaskan bahwa kelangkaan modal merupakan hambatan serius tetapi bukan satu-satunya hambatan bagi perkembangan ekonomi. Pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan kekayaan manusiawi, sikap sosial, kondisi politik dan latar belakang sejarah. Modal merupakan syarat yang perlu tetapi bukan syarat yang mutlak bagi kemajuan. Ringkasnya negara terbelakang memiliki lembaga sosial dan sikap yang tidak menunjang pembangunan ekonomi. Faktor-faktor kelembagaan tersebut seperti stratifikasi pekerjaan yang ketat, sikap yang memandang rendah peranan bisnis, ketidakcocokan dengan pola hidup dan

pengelompokkan masyarakat berdasarkan kasta dan kelas, agama dan suku bangsa, tradisi budaya dan pola sosial, warna kulit dan ciri-ciri kedaerahan.

Selain itu juga keluarga merupakan unit sosial dan unit ekonomi utama. Sikap keluarga merupakan sebab dari **ledakan penduduk** dan keterikatan pada **tanah**. Uang kebanyakan disimpan atau ditanam dalam bentuk emas, permata, atau gedung mewah atau dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban sosial pada berbagai kesempatan upacara demi status. Pengeluaran gagah-gagahan, atau lebih dikenal sebagai **konsumsi mewah** yang dilakukan, juga membatasi kemampuan untuk menabung dan menanam modal.

Sikap sosial terhadap pendidikan adalah halangan lain lagi terhadap kemajuan ekonomi. Pendidikan akademis murni yang menyiapkan orang untuk menjabat posisi di pemerintahan atau pekerjaan klerikal lainnya lebih disukai ketimbang pendidikan profesional. Ada semacam prasangka yang memandang rendah dan kurang menghargai pekerjaan yang bersifat manual. Akibatnya, ada rasa anti terhadap pendidikan dan pekerjaan praktis. Hal inilah yang menyebabkan keterbelakangan teknologi.

Menurut Nurske, pembentukan atau pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor dan sekaligus faktor utama di dalam pembangunan yang dapat menggantung lingkaran kemiskinan. Jadi pembentukan modal menghasilkan kenaikan besarnya output nasional, pendapatan dan pekerjaan, dengan demikian memecahkan masalah inflasi dan neraca pembayaran.

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan disuatu negara oleh Todaro (2006) tergantung pada dua faktor utama yakni : (1) Tingkat Pendapatan nasional rata-rata, dan (2) lebar-sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Setinggi apapun pendapatan nasional per-kapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, semerata apapun distribusi pendapatan di suatu negara, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya rendah, maka kemelatan juga akan semakin meluas. Oleh sebab itu, di hampir semua negara-negara berkembang, standard hidup dari sebagian besar penduduknya cenderung sangat rendah dibandingkan dengan standard hidup orang-orang di negara-negara kaya. Standard hidup yang rendah tersebut dimanifestasikan secara

kuantitatif dan kualitatif dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah (kemiskinan), perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, bekal pendidikan yang minim atau bahkan tidak ada sama sekali, angka kematian bayi yang tinggi, usia harapan hidup yang relatif sangat singkat, peluang mendapatkan pekerjaan yang rendah, dan dalam banyak kasus juga terdapat ketidakpuasan serta ketidakberdayaan secara umum.

Todaro (2006) juga menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan merupakan tujuan yang tidak saling bertentangan. Ada lima alasan mengapa kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan tidak harus memperlambat laju pertumbuhan. *Pertama*, kemiskinan yang meluas menciptakan kondisi yang membuat kaum miskin tidak mempunyai akses terhadap pinjaman kredit, tidak mampu membiayai pendidikan anak, dan dengan ketiadaan peluang investasi fisik maupun moneter, mempunyai banyak anak sebagai sumber keamanan keuangan di masa tua-nya nanti. Faktor-faktor ini secara bersama-sama menyebabkan pertumbuhan per kapita lebih kecil daripada jika distribusi pendapatan lebih merata.

Kedua, akal sehat, yang didukung dengan banyaknya data empiris terbaru, menyaksikan fakta bahwa tidak seperti sejarah yang pernah dialami oleh negara-negara yang sekarang sudah maju, kaum kaya di negara-negara miskin sekarang tidak dikenal karena hematnya atau hasrat mereka untuk menabung dan menginvestasikan bagian yang besar dari pendapatan mereka di dalam perekonomian negara mereka sendiri.

Ketiga, pendapatan yang rendah dan standard hidup yang buruk yang dialami oleh golongan miskin yang tercermin dari kesehatan, gizi, dan pendidikan yang rendah, dapat menurunkan produktivitas ekonomi mereka dan akibatnya secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan perekonomian tumbuh lambat. Strategi yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan standard hidup golongan miskin tidak saja akan memperbaiki kesejahteraan mereka, tetapi juga akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan seluruh perekonomian.

Keempat, peningkatan tingkat pendapatan golongan miskin akan mendorong kenaikan permintaan produk kebutuhan rumah tangga buatan lokal, seperti makanan dan pakaian, secara menyeluruh, sementara golongan kaya

cenderung membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk barang-barang mewah impor. Meningkatkan permintaan akan barang-barang buatan lokal memberikan rangsangan yang lebih besar kepada produksi lokal, memperbesar kesempatan kerja lokal dan menumbuhkan investasi lokal. Permintaan seperti ini akan menciptakan kondisi bagi pertumbuhan ekonomi yang cepat dan partisipasi rakyat banyak di dalam pertumbuhan itu.

Kelima, penurunan kemiskinan secara massal dapat menstimulasi ekspansi ekonomi yang lebih sehat karena merupakan insentif materi dan psikologis yang kuat bagi meluasnya partisipasi publik di dalam proses pembangunan. Sebaliknya lebarnya kesenjangan pendapatan dan besarnya kemiskinan absolut dapat menjadi pendorong negatif materi dan psikologis yang sama kuatnya terhadap kemajuan ekonomi. Oleh karena itu disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat dan penanggulangan kemiskinan bukanlah tujuan yang saling bertentangan.

Menurut Andre (1996), kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan, serta ketrampilan dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Menurut Tambunan (2006), intervensi jangka menengah dan jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan adalah di bidang pendidikan dan kesehatan yang baik bagi semua anggota masyarakat di suatu negara merupakan pra-kondisi bagi keberhasilan dari kebijakan anti kemiskinan dari pemerintah negara tersebut. Oleh karena itu penyediaan pendidikan dasar terutama masalah akses dan biaya tambahan serta pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab mutlak dari pemerintah, dimanapun juga baik negara maju maupun di negara berkembang. Kemudian, sama seperti penyediaan pendidikan dasar dan kesehatan, penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan terutama pembangunan fasilitas-fasilitas utama/umum seperti pemukiman/perumahan bagi kelompok masyarakat miskin,

fasilitas sanitasi dan transportasi, infrastruktur fisik selain air bersih seperti jalan dan listrik merupakan intervensi yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Lebih jelasnya oleh Tambunan (2006) dikemukakan bahwa masalah kesehatan yang dominan di kebanyakan negara sedang berkembang adalah bukan tidak adanya pelayanan kesehatan tetapi ketidakmampuan dari sistem-sistem pelayanan kesehatan publik untuk memberikan pelayanan kesehatan berkualitas baik di semua wilayah. Kurang baiknya pelayanan kesehatan yang didapat oleh kelompok miskin membuat suatu masa kehidupan yang tidak terjamin bagi mereka, dimana kesempatan-kesempatan pendapatan dapat terganggu oleh episode-episode sakit. Kesehatan dan nutrisi yang buruk dapat mengganggu produktivitas individu maupun nasional dan dapat mempengaruhi masa hidup dari kelompok miskin.

Menurut Suyono (2002) bahwa keberhasilan pemberdayaan keluarga dengan kemiskinan dimasa lalu yaitu Keluarga Berencana harus lebih ditingkatkan terutama di keluarga miskin karena dengan adanya penurunan pertumbuhan penduduk yang meyakinkan, yang diiringi dengan membudayanya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dalam kebanyakan keluarga Indonesia, harus dilanjutkan dengan upaya peningkatan kualitas penduduk secara terpadu, konsisten dan berkelanjutan. Oleh sebab itu pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah merupakan kesempatan yang sangat baik untuk "menyulap" lembaga BKKBN daerah dengan petugas lapangannya yang handal menjadi dinas kependudukan dan pemberdayaan keluarga yang utuh dengan tugas melanjutkan pemberdayaan keluarga yang telah dimulai dengan berhasil secara massal di masa lalu. Karena itu, untuk pembentukan lembaga atau dinas kependudukan dan pemberdayaan keluarga di tingkat kabupaten atau kota madya, setiap pemerintah daerah tidak boleh mempertimbangkan untung rugi pengembangan kelembagaan itu hanya secara ekonomi. Lebih-lebih hanya dari segi apakah lembaga atau dinas itu "menghasilkan pendapatan daerah", atau justru menjadi "penyedot dana daerah". Dana yang dialokasikan pada usaha yang berhasil akan dikembalikan berupa keuntungan yang berlipat ganda karena sumber daya manusia yang berkualitas akan menghasilkan gagasan, prakarsa,

produk-produk dan jasa yang tidak ada taranya di masa depan. Program keluarga berencana juga dapat dilakukan dengan pendekatan yang mulai dianjurkan oleh pemerintah pusat, yaitu melalui dimasukkannya ke dalam ajaran Departemen Pendidikan Nasional yang sedang mengembangkan program Pendidikan yang berorientasi pada pembekalan kecakapan dan ketrampilan untuk hidup sejahtera, "*Broad-Base Education (BBE)*". Dengan pendekatan ini para siswa dibekali dengan pengetahuan untuk hidup sejahtera dan pembekalan siap kerja. Karena kemiskinan, hanya sedikit saja anak-anak muda yang berkesempatan meneruskan pendidikan ke jenjang SMU dan SMK, apalagi ke Perguruan Tinggi. Padahal salah satu akibat awal keberhasilan gerakan KB di Indonesia adalah ledakan remaja yang merupakan rentetan dari ledakan bayi atau "baby boom" sebelumnya. Apabila tidak diciptakan kiat yang tepat, godaan terhadap remaja, khususnya remaja perempuan, akan mendorong orang tua kurang mampu mengawinkan anak mereka pada usia yang sangat muda. Karena itu pengetrapan sistem pendidikan dengan pendekatan BBE akan memungkinkan anak-anak perempuan membekali dirinya dengan ketrampilan dan pengetahuannya tentang keluarga berencana agar setelah tamat bisa langsung mempraktekkan ilmu dan ketrampilannya untuk bekerja. Dengan adanya keadaan seperti itu, maka jajaran BKKBN, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Tenaga Kerja dan pemerintah daerah harus makin peka terhadap fenomena kependudukan seperti itu. Karena itu adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu, lembaga-lembaga tersebut diatas justru harus ditingkatkan peranan dan anggarannya, bukan malah dibubarkan.

Berbicara mengenai kemiskinan, Rajadhyaksha (2008) mengemukakan pendapatnya bahwa kemiskinan adalah masalah yang selalu ada, jauh lebih dulu dari reformasi ekonomi. Kemiskinan itu perlu diatasi dengan cara yang sama dengan yang dilakukan di tempat lain di dunia yaitu dengan modal, produktivitas dan pasar. Ada dua cara untuk mengatasi dua masalah kemiskinan dan produktivitas yang rendah. Pertama, pemerintah harus menghilangkan pembatas di sektor-sektor yang memiliki potensi lapangan kerja luas bagi mereka yang memiliki sedikit ketrampilan; sektor yang dapat memberikan upah layak untuk pekerjaan berat. Kedua, kaum miskin harus memiliki akses yang lebih baik

terhadap modal, teknologi, informasi, hak milik dan pasar. Hak milik yang jelas akan memungkinkan setidaknya beberapa kelompok penghuni perkampungan mendapat uang dari bank, dan membangun kembali komunitas mereka sesuai kebutuhan. Bahwa kurangnya hak milik membuat kaum miskin tidak dapat mengubah aset mereka menjadi modal produktif. Hak milik ini dapat berupa hak atas tanah, dimana dengan adanya kepemilikan hak atas tanah (terutama tempat tinggal) keluarga miskin akan mempunyai harapan untuk dapat lebih maju di masa depannya dibandingkan dengan keluarga miskin yang tidak mempunyai hak kepemilikan dan studi ini berdasarkan atas kisah tentang perkampungan di Buenos Aires. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya kepemilikan atas rumah dan tanah maka keluarga miskin dapat mempunyai harapan yang lebih baik sehingga mereka akan meningkatkan produktivitas mereka dalam mencari penghasilan.

2.2.9 Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan dari penyajian mengenai pengertian, penyebab, pengukuran dan determinan kemiskinan yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan dan memperkirakan beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kependudukan

Menurut Arsyad (2004), masalah kependudukan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja kurang seimbang, baik dilihat dari sisi antar pulau, antar daerah, maupun antara daerah perdesaan dan daerah perkotaan, serta antar sektor. Dengan adanya tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi secara langsung akan menimbulkan masalah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu akan adanya ketimpangan penduduk yang mempunyai pengaruh yang luas terhadap berbagai segi kehidupan manusia dan lingkungan.

Masalah kependudukan ini juga mengilhami penelitian yang dilakukan oleh Reverend Thomas Malthus pada tahun 1798, yang mengemukakan teorinya tentang hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan

ekonomi. Dalam tulisannya yang berjudul *Essay on the Principles of Population*, Malthus melukiskan konsep hasil yang menurun (*concept of diminishing returns*). Malthus menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu menjadi dua kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena itu, Malthus berkeyakinan bahwa satu-satunya cara untuk menghapuskan tingkat kehidupan yang rendah atau “kemiskinan absolut” adalah menganjurkan masyarakat untuk “menahan hawa nafsu” dan membatasi jumlah keturunannya. Penelitian Malthus ini oleh para ekonom modern diberi nama “Teori Perangkap Penduduk”.

Selain itu indikator lainnya dalam masalah kependudukan ini adalah dilihat dari rasio angka beban ketergantungan, yaitu perbandingan antara orang-orang yang belum/tidak sanggup bekerja dengan orang-orang yang berada dalam usia kerja (produktif). Pada tahun 2000, setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 55 penduduk usia tidak produktif. Angka beban ketergantungan pada tahun 2008 turun menjadi 47,8 yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 48 penduduk usia tidak produktif. Semakin kecilnya angka beban ketergantungan pada gilirannya akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.

Adapun Indikator-Indikator dari BPS yang menggambarkan keadaan kependudukan di Indonesia terdiri dari :

- a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
- b. Persebaran dan Kepadatan Penduduk
- c. Angka Beban Ketergantungan

2. Pendidikan

Badan Pusat Statistik mempublikasikan beberapa indikator yang menyangkut pendidikan. Indikator-indikator tersebut menggambarkan keadaan pendidikan di Indonesia yang terdiri dari :

- a. Tingkat Partisipasi Pendidikan

- b. Tingkat Buta Huruf / Angka Melek Huruf
- c. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan
- d. Ketersediaan Sarana Pendidikan

Faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara diantaranya adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu jalan bagi peningkatan kualitas SDM tersebut.

Menurut Todaro (2006:434), pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar dan penting. Pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Pada saat yang sama, pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan suatu sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan pendidikan sangat penting dalam pembanguana ekonomi.

Untuk itu semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk maka akan menunjukkan kualitas SDM di suatu wilayah. Sehubungan dengan penelitian ini mengukur kesejahteraan rakyat di tingkat kabupaten/kota maka asumsi yang digunakan untuk mengukurnya adalah dengan variabel pendidikan penduduk yang telah tamat sekolah tingkat menengah atas / Umum. Hal ini didasari pada kemampuan kabupaten/kota yang dapat menyediakan sarana/prasarana pendidikan pada jenjang SMA/Kejuruan.

Dengan semakin tinggi penduduk yang telah tamat pendidikan di SMA/Umum maka tingkat kesejahteraannya akan meningkat, karena dengan bekal pendidikannya tersebut maka penduduk dapat mengembangkan kapasitas dirinya dengan meningkatkan produktivitas dan akan banyak terbuka kesempatan/peluang untuk bekerja sehingga akan meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya tingkat kemiskinan dapat ditekan/berkurang.

3. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah mereka yang berumur sepuluh tahun keatas dan mempunyai pekerjaan dan paling sedikit bekerja selama 1 jam seminggu atau mereka yang tidak bekerja karena suatu sebab seperti petani yang sedang menunggu panen, pegawai yang sedang sakit, atau pekerja bebas profesional yang sedang menunggu pekerjaan dan seseorang yang mencari pekerjaan (BPS Pusat, 2008).

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat angkatan kerja di suatu daerah umumnya seperti dibawah ini :

- a. Penduduk berdasarkan kegiatan pekerjaan
- b. Angkatan kerja dan Pendidikan tertinggi yang ditamatkan
- c. Tenaga kerja dan lapangan usaha utama
- d. Tenaga kerja berdasarkan status pekerjaan utama
- e. Pengangguran

Salah satu aspek penting untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengamati aspek ketenagakerjaan.

Angkatan kerja terdiri dari bekerja dan tidak bekerja. Angkatan bekerja yang bekerja adalah mereka yang melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan. Sedangkan angkatan kerja yang tidak bekerja atau pengangguran adalah mereka yang sama sekali tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan.

Banyaknya penduduk yang bekerja menunjukkan banyaknya penduduk yang mampu secara ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa, yang secara tidak langsung dapat menunjukkan pula banyaknya penduduk yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebaliknya, banyaknya pengangguran menunjukkan banyaknya penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh sebab itu pengangguran berkaitan erat dengan kemiskinan.

Di dalam mengukur tingkat kesejahteraan, variabel angkatan kerja yang tidak bekerja (pengangguran) ini sangat berperan penting karena dengan mengetahui besaran angka pengangguran maka dapat diasumsikan bahwa

tingkat kemiskinan akan mengikutinya secara positif. Artinya semakin besar angka pengangguran maka tingkat kemiskinan akan bertambah besar pula.

4. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu variabel kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan rakyat sehubungan dengan kualitas hidupnya. Semakin baik kesehatan suatu masyarakat maka kesejahteraan masyarakat itu sendiri akan meningkat dan kemiskinan akan dapat mudah ditanggulangi. Keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa, karena dengan penduduk yang sehat, pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan lancar (BPS Pusat, 2008).

Variabel-variabel yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan di suatu daerah umumnya seperti dibawah ini :

- a. Usia Harapan Hidup
- b. Tingkat Kesakitan Penduduk
- c. Sarana Kesehatan
- d. Tenaga Kesehatan

Menurut World Health Organization (Todaro, 2006:469), mencantumkan definisi kesehatan yaitu sebuah kondisi kesejahteraan fisik, mental, serta sosial dan bukan sekedar bebas penyakit serta kelemahan fisik”.

Sebuah studi yang dilakukan di Bangladesh menemukan bahwa produktivitas yang tinggi dari pekerja yang sehat membuat mereka mampu mendapatkan pekerjaan yang memberi bayaran yang lebih tinggi. Jadi, bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa kesehatan dan gizi memang mempengaruhi kesempatan kerja, produktivitas, serta upah dan hal ini sangat sering terjadi diantara kaum termiskin. Peran pemerintah yang efektif dalam sistem kesehatan merupakan hal yang kritis karena kesehatan merupakan hal yang sentral dalam mengentaskan kemiskinan karena tiga alasan penting, pertama, karena masyarakat seringkali kurang mendapat informasi mengenai kesehatan akibat kemiskinan. Kedua, rumah tangga mengeluarkan dana yang terlalu sedikit untuk kesehatan karena mereka mungkin mengabaikan eksternalitas. Ketiga, pasar akan berinvestasi terlalu sedikit pada infrastruktur

kesehatan dan penelitian serta pengembangannya dan transfer teknologi ke negara-negara berkembang, karena kegagalan pasar. Manajemen yang cermat dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, kepengurusan merupakan inti dari pemerintah yang baik. Kesehatan masyarakat selalu merupakan prioritas nasional: tanggung jawab pemerintah atas hal ini akan terus berkelanjutan dan bersifat permanen. (Todaro, 2006:479-489).

Atas dasar hal tersebut, untuk melihat kesejahteraan rakyat di dalam penelitian ini dapat dilihat dari seberapa besar kualitas kesehatan masyarakat dengan mengukurnya dari tingkat kesakitan penduduk (keluhan sakit). Semakin besar tingkat kesakitan penduduk maka tingkat kesejahtraannya akan berkurang dan tingkat kemiskinan akan bertambah karena bila penduduk menderita sakit akan menyebabkan produktivitasnya akan berkurang sehingga tidak mendapatkan penghasilan/pendapatan maka akan berakibat penduduk akan bertambah miskin. Semakin besar tingkat kesakitan penduduk (keluhan sakit) maka akan semakin besar pula tingkat kemiskinannya.

5. Fertilitas

Fertilitas merupakan kemampuan seseorang wanita melahirkan, yang tercermin dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Kelahiran bayi ini dapat dibedakan menjadi lahir hidup dan lahir mati, apabila sewaktu lahir memiliki tanda-tanda kehidupan maka disebut lahir hidup (BPS Pusat, 2008).

Variabel-variabel yang dapat digunakan untuk menggambarkan fertilitas di suatu daerah umumnya seperti dibawah ini :

- a. Tingkat Kelahiran
- b. Tingkat Kematian Bayi
- c. Angka Kematian Ibu
- d. Persentase wanita 15 – 49 tahun berstatus kawin yang masih menggunakan alat Keluarga Berencana

Program KB dan penundaan usia perkawinan pertama pada wanita merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas di Indonesia, karena berdampak memperpendek masa reproduksi mereka. Wanita yang

kawin pada usia sangat muda mempunyai resiko cukup besar pada saat hamil dan melahirkan kemudian akan berpengaruh pada keselamatan ibu dan bayinya.

Dengan adanya program KB ini maka akan berdampak terhadap kesejahteraan keluarga, karena dengan memberi kesempatan kepada wanita untuk menunda kelahiran ataupun perkawinan, maka para wanita diberi kesempatan untuk bersekolah lebih tinggi dan dapat menambah pengetahuannya terhadap peningkatan kualitas kehidupan keluarganya. Indikator wanita yang menggunakan alat Keluarga Berencana menandakan bahwa semakin tinggi persentasenya maka akan berdampak pada penurunan penduduk miskin.

6. Taraf dan Pola Konsumsi

Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sehingga akan meningkatkan pola konsumsi masyarakat. Dengan demikian pola perubahan konsumsi masyarakat merupakan salah satu indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

Adapun variabel-variabel yang tercakup dalam Taraf dan Pola Konsumsi ini adalah

1. Taraf Konsumsi Energi dan Protein per-kapita
2. Pengeluaran per kapita per bulan
3. Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan per kapita

Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi di antara kelompok penduduk. Indikator distribusi pendapatan, walaupun didekati dengan pengeluaran, akan memberi petunjuk tercapai atau tidaknya aspek pemerataan. Dari data pengeluaran dapat juga diungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan proporsi pengeluaran untuk makanan dan non-makanan.

Determinan pengeluaran rumah tangga ini merupakan indikator penting yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan berser dari pengeluaran untuk

makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai alat yang baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Semakin besar tingkat pengeluaran konsumsi bukan makanan maka tingkat kesejahteraan akan bertambah besar dan akan menunjukkan kemiskinan penduduk akan berkurang.

7. Perumahan

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk yang cukup penting disamping kebutuhan akan pangan dan sandang. Keadaan tempat tinggal penduduk dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan khususnya di bidang perumahan, sedangkan lingkungan merupakan kawasan di sekitar perumahan yang ikut mempengaruhi pertumbuhan manusia (BPS Pusat, 2008).

Informasi yang menggambarkan tentang perumahan dan lingkungan yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik meliputi :

- a. Persentase rumah tangga menurut jenis dinding, luas lantai, jenis atap dan jenis lantai terluas
- b. Persentase rumah tangga menurut sumber penerangan
- c. Persentase rumah tangga menurut sumber air minum dan fasilitas air minum
- d. Persentase rumah tangga menurut fasilitas tempat buang air besar dan jenis kloset

Perumahan dan Lingkungan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan pokok selain pangan dan sandang. Disisi lain tempat tinggal atau perumahan menunjukkan status sosial atau mencerminkan derajat seseorang. Semakin

tinggi status sosial maupun kemampuan finansial seseorang, maka semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Sebaliknya, bagi penduduk yang kemampuan finansialnya rendah, pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal lebih terbatas. Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga (BPS, 2008).

Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut diantaranya dapat dilihat dari kualitas material, yang mencakup antara lain jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan. Termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Variabel-variabel yang merupakan bagian dari perumahan dan lingkungan adalah :

- a. Lantai bukan tanah
- b. Atap layak
- c. Dinding Permanen
- d. Luas Lantai per kapita
- e. Air minum ledeng dan kemasan
- f. Air minum bersih
- g. Jamban sendiri
- h. Penerangan listrik

Rumah dikatakan layak sebagai bangunan tempat tinggal adalah apabila rumah tersebut telah memiliki dinding, atap dan lantai. Di samping itu kualitas ketiga unsur tersebut juga dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi penghuninya.

Menurut Todaro (2006:247), UNDP yakin bahwa kemiskinan manusia harus diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama (*three key deprivations*) yaitu kehidupan, pendidikan dasar dan ketetapan ekonomi, dimana salah satu faktor dari ketetapan ekonomi adalah penyediaan air bersih.

Untuk mengukur kesejahteraan rakyat, dapat dilihat dari akses penduduk untuk menyediakan air bersih di dalam rumahnya yaitu penyediaan air minum ledeng dan kemasan dan juga air minum bersih dimana semakin besar kemampuan penduduk untuk menyediakan air bersih di rumahnya maka menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk semakin lebih baik dan keadaan ini dapat menunjukkan kemiskinan akan berkurang. Semakin besar penyediaan air minum bersih di rumah maka tingkat kemiskinan akan berkurang.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran dari kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pemenuhan kebutuhan masyarakat dan operasionalisasi struktur yang mendukungnya (Fuady, 2002).

Otonomi daerah telah memberikan harapan dan peluang baru untuk penanggulangan kemiskinan. Dengan penerimaan APBD yang lebih besar diharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan pengeluaran pemerintah daerah dalam APBD dengan lebih efektif guna pengentasan kemiskinan. Pengeluaran rutin sebagai salah satu unsur penggerak kegiatan ekonomi regional melalui proses multiplier diharapkan mampu memberikan stimulus terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, pengembangan dunia usaha, perluasan kesempatan kerja, serta pemerataan kegiatan dan hasil-hasil pembangunan. Sedangkan, belanja pembangunan merupakan investasi pemerintah daerah yang ikut serta dalam menggerakkan roda pembangunan, secara langsung juga ikut mempengaruhi laju pertumbuhan produk domestik regional bruto dalam perekonomian (Yani, 2002).

Dengan adanya Otonomi Daerah, maka pemerintah daerah mendapatkan wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus dirinya melalui desentralisasi fiskal. Dalam desentralisasi fiskal, ketersediaan dana dan kewenangan, pelaksanaan program bergeser dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah

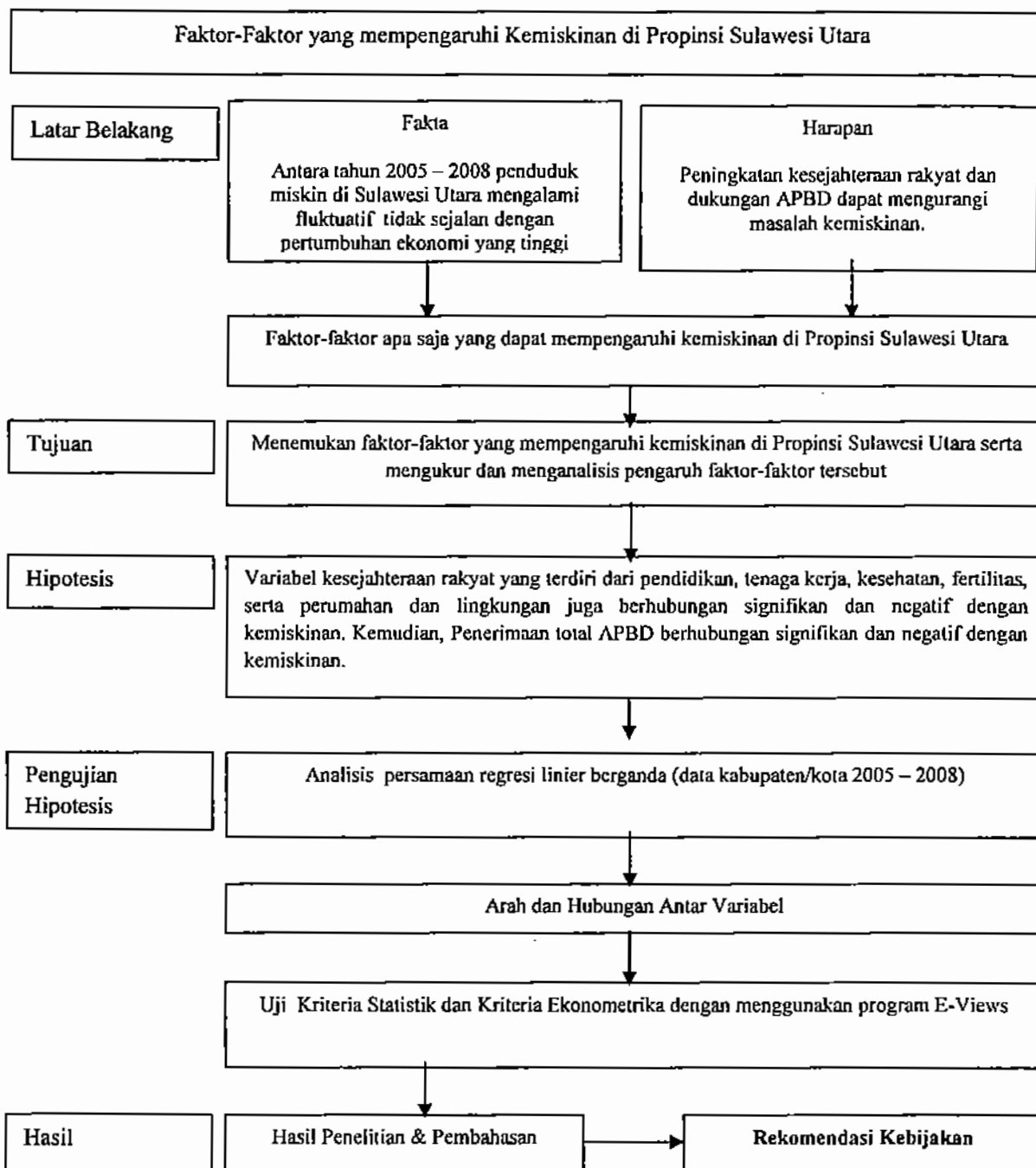
maka peranan pemerintah daerah serta inovasi institusi lokal menjadi penting. Dana dan pelaksanaan program ini tercatat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga strategi penanggulangan kemiskinan daerah akan tercermin di dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD. (Lubis, 2004).

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan fungsi distribusinya, pemerintah dapat membuat kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan atau mengurangi kesenjangan antar wilayah, kelas sosial maupun sektoral. Jika terjadi perbedaan tingkat pendapatan yang tajam antar wilayah dan antar sektor tertentu maka pemerintah bisa membuat kebijakan yang memastikan lapisan masyarakat yang kaya memberikan kontribusi yang lebih besar untuk kemudian didistribusikan ke lapisan masyarakat yang lebih miskin melalui program-program yang direncanakan dalam anggaran atau dengan kata lain dinamakan Pro-Poor Budget. (Hardoyo, 2008).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang didalamnya terdapat sisi penerimaan dan sisi pengeluaran pasca otonomi, cenderung meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa tiap tahunnya daerah kabupaten/kota memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Seiring dengan bertambahnya jumlah penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut maka bertambah jugalah pengeluaran APBD pada tiap tahunnya. Oleh karena itu dalam proses alokasi dana dalam hal pengeluaran pembangunan publik dalam pos APBD baik dari segi besarnya maupun strukturnya diharapkan dapat mengurangi kemiskinan. Artinya Semakin besar pengeluaran pembangunan di APBD maka diharapkan tingkat kemiskinan akan berkurang.

2.2.10 Kerangka Berpikir Pemecahan Masalah

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penyusunan kerangka pemikiran penelitian yang berdasarkan pada alur sebagai berikut :



2.3 Penelitian-Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai kemiskinan pernah dilakukan oleh Jaka Sumanta (2005) dengan judul penelitiannya "Fenomena lingkaran kemiskinan Indonesia: Analisis Ekonometrika Regional Data Panel Propinsi Tahun 1999-2002", dimana salah satu bahasanya menitikberatkan kepada penyusunan model ekonometrika yang mampu menjelaskan fenomena lingkaran kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitiannya membuktikan adanya pola hubungan tidak langsung. Dasar teori yang digunakan adalah Nurkse, yang menyatakan tingkat kemiskinan yang tinggi suatu daerah terjadi karena rendahnya pendapatan per kapita daerah itu. Namun berbeda dengan Nurkse yang cenderung pesimis terhadap masa depan daerah terbelakang, Penelitian Sumanta lebih optimis dalam arti bahwa ada peluang bagi daerah terbelakang untuk keluar dari jebakan kemiskinan bila berhasil melakukan kebijakan sebagai berikut :

- 3 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- 4 Mengembangkan sektor industri dan jasa sehingga perannya meningkat dalam perekonomian daerah, dalam arti tetap menjaga pertumbuhan output sector pertanian dan pertambangan secara nominal namun peranannya dalam rasio terhadap APBD menjadi berkurang.
- 5 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah terutama transportasi dan energi.
- 6 Meningkatkan upah riil masyarakat.
- 7 Meningkatkan kualitas tata pemerintahan daerah, terutama dengan mengurangi pungutan-pungutan yang tidak pro investasi, serta alokasi anggaran dalam APBD yang lebih pro terhadap masyarakat miskin.

Hasil Penelitian Sumanta juga menghasilkan bahwa persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan dipengaruhi oleh pendapatan per kapita, angka melek huruf, rasio PDRB sektor primer terhadap total PDRB atas harga konstan, persentase rumah tangga pengguna listrik, dan rasio penerimaan retribusi terhadap pajak dalam APBD. Penelitiannya menggunakan data panel propinsi untuk periode waktu 1999 sampai dengan 2002.

Hasibuan (2006) dalam melakukan kajian variabel-variabel utama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah, dimana dalam penelitiannya menggunakan model ekonometrika yang menitikberatkan pada masalah kemiskinan, anggaran pendapatan belanja daerah serta variabel-variabel kesejahteraan rakyat di Propinsi Sumatera Utara. Hasil penelitiannya membahas kaitan antara Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara terhadap angka kemiskinan. Diperoleh kesimpulan bahwa Anggaran Pendapatan Daerah memiliki hubungan negatif dengan angka kemiskinan. Artinya, jika anggaran pendapatan daerah naik, maka angka kemiskinan akan turun. Sebaliknya, jika anggaran pendapatan daerah turun, maka angka kemiskinan akan naik. Dalam penelitian tersebut digunakan data APBD, data Statistik Kesejahteraan Rakyat publikasi BPS dan kemiskinan tahun 2002-2003.

Data variabel kesejahteraan yang diuji merupakan variabel-variabel yang terdapat pada Statistik Kesejahteraan Rakyat publikasi BPS Propinsi Sumatera utara yang terdiri dari pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, fertilitas serta perumahan dan lingkungan. Indikator kemiskinan yang diukur dalam penelitiannya adalah persentase penduduk miskin (P0) yakni jumlah penduduk yang berada dibawah suatu batas yang disebut batas garis kemiskinan yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Kemudian indeks kedalaman kemiskinan (P1) yakni ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin versi Badan Pusat Statistik. Untuk variabel anggaran pendapatan belanja daerah, digunakan data penerimaan total APBD sebagai proksi besarnya anggaran yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan.

Andika (2004) juga pernah menyusun tesis tentang pengaruh APBD terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Penelitian tersebut mengambil lokasi di DKI Jakarta dan obyek penelitiannya adalah masyarakat miskin kota. Andika mengamati dampak meningkatnya alokasi anggaran belanja DKI Jakarta terhadap kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan oleh tingkat pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaa dan perumahan. Dalam penelitiannya, Andika menggunakan data disaggregasi anggaran belanja, yaitu alokasi anggaran belanja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitiannya

menyimpulkan adanya pengaruh positif APBD terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin kota.

2.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, maka dibuatlah suatu jawaban sementara dalam bentuk hipotesis untuk penelitian ini. Hipotesis di penelitian ini adalah

- **Kesejahteraan rakyat** yaitu variabel **Pendidikan, Fertilitas, Taraf dan Pola Konsumsi** serta **Perumahan** berhubungan **signifikan** dan **negatif** terhadap **tingkat kemiskinan** di Propinsi Sulawesi Utara.
- **Kesejahteraan rakyat** lainnya yaitu **Tenaga Kerja** (*angkatan kerja yang belum bekerja/tingkat pengangguran*) dan **Tingkat Kesehatan** (*tingkat kesakitan penduduk/tingkat keluhan sakit penduduk*) berhubungan **signifikan** dan **positif** terhadap **tingkat kemiskinan** di Propinsi Sulawesi Utara.
- **Anggaran Pendapatan Belanja Daerah** berhubungan **signifikan** dan **negatif** terhadap **tingkat kemiskinan** di Propinsi Sulawesi Utara.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Propinsi Sulawesi Utara ini digunakan pendekatan ekonometrika dan untuk menganalisa lebih mendalam digunakan metode wawancara mendalam dan observasi. Sebagai langkah awal untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, dibuat bentuk umum model yang diperoleh dari literature-literatur dan penelitian sebelumnya, antara lain Nadhif Alawi (2006) dan Hasibuan (2006).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari tahun 2005 sampai 2008, dan Sumber data berasal dari ketersediaan data tentang kemiskinan di kabupaten/kota dan data lainnya di Badan Pusat Statistik Pusat di Jakarta dan BPS Sulawesi Utara. Alasan penulis menggunakan data tahun 2005 sampai 2008 adalah sehubungan dengan ketersediaan data yang terbaru yang didapatkan dan juga sebagai tahun awal (2005) pemerintahan daerah yang baru terpilih secara langsung dari rakyat (Pemerintahan Sarundajang-Sualang).

Adapun jumlah total data pengamatan yang akan diregresi adalah berjumlah 4 tahun x 9 kabupaten/kota atau sama dengan 36 data.

3.3 Spesifikasi Model Persamaan

Spesifikasi Model yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model seperti yang tertera dibawah ini :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \beta_n X_n + \varepsilon$$

Y = Persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan

X₁ = Variabel APBD

X₂...X_n = Variabel-variabel kesejahteraan rakyat yang terdiri dari kependudukan, pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, fertilitas, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan serta APBD.

Berdasarkan spesifikasi model diatas maka bentuk umum model kemiskinan tersebut tampak seperti dibawah ini :

$$\text{Kemiskinan} = f(\text{APBD, variabel-variabel kesejahteraan rakyat})$$

Sehubungan adanya banyaknya pemekaran wilayah kabupaten dan kota di Propinsi Sulawesi Utara setelah tahun 2006, maka penelitian ini hanya mengacu pada kabupaten dan kota yang sudah terbentuk di tahun 2005 dan untuk daerah pemekaran setelah tahun 2006 dilakukan penyederhanaan dengan menggabungkan data-data daerah pemekaran dengan daerah induknya.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Setelah melakukan pencarian variabel-variabel yang terbaik maka variabel-variabel yang akan dipergunakan di dalam model terlihat dibawah ini :

a. Persentase Penduduk Miskin

Persentase jumlah penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

b. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

c. Indeks Keparahan Kemiskinan

Ukuran rata-rata penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

d. Persentase penduduk berusia 10 tahun keatas tamat SMA/Umum (Pendidikan)

Merupakan pengukuran dalam melihat sumber daya manusia di suatu daerah yang menjadi obyek penelitian agar dapat terlihat berapa besar pencapaian jenjang pendidikan menengah umum yang telah ditamatkan penduduk.

e. Persentase Penduduk yang berumur 10 tahun keatas yang belum bekerja (Tenaga Kerja)

Variabel yang mengukur jumlah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas / angkatan kerja yang belum bekerja .

f. Persentase Persentase Penduduk dan Keluhan Kesehatan (Kesehatan)

Variabel yang mengukur berapa besar penduduk yang mengalami sakit / mengeluh akan kesehatannya, yang pada akhirnya akan mengganggu pendapatan masyarakat karena meningkatnya biaya untuk biaya perawatan ataupun biaya pengobatannya.

g. Persentase Wanita berumur 15 – 49 tahun Berstatus Kawin yang Masih Ikut Keluarga berencana (Fertilitas)

Variabel yang mengukur keberlangsungan program keluarga berencana yang diharapkan jumlah kelahiran akan turun serta adanya indikasi kesadaran kesehatan yang semakin meningkat, yang akhirnya akan mengurangi persentase penduduk miskin.

h. Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih (Perumahan dan Lingkungan)

Variabel yang mengukur kualitas rumah yang memiliki jenis lantai tanah yang digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Rumahtangga yang mampu menyediakan aliran air bersih di rumahnya baik berupa air ledeng dan air minum kemasan cenderung mempunyai pendapatan yang lebih baik atau tingkat kesejahteraanya lebih baik.

i. Persentase Pengeluaran Bukan Makanan selama Sebulan (Tarf dan Pola Konsumsi)

Variabel yang mengukur pola pengeluaran konsumsi rumah tangga bukan makanan selama sebulan yang dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai perubahan tingkat kesejahteraan.

j. Pengeluaran Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Adalah pengeluaran yang dikategorikan sebagai pengeluaran untuk investasi pemerintah diantaranya investasi pemerintah di sektor publik yang akan

menggerakkan roda pembangunan dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan tujuan penelitian dan karakteristik variabel yang mempengaruhi kemiskinan yang digunakan, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis kuantitatif regresi data panel. Teknik regresi ini digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel kesejahteraan rakyat terhadap tingkat kemiskinan selama selang waktu 4 tahun dengan 9 daerah kabupaten/kota di Sulawesi Utara.

Adapun penjelasan rinci variabel-variabel yang digunakan di dalam penghitungan di dalam model diringkas di dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Variabel Endogen, simbol, satuan, jenis data model kemiskinan Propinsi Sulawesi Utara

Variabel Endogen	Lambang	Satuan	Data
Persentase Penduduk Miskin	Pov ₀	%	Sekunder
Indeks kedalaman kemiskinan	Pov ₁	%	Sekunder
Indeks keparahan kemiskinan	Pov ₂	%	Sekunder
Persentase wanita berumur 15 -49 tahun berstatus kawin yang masih menggunakan alat KB	KB	%	Sekunder
Persentase penduduk berusia 10 tahun keatas tamat SMA/Umum	SMA	%	Sekunder
Persentase penduduk dan keluhan kesehatan	KLHSKT	%	Sekunder
Persentase Pengeluaran Bukan Makanan selama Sebulan	BKNMKN	%	Sekunder
persentase rumah tangga menggunakan air bersih	AIR	%	Sekunder
Pengeluaran Pembangunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	APBD	Milyar	Sekunder
persentase angkatan kerja yang belum bekerja	PGGRN	%	Sekunder

3.6 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Proses regresi pada penelitian ini akan diolah dengan perangkat lunak E-Views versi 6.1. Model-model yang ada pada penelitian ini juga dilengkapi

dengan keterangan bahwa model ini dispesifikasi dengan benar melalui indikator ekonomi, statistika dan ekonometrika. Model ini memiliki elastisitas model yang konstan dan slope yang tidak konstan. Dengan model ini interpretasi β_1 adalah bahwa jika X_1 naik/turun satu persen sementara X lain dianggap konstan maka Y akan berubah sebesar β_1 persen .

3.6.1 Pemilihan Spesifikasi Model Terbaik

Di dalam hal membuat model dibutuhkan beberapa kriteria untuk mendapatkan model yang dianggap baik, kriteria tersebut antara lain :

1. Kriteria Ekonomi

Mengingat tulisan ini berakar dari ilmu ekonomi maka hasil regresi harus sesuai dengan teori ekonomi. Hal ini dapat dideteksi dengan melihat arah dan pengaruh masing-masing koefisien variabel bebas.

2. Kriteria Statistika

Menguji model persamaan regresi untuk mendapatkan model yang baik dan meminimalisir bias yang terjadi. Lazimnya uji tersebut terdiri dari uji-t dan uji-f, berikut penjelasan masing-masing uji :

a. Uji – t

Uji yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang koefisien slope regresi secara individual. Untuk menentukan apakah menolak atau menerima sebuah hipotesis nol didasarkan pada nilai t-tabel dan nilai t-statistika. Nilai t-tabel adalah nilai yang membedakan daerah penerimaan dari daerah penolakan. Nilai kritis t dipilih dari tabel distribusi normal standard t dengan memperhatikan jumlah data (n), jumlah parameter (k) dan tingkat keyakinan (α) dengan rumus $n-k-1$, sedangkan nilai t-statistik adalah nilai yang didapat dari proses regresi. Setelah diperoleh nilai t-tabel, dapat ditentukan penolakan terhadap hipotesis, yaitu jika t-statistik lebih besar dari t-tabel.

b. Uji – F

Kelemahan dari uji-t yaitu tidak dapat digunakan untuk menguji hipotesis lebih dari satu koefisien sekaligus. Untuk mengatasi kelemahan tersebut

maka diperlukan uji-F. Uji-F adalah suatu cara untuk menguji hipotesis nol yang melibatkan lebih dari satu koefisien. Uji-F sering digunakan untuk menguji keberartian secara menyeluruh pada sebuah persamaan regresi. Penentuan apakah menolak atau menerima sebuah hipotesis nol didasarkan pada nilai F-tabel dan nilai F-statistik. Nilai F-tabel adalah nilai yang membedakan daerah penerimaan dari daerah penolakan. Nilai kritis F dipilih dari tabel distribusi F dengan memperhatikan jumlah data (n), jumlah parameter (k) dan tingkat keyakinan (α) dengan rumus $n-k-1$, sedangkan nilai F-statistik adalah nilai yang didapat dari proses regresi. Setelah diperoleh nilai F-tabel, dapat ditentukan penolakan terhadap hipotesa, yaitu jika F-statistik lebih besar dari F-tabel.

3. Kriteria Ekonometrika

Serangkaian asumsi-asumsi dasar yang dibutuhkan untuk menjaga agar Ordinary Least Square dapat menghasilkan estimator-estimator yang terbaik pada model regresi. Asumsi dasar dari The Classical Linear Regression Model dan Multiple Linear Regression Model adalah variabel bebas tidak berkorelasi dengan error (e), tidak ada kolinearitas yang parah antar variabel penjelas, tidak ada korelasi antar dua error (autocorrelation) atau e_i dan e_j ($\text{cov}(e_i, e_j) = 0$ untuk $i \neq j$), error mempunyai distribusi normal dengan rerata sama dengan nol, $E(e_i) = 0$ dan varian setiap error konstan atau homoskedastisitas. Toreram Gauss-Markov menyatakan bahwa dengan asumsi diatas maka estimator OLS merupakan estimator yang bersifat BLUE (The Best Linear Unbiased Estimator). Dari serangkaian asumsi-asumsi dasar tersebut terdapat 3 uji pelanggaran asumsi yang terdiri atas :

a.) Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu pelanggaran terhadap asumsi bahwa tidak ada hubungan sempurna antara variabel independen dalam suatu persamaan regresi. Multikolinieritas ada pada setiap persamaan regresi, adalah tidak mungkin., contoh riil di dalam dunia nyata menemukan serangkaian variabel-variabel penjelas yang sama sekali tidak berkorelasi

satu sama lainnya. Berhubungan dengan masalah multikolinieritas, bahwa yang terpenting adalah bukan menguji ada atau tidak multikolinieritas, tetapi menguji seberapa parah masalah multikolinieritas tersebut. Akibat dari multikolinieritas adalah hasil-hasil estimasi tidak dapat ditentukan (Sarwoko, 2005).

Indikasi adanya multikolinieritas adalah bila tingginya nilai R^2 -adj, pengujian model secara overall (uji-F) signifikan, namun ada beberapa pengujian koefisien regresi secara parsial (uji-t) yang tidak signifikan dan juga dilihat dari ketidaksesuaian variabel dari hipotesis tandanya.

Cara lain untuk mendeteksi adanya multikolinieritas bisa juga dengan menguji koefisien korelasi antar variabel independen, sebagai aturan main (rule of thumb), jika koefisien korelasi antar variabel bebasnya diatas 0,85 maka kita dapat duga adanya multikolinieritas dalam model, sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah maka kita duga model tidak mengandung unsur multikolinieritas (Widarjono, 2007:114).

b.) Heteroskedastisitas

Asumsi yang menyatakan bahwa populasi dari variabel terikat yang berhubungan dengan berbagai variabel bebas mempunyai varians yang sama. Akibat dari pelanggaran ini menyebabkan varians estimasi koefisien regresi tidak minimal lagi.

Untuk mendeteksinya digunakan metode uji White yaitu didasarkan pada jumlah sampel (n) dikalikan R^2 yang akan mengikuti distribusi chi-squares dengan degree of freedom sebanyak variabel independen tidak termasuk konstanta dalam regresi auxiliary. Jika nilai chi-square hitung ($n \cdot R^2$) lebih besar dari nilai X^2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu (α) maka ada heteroskedastisitas dan sebaliknya jika chi-square hitung lebih kecil dari nilai X^2 kritis menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas (Widarjono, 2007:127-129 dan 140).

Selain itu kita dapat mengkonstantakan residual pada koefisien regresinya dengan bantuan program bantu software eviews 6 dan apabila ada

perbedaan hasil sebelum dan sesudahnya maka hal ini menunjukkan adanya heteroskedastisitas di dalam model (Nachrowi, 2006:336).

c.) Autokorelasi

Asumsi yang menyatakan bahwa terjadi korelasi antara data-data pengamatan atau munculnya suatu data yang dipengaruhi oleh data sebelumnya. Akibat dari masalah ini standard error koefisien regresi menjadi terlalu rendah.

Untuk mendeteksinya dapat digunakan metode Durbin Watson (DW), dimana nilai DW ini akan terlihat dari hasil output dan menurut rule of thumb nilainya harus lebih besar dari 1,9. Namun menurut Nachrowi bahwa sesungguhnya metode efek tetap tidak mensyaratkan persamaan bebas dari autokorelasi, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa data panel dengan metode fixed effect bebas autokorelasi (Nachrowi, 2006:334).

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Propinsi Sulawesi Utara

4.1.1 Lokasi dan Luas Propinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan pada tabel 4.1. luas Wilayah Sulawesi Utara adalah 15.273.10 km², yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini dibagi ke dalam 9 daerah Kabupaten/Kota definitif (daerah pemekaran akan digabung dengan daerah induk asal). Kabupaten Bolang Mongondow dengan luas 8.358,04 km² merupakan kabupaten terluas di Provinsi ini (merupakan gabungan dari 3 kabupaten pemekaran dan 1 kota pemekaran) , kemudian di ikuti berturut-turut oleh Kabupaten Minahasa Selatan seluas 1.368,41 km², Kabupaten Talaud 1.250,92 km², Kabupaten Sangihe 1.013,03 km² (gabungan antara daerah pemekaran Kep. Sangihe dan Kep.Sitaro), Kabupaten Minahasa 1.736,54 km², Kabupaten Minahasa Utara 937,65 km², Kota Bitung 304,40 km², Kota Manado 157,91 km², dan Kota Tomohon 146,60 km² yang merupakan daerah terkecil luasnya di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota dan Persentase Luas Wilayah Terhadap Luas Propinsi Sulawesi Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (KM ²)	Persentase Luas Wilayah Terhadap Luas Propinsi
1	Bolaang Mongondow	3.547,49	23,22
	Bolaang Mongondow Utara	1.696,09	11,10
	Bolaang Mongondow Sltm	1.783,54	11,68
	Bolaang Mongondow Tmr	899,42	5,89
	Kotamobagu	431,50	2,83
2	Minahasa	1.025,85	6,72
	Minahasa Tenggara	710,69	4,66
3	Kep. Sangihe	625,96	4,10
	Kep. Sitaro	387,07	2,52
4	Kep. Talaud	1.250,92	8,19
5	Minahasa Selatan	1.368,41	8,96
6	Minahasa Utara	937,65	6,14
7	Manado	157,91	1,04
8	Bitung	304,40	1,99
9	Tomohon	146,60	0,96
10	Sulawesi Utara	15.273,10	100,00

Sumber : BPS Sulawesi Utara, Sulut Dalam Angka (2009)

Propinsi Sulawesi Utara terletak antara $0^{\circ}15'$ - $5^{\circ}34'$ lintang utara dan antara $123^{\circ}07'$ - $127^{\circ}10'$ Bujur Timur, yang berbatasan dengan laut Sulawesi, Republik Philipina dan laut Pasifik sebelah utara serta laut Maluku di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-masing adalah Teluk Tomini dan Gorontalo.

Secara Administrasi batas-batas wilayah Propinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Sulawesi, Republik Filipina dan Laut Pasifik
- Sebelah Timur : Laut Maluku
- Sebelah Selatan : Teluk Tomini
- Sebelah Barat : Propinsi Gorontalo



Gambar 4.1 Peta Propinsi Sulawesi Utara

4.1.2 Perekonomian Propinsi Sulawesi Utara

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktifitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Berdasarkan pada tabel 4.2, pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Utara pada tahun 2005 adalah sebesar 4,90 % dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 7,56%.

Struktur perekonomian pada tahun 2005 didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 21,63% diikuti sektor Jasa-Jasa sebesar 16,41% dan sektor Bangunan sebesar 15,70%. Pada tahun 2008, struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 20,40% diikuti oleh sektor Bangunan sebesar 16,39% dan sektor Perdagangan, Hotel, Restoran sebesar 15,42%. Adanya perubahan struktur ekonomi di Sulawesi Utara pada tahun 2008 yaitu meningkatnya kontribusi sektor Bangunan dan Perdagangan, Hotel, Restoran menunjukkan perekonomian Sulawesi Utara ditopang oleh persiapan pembangunan besar-besaran fasilitas untuk persiapan dua event internasional di tahun 2009 yaitu World Ocean Conference dan Sail Bunaken.

Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sulawesi Utara menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan 2000 (%)

No.	Lapangan Usaha	2005	2008
1	Pertanian	4,9	2,66
2	Perdagangan & Penggajian	(3,74)	9,39
3	Industri Pengolahan	4,64	6,20
4	Listrik, Gas, Air	12,05	7,53
5	Bangunan	5,55	10,73
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	6,89	10,88
7	Pengangkutan dan Telekomunikasi	8,13	11,02
8	Kerajinan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,64	7,34
9	Jasa-Jasa	2,79	5,42

Sumber : BPS Sulawesi Utara (2009)

Sedangkan bila dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Utara menurut lapangan usaha terlihat sektor pertanian hanya mengalami laju pertumbuhan sebesar 4,9% di tahun 2005 dan menurun sebesar 2,66% di tahun

2008. Kecilnya angka pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian belum bisa menopang perekonomian Propinsi Sulawesi Utara walaupun lebih dari 35% angkatan kerja bekerja di sektor pertanian. Sedangkan untuk sektor Bangunan dan Sektor Perdagangan Hotel Restoran mengalami peningkatan yang sangat tinggi yang masing-masing bertumbuh menjadi 10,73% dan 10,88% di tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa geliat persiapan untuk menghadapi WOC dan Sail Bunaken dengan adanya pembangunan hotel-hotel dan fasilitas pariwisata secara besar-besaran dan juga adanya pembangunan sejumlah pusat perbelanjaan di kawasan ekonomi di Kota Manado yang begitu dominan di dalam perekonomian. Untuk sektor pertambangan yang mengalami lonjakan pertumbuhan yang sangat tinggi dari minus 3,74 di tahun 2005 meningkat menjadi 9,39 di tahun 2008, yang mana hal ini menandakan telah mulai beroperasinya 2 perusahaan pertambangan emas skala besar di Sulawesi Utara yaitu PT. Avocet di Bolaang Mongondow dan PT. Maesa Sopotan Mineral di Minahasa Utara.

4.1.3 Kependudukan Propinsi Sulawesi Utara

Total penduduk Sulawesi Utara pada tahun 2005 adalah sebesar 2.121.017 jiwa. Dari tabel 4.3 terlihat bahwa Untuk jumlah penduduk yang terbesar ada pada di kabupaten Bolaang Mongondow sebesar 500.492 jiwa atau 22,67% di tahun 2008, sekaligus juga merupakan daerah kabupaten yang memiliki wilayah yang paling luas yaitu 54,72% .

Tabel 4.3 Persentase Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Utara

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2005	Persentase Penduduk Tahun 2005	Jumlah Penduduk Tahun 2008	Persentase Penduduk Tahun 2008
1	Bolaang Mongondow	474.908	22,39	500.492	22,67
2	Minahasa	288.539	13,60	393.324	17,81
3	Kep. Sangihe	191.102	9,01	191.342	8,69
4	Kep. Talaud	74.512	3,51	74.892	3,39
5	Minahasa Selatan	275.997	13,01	182.292	8,26
6	Minahasa Utara	165.758	7,82	174.455	7,90
7	Manado	405.745	19,13	429.149	19,47
8	Birung	163.837	7,72	176.266	8,07
9	Tomohon	80.649	3,80	83.200	3,77
10	Sulawesi Utara	2.121.017	100	2.208.012	100

Sumber : BPS Sulawesi Utara, Sulut Dalam Angka (2009)

Banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow juga disebabkan karena kabupaten ini pada periode waktu sebelumnya dijadikan daerah tujuan transmigrasi dari luar Sulawesi Utara. Sedangkan untuk kota Manado sebagai ibukota Propinsi memiliki jumlah penduduk terbesar kedua sebesar 405.715 jiwa. Jumlah penduduk kabupaten/kota yang paling sedikit baik pada tahun 2005 dan tahun 2008 terdapat pada Kabupaten Kepulauan Talaud yang memiliki jumlah penduduk yang sedikit dan laju pertumbuhan penduduk yang rendah yaitu hanya sebesar 74.512 jiwa di tahun 2005 meningkat sedikit menjadi 74.892 jiwa di tahun 2008. Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah perbatasan dan daerah terluar di utara wilayah Republik Indonesia dan juga daerah yang jauh dari pusat Ibukota dengan wilayah geografis berupa pulau-pulau kecil. Dengan jumlah penduduk yang sedikit dan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka daerah ini menjadi daerah yang sangat strategis dalam pertahanan dan keamanan wilayah negara Indonesia.

4.1.4 Gambaran Kemiskinan di Propinsi Sulawesi Utara

Dari total penduduk Sulawesi Utara sebesar 2.208.012 jiwa, 10,10% diantaranya terkategori penduduk miskin di tahun 2008. Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki persentase penduduk miskin paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Propinsi Sulawesi Utara.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Utara (%)

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2005	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2006	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2007	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2008
1	Bolaang Mongondow	11,39	13,42	12,08	13,42
2	Minahasa	8,09	10,13	16,26	10,13
3	Kep. Sangihe	15,97	17,62	16,92	17,64
4	Kep. Talaud	12,94	15,55	17,70	15,55
5	Minahasa Selatan	10,74	13,45	13,61	13,45
6	Minahasa Utara	7,61	10,29	10,14	10,29
7	Manado	5,09	6,73	5,46	6,73
8	Bilimo	1,92	1,23	1,12	1,23
9	Tomohon	6,43	8,76	8,65	8,76
10	Sulawesi Utara	9,34	11,54	11,42	10,10

Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

Dengan persentase penduduk miskin di tahun 2005 yang masing-masing sebesar 15,07% dan 12,94% , penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud mengalami peningkatan menjadi masing-masing sebesar 17,64% dan 15,55% di tahun 2008, dan selama 4 tahun berturut-turut penduduk miskin di kedua kabupaten ini tidak mengalami perbaikan, bahkan pada tahun 2007 persentase penduduk miskinnya melonjak naik tinggi masing-masing mencapai 16,92% dan 17,70%. Kemiskinan yang terjadi di kedua kabupaten daerah ini juga disebabkan oleh letaknya yang sangat jauh dari pusat ibukota dan wilayahnya sebagian besar merupakan kepulauan. Faktor transportasi ke Ibukota Manado, ibukota propinsi dan beberapa kota penting lainnya sering terkendala masalah cuaca sehingga kedua daerah ini lebih terisolir dibandingkan wilayah lainnya yang terletak di wilayah daratan Propinsi Sulawesi Utara.

Yang menarik untuk diamati disini adalah bahwa ada 4 kabupaten yang mempunyai persentase penduduk miskin tertinggi dibandingkan daerah lainnya yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan yang pada tahun 2005 persentasenya diatas 10% dan pada tahun 2008 juga ke-4 daerah kabupaten ini memiliki persentase tertinggi. Hal ini terjadi karena masalah jarak ke pusat ibukota Manado, dimana ke-4 daerah tersebut memang memiliki jarak yang jauh dibandingkan lima kabupaten lainnya.

Dari tabel 4.4 diatas dapat diketahui persentase penduduk miskin terkecil terdapat pada Kota Manado dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Kecilnya persentase ini karena Kota Manado merupakan pusat perekonomian di propinsi Sulawesi Utara sehingga lapangan usaha banyak tersedia. Selain itu juga Kota Manado merupakan pusat pembangunan untuk persiapan pelaksanaan event internasional WOC dan Sail Bunaken di tahun 2009, dengan mulai maraknya saat itu pembangunan sarana-prasarana di kota Manado sehingga banyak tersedianya lapangan kerja sehingga hal ini bisa merupakan salah satu faktor yang rendahnya tingkat kemiskinan.

Indikator kemiskinan lainnya selain persentase penduduk miskin adalah indeks kedalaman kemiskinan atau ukuran rata-rata besarnya kekurangan pendapatan masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan

indeks keparahan kemiskinan atau ukuran rata-rata ketimpangan distribusi pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Berikut adalah tabel indeks kedalaman kemiskinan kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Utara antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008.

Tabel 4.5 Indeks Kedalaman Kemiskinan per Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Utara

No.	Kabupaten Kota	2005	2006	2007	2008
1	Bolaang Mongondow	1,75	2,12	1,60	2,12
2	Minahasa	1,66	1,70	2,56	1,70
3	Kep. Sangihe	2,72	3,44	2,70	3,44
4	Kep. Talaud	2,51	3,09	2,67	3,09
5	Minahasa Selatan	1,83	2,34	2,13	2,34
6	Minahasa Utara	1,97	1,10	1,79	1,10
7	Manado	0,55	1,11	0,98	1,11
8	Bitung	1,89	2,22	1,98	2,20
9	Tomohon	0,81	1,04	1,18	1,04
10	Sulawesi Utara	2,48	2,87	1,88	1,53

Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud selain memiliki persentase penduduk miskin tertinggi ternyata juga memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Untuk indeks kedalaman kemiskinan yang terendah pada tahun 2005 adalah kota Manado dan indeks yang terendah di tahun 2008 ditempati oleh kota Tomohon yang pada tahun 2005 berada pada posisi kedua terendah dan kota Manado memiliki indeks terendah ketiga di tahun 2008 setelah Kabupaten Minahasa Utara.

Bila kita perhatikan ternyata kota Tomohon dan Kota Manado merupakan dua kota yang memiliki rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin yang terendah dibandingkan kota-kota lainnya, walaupun angka indeks kedua kota ini di tahun 2008 dibandingkan tahun 2005 mengalami peningkatan. Fenomena peningkatan indeks ini dari tahun 2005 ke 2008 juga dialami oleh seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara kecuali Kabupaten Minahasa Utara, artinya ini menunjukkan selain Kabupaten Minahasa Utara, seluruh kabupaten/kota

penduduk miskinnya menjadi jauh lebih miskin dibandingkan periode sebelumnya. Ini juga merupakan suatu tantangan bagi masing-masing pemerintah kabupaten/kota untuk bisa menanggulangnya.

Kemudian pada tabel 4.6 kita dapat melihat keadaan Indeks Keparahan Kemiskinan, dimana Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud masih merupakan dua daerah yang tertinggi angka indeks keparahan kemiskinannya dari tahun 2005 yang masing-masing sebesar 0,66 dan 0,64 meningkat tinggi di tahun 2008 menjadi sebesar 0,96 dan 0,88. Hal ini menunjukkan bahwa di dua daerah ini dari tahun 2005 sampai tahun 2008 merupakan dua daerah tertinggi ketimpangan pendapatannya antar penduduk miskin terhadap garis kemiskinannya, yang artinya distribusi pendapatan penduduknya sangat tidak merata.

Tabel 4.6 Indeks Keparahan Kemiskinan per Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Utara

No.	Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008
1	Bolaang Mongondow	0,42	0,57	0,34	0,57
2	Minahasa	0,53	0,45	0,62	0,45
3	Kep. Sangihe	0,66	0,96	0,72	0,96
4	Kep. Talaud	0,64	0,88	0,70	0,88
5	Minahasa Selatan	0,54	0,69	0,51	0,69
6	Minahasa Utara	0,63	0,20	0,51	0,20
7	Manado	0,10	0,27	0,29	0,27
8	Bajawa	0,62	0,65	0,49	0,65
9	Tomohon	0,12	0,22	0,24	0,22
10	Sulawesi Utara	0,71	0,82	0,47	0,38

Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

Untuk indeks keparahan yang terendah dimiliki oleh kota Manado dan kota Tomohon di tahun 2005 yang masing-masing sebesar 0,10 dan 0,12 tetapi di tahun 2008 terjadi perubahan karena Kabupaten Minahasa Utara menjadi yang terendah dengan angka 0,20 dan diikuti daerah terendah berikutnya kota Tomohon dan kota Manado yang masing-masing sebesar 0,22 dan 0,27.

Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah hampir seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara indeks keparahan kemiskinannya mengalami

peningkatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, kecuali Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara yang mengalami penurunan angka indeksinya. Selain itu, Kabupaten Minahasa Utara merupakan satu-satunya daerah yang angka indeksinya mengalami penurunan yang cukup besar dari 0,63 di tahun 2005 menjadi 0,20 di tahun 2008 dan merupakan angka terendah dibandingkan daerah lainnya. Artinya, hampir seluruh daerah di Sulawesi Utara ketidakmerataan distribusi pendapatannya mengalami peningkatan kecuali kabupaten Minahasa Utara yang dapat dikatakan ketimpangan distribusi pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinannya mengalami perbaikan.

Untuk melihat lebih dalam mengenai ketidakmerataan pendapatan ini, maka perlu dilihat hasil pengukuran indeks gini yang menggambarkan seberapa jauh tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Sulawesi Utara. Nilai Rasio Gini terletak antara 0 dan 1, nilai rasio Gini yang mendekati 0 maka tingkat ketimpangan pendapatan sangat rendah, artinya distribusio pendapatan merata dan apabila nilainya mendekati 1 maka tingkat ketimpangan pendapatan tinggi.

Tabel 4.7 Rasio Gini Propinsi Sulawesi Utara dan Indonesia

Wilayah	2005			Rasio Gini	2007			Rasio Gini
	40% penduduk dengan pendapatan rendah	40% penduduk dengan pendapatan moderat	20% penduduk dengan pendapatan tinggi		40% penduduk dengan pendapatan rendah	40% penduduk dengan pendapatan moderat	20% penduduk dengan pendapatan tinggi	
SULUT	20,03	39,27	40,70		21,19	37,57	41,24	
INDONESIA	-	-	-		-	-	-	

Sumber : BI Manado (2010) dan BPS

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa perkembangan angka rasio gini Sulawesi Utara dalam 3 (tiga) tahun terakhir relatif tetap sedangkan untuk Indonesia mengalami peningkatan. Berdasarkan data terakhir pada tahun 2007 indeks gini tercatat 0,32 relatif tidak berubah dibandingkan indeks gini tahun 2005 lalu yang juga sebesar 0,32. Namun demikian berdasarkan strukturnya, persentase pendapatan yang dinikmati oleh 20% penduduk berpenghasilan tertinggi menjadi semakin meningkat dari 40,70% menjadi 41,24%. Faktor yang

mempengaruhi peningkatan kesenjangan ini adalah dampak kenaikan harga BBM yang menyebabkan kelompok 40% penduduk berpenghasilan rendah terpukul. Fenomena yang menarik adalah terjadinya shifting dari sebagian penduduk di kelompok 40% menengah ke 40% ke bawah dan 20% teratas (BI Manado, 2010). Ini mengindikasikan bahwa secara agregat dari tahun 2005 – 2007 ketimpangan kemiskinan tidak mengalami perubahan alias tetap walaupun pada tahun-tahun tersebut pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara mengalami laju yang cukup tinggi.

4.2 Tingkat Kesejahteraan Rakyat Propinsi Sulawesi Utara

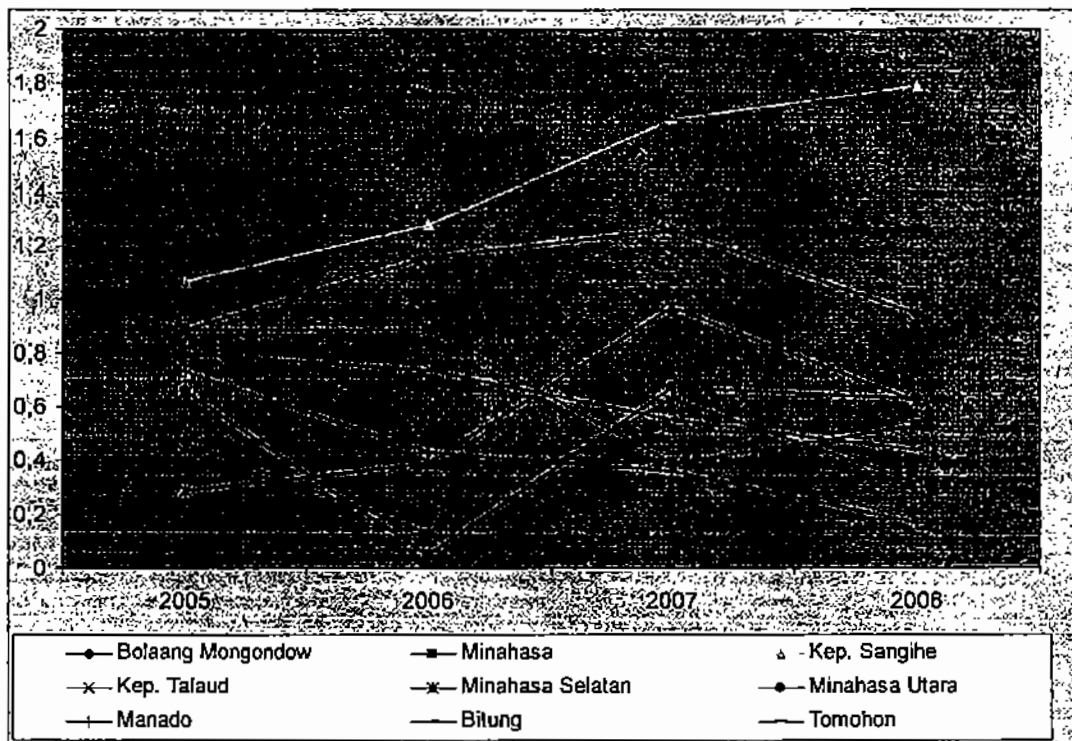
Berikut ini merupakan gambaran dari tingkat kesejahteraan rakyat per kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari pendidikan, angkatan kerja, kesehatan, pengeluaran dan perumahan.

4.2.1 Pendidikan

Pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan standard hidup penduduk suatu wilayah. Pendidikan dapat diharapkan untuk meningkatkan produktifitas kerja penduduk. Angka partisipasi pendidikan dapat digunakan untuk melihat potensi sumber daya manusia dalam suatu daerah tertentu.

Bila dilihat pada Grafik 4.1 tingkat partisipasi penduduk di tahun 2008 pada kabupaten kepulauan Sangihe dan kabupaten kepulauan Talaud mengalami penurunan yang besar dimana kedua daerah ini menjadi dua daerah tertinggi tingkat persentase penduduk yang belum pernah sekolah. Padahal di tahun 2005, kabupaten kepulauan Talaud merupakan daerah kedua terendah tingkat persentase penduduknya yang belum pernah sekolah. Hal ini terjadi 2 faktor yaitu pertama karena dampak dari kenaikan harga BBM yang meningkat setelah tahun 2005 dan kedua karena anjloknya harga komoditas pertanian andalan di daerah ini yaitu Pala dan Kopra pada awal tahun 2008 sehingga menyulitkan ekonomi keluarga untuk menyekolahkan anak-anaknya. Selain kedua daerah tersebut, ada dua daerah lainnya yang mengalami peningkatan dalam persentase penduduk belum pernah sekolah yaitu kabupaten Bolaang Mongondow dan kabupaten Minahasa

Selatan. Untuk daerah yang mengalami penurunan konstan yang terbesar adalah kota Manado pada tahun 2005 sebesar 0,73 turun drastis menjadi 0,17 di tahun 2008, diikuti oleh kota Bitung dari 0,80 di tahun 2005 menjadi 0,44 di tahun 2008. Selain kedua kota tersebut kota Tomohon, kabupaten Minahasa Utara dan kabupaten Minahasa mengalami penurunan di tahun 2005 ke tahun 2008, walaupun penurunan di ketiga daerah ini cenderung fluktuatif tingkatannya. Secara keseluruhan keadaan ini menggambarkan bahwa ada lima daerah yang mengalami kemajuan dalam hal penurunan persentase penduduk yang belum pernah sekolah sedangkan keempat daerah lainnya mengalami peningkatan persentasenya.



Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

Grafik 4.1 Persentase Penduduk yang belum pernah sekolah per Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Utara (%)

Semakin meningkatnya partisipasi penduduk terhadap pendidikan diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan dari penduduk tersebut untuk meningkatkan tingkat kesejahteraanya.

Gambaran secara umum tingkat kecerdasan penduduk juga dapat dilihat dari kemampuan baca tulis. Meningkatnya tingkat partisipasi sekolah akan diikuti

dengan adanya penurunan jumlah persentase penduduk yang buta huruf. Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa ada tujuh daerah yang mengalami penurunan persentase penduduk yang buta huruf sedangkan dua daerah lainnya mengalami peningkatan yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Minahasa Utara. Daerah yang mengalami penurunan persentase terbesar adalah kabupaten Bolaang Mongondow diikuti oleh kabupaten kepulauan Talaud sedangkan kota Bitung dan kabupaten Minahasa merupakan daerah yang penurunannya secara konstan tiap tahunnya tidak berfluktuatif. Yang menarik bahwa kabupaten kepulauan Talaud walaupun memiliki tingkat persentase penduduk yang belum pernah sekolah kedua tertinggi namun daerah ini bisa menurunkan tingkat buta hurufnya, yang dilakukan dengan peningkatan pendidikan informal.

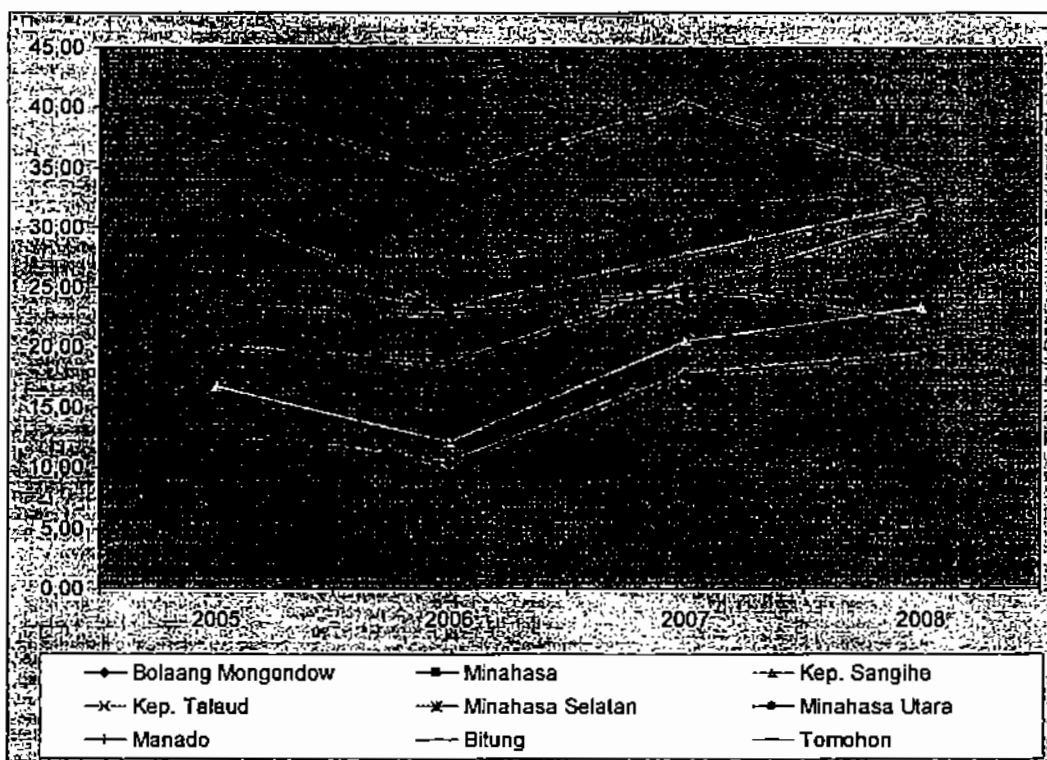
Tabel 4.8 Persentase Penduduk yang Buta Huruf per Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Utara (%)

No	Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008
1	Bolaang Mongondow	2,39	1,67	2,07	1,33
2	Minahasa	0,91	0,75	0,57	0,56
3	Kep. Sangihe	1,28	1,79	1,81	1,33
4	Kep. Talaud	1,79	2,52	2,95	0,82
5	Minahasa Selatan	1,27	0,70	1,20	0,57
6	Minahasa Utara	0,23	0,28	0,93	0,44
7	Manado	0,76	0,37	0,15	0,23
8	Bitung	1,43	1,14	1,14	0,86
9	Tomohon	0,99	0,15	0,59	0,48
10	Sulawesi Utara	1,23	1,04	1,06	0,83

Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

Peningkatan pendidikan juga dapat dilihat dari persentase penduduk yang menamatkan SMA/Umum, berdasarkan Grafik 4.2 ada tiga daerah yang mengalami penurunan persentasenya yaitu dari yang terbesar penurunannya kota Manado diikuti oleh kota Tomohon dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Sedangkan keenam daerah lainnya mengalami peningkatan persentase penduduk yang tamat SMA/Umum. Tentunya hal ini menjadi suatu pertanda yang baik dimana kesadaran untuk meniti pendidikan yang lebih tinggi minimal di tingkat

SMA/Umum sudah lebih baik dan agak merata terlebih diluar ibukota propinsi. Hal yang agak menarik bahwa kota Manado dan kota Tomohon termasuk kota yang tingkat penduduk yang tamat SMA/Umum mengalami penurunan padahal kedua kota ini bisa dikatakan lengkap dalam penyediaan sarana prasaran pendidikan. Untuk kota Manado penurunan ini berasal dari adanya migrasi penduduk dari luar kota ke kota Manado untuk mencari pekerjaan dimana sebagian besar penduduk tersebut tidak memiliki pendidikan formal yang cukup kebanyakan adalah para pekerja informal (Harian Komentar Online, 2008). Untuk kabupaten kepulauan Talaud, penurunan persentase ini dapat disebabkan karena masih kurang tersedianya fasilitas sarana/prasaran pendidikan yang lengkap dan baik serta masalah keterpencilan wilayah yang menghambat. (Berita Manado Online, 2010).



Grafik 4.2 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun keatas Tamat SMA/Umum per kabupaten / kota Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2008 (%)

4.2.2 Tenaga Kerja

Indikator tenaga kerja juga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat. Penduduk miskin umumnya tinggal di desa dimana mata pencaharian utamanya dari sektor pertanian. Tingginya persentase pekerja yang bekerja di sektor pertanian ini mengisyaratkan bahwa penduduk masih tergantung pada sektor pertanian.

Tabel 4.9 Persentase Penduduk Bekerja pada Sektor Pertanian kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Utara (%)

No.	Kabupaten, Kota	2005	2006	2007	2008
1	Bolaang Mongondow	69,12	74,24	71,33	56,59
2	Minahasa	49,63	44,25	64,39	54,24
3	Kep. Sangihe	68,88	68,84	79,52	73,27
4	Kep. Talaud	79,73	65,25	76,22	79,71
5	Minahasa Selatan	68,27	72,29	67,47	68,84
6	Minahasa Utara	52,97	56,39	79,15	63,01
7	Manado	77,83	78,48	77,56	71,15
8	Bitung	19,26	41,04	42,50	18,92
9	Tomohon	30,21	29,85	61,41	44,04
10	Sulawesi Utara	54,25	56,58	64,17	50,61

Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

Berdasarkan tabel 4.9 terlihat hanya ada 4 daerah yang mengalami penurunan persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian yaitu yang terbesar kabupaten Bolaang Mongondow diikuti oleh kota Bitung dan kemudian kota Manado dan kabupaten kepulauan Talaud. Untuk kota Bitung dan kota Manado memang kedua kota ini bukanlah daerah pertanian, tetapi untuk daerah Bolaang Mongondow hal ini menjadi suatu yang menarik untuk diamati, karena daerah ini dikenal sebagai lumbung beras Propinsi Sulawesi Utara. Penurunan ini karena adanya pemekaran daerah di tahun 2007 sehingga Bolaang Mongondow terbagi menjadi 5 daerah otonom yang mengakibatkan banyaknya perubahan dalam tata ruang penggunaan lahan dan mulai dibangunnya pusat-pusat ekonomi di daerah otonom tersebut sehingga banyak penduduk yang alih kerja pindah keluar dari pertanian. Selain itu juga hal ini dipengaruhi oleh perubahan musim yang ditandai dengan adanya musim kemarau yang sangat panjang dalam

beberapa tahun belakangan ini mengakibatkan banyak penduduk yang bekerja di sektor pertanian beralih profesi ke sektor lainnya yang tidak terpengaruh oleh cuaca. (BPS Sulut, 2009; hal 4). Sedangkan untuk kabupaten kepulauan Talaud terjadi penurunan yang sangat kecil, hal ini dikarenakan adanya proses kegiatan pembangunan ekonomi di sektor non pertanian yang mulai bertumbuh sehingga membutuhkan tenaga-tenaga kerja dari sektor pertanian (Kristiningsih, 2009, hal 34-38).

Berikut dibawah ini data mengenai persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja menurut kabupaten/kota berdasarkan status pekerjaan utama yang terdiri dari berusaha dengan buruh tetap dan buruh/karyawan/pekerja dibayar. Status pekerjaan utama menurut berusaha dengan buruh tetap dan buruh/karyawan/pekerja dibayar ini merupakan pekerja yang bekerja pada sektor formal.

Tabel 4.10 Persentase Penduduk Bekerja pada Sektor Formal kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Utara (%)

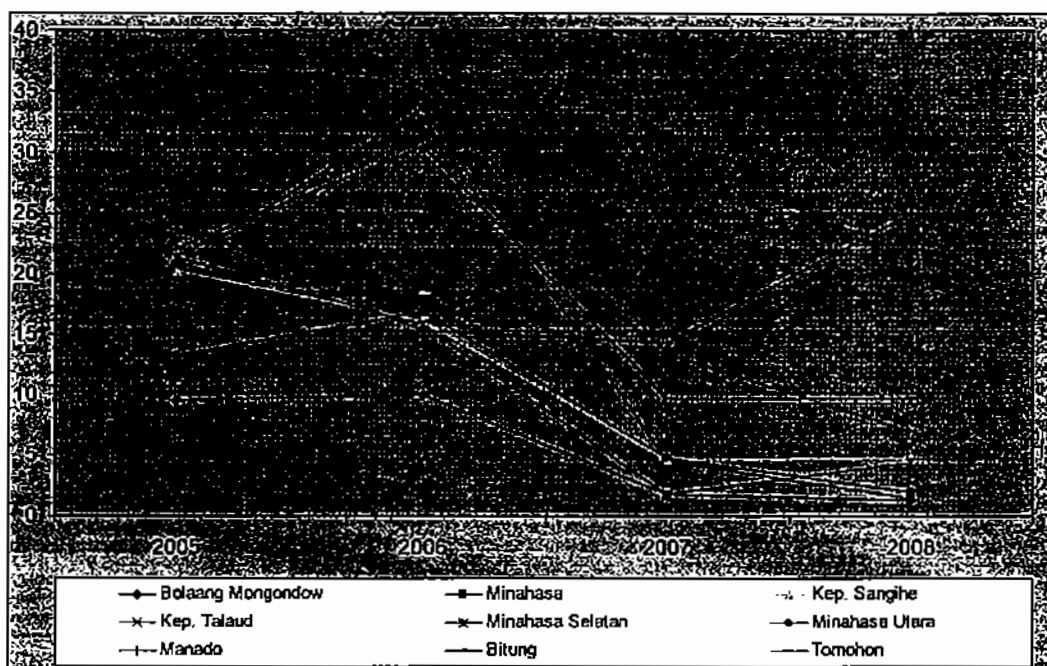
No	Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008
1	Bolaang Mongondow	18,37	17,52	31,35	42,1
2	Minahasa	20,67	23,01	43,46	44,34
3	Kep. Sangihe	16,28	14,64	23,82	21,99
4	Kep. Talaud	12,84	14,08	13,41	10,87
5	Minahasa Selatan	20,15	16,87	65,95	26,76
6	Minahasa Utara	32,56	5,64	14,06	36,99
7	Manado	37,16	60,96	51,46	67,87
8	Bitung	36,96	15,29	53,75	71,43
9	Tomohon	17,71	15,41	36,59	48,98
10	Sulawesi Utara	22,53	21,26	34,86	42,73

Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

Berdasarkan tabel 4.10 hampir secara keseluruhan daerah di Sulawesi Utara mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja di sektor formal kecuali kabupaten kepulauan Talaud yang mengalami penurunan. Peningkatan di sektor formal ini dapat menggambarkan adanya gairah perekonomian yang cukup baik berkembang di hampir seluruh wilayah dan tentunya hal ini juga menandakan

bahwa pusat-pusat ekonomi mulai tumbuh sejalan adanya pemekaran daerah di masing-masing wilayah sejak tahun 2007.

Grafik berikut dibawah ini adalah persentase penduduk yang belum bekerja. Mereka tergolong ke dalam angkatan kerja namun belum mendapatkan pekerjaan.



Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

Grafik 4.3 Persentase Angkatan Kerja yang belum bekerja per kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Utara (%)

Dari Grafik 4.3 tergambar bahwa dari tahun 2005 sampai tahun 2008 hampir seluruh kabupaten/kota di propinsi Sulawesi Utara persentase penduduk yang belum bekerja mengalami penurunan, kecuali kota Manado yang mengalami sedikit peningkatan. Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara dengan pengamat ekonomi / sekretaris ISEI Sulawesi Utara yaitu Dr. V.A.J. Masinambow, bahwa penurunan persentase belum bekerja ini menjadi hal yang menggembirakan dan patut diwaspadai karena hal ini akibat dari dampak pemekaran wilayah yang menjadi 6 daerah otonom yang mengakibatkan proses rekrutmen pegawai daerah secara besar-besaran sehingga terjadi penyerapan angkatan kerja yang belum bekerja di masing-masing daerah pemekaran tersebut. Selain itu juga khusus untuk kota Manado terjadi peningkatan jumlah

pengangguran karena adanya masuknya penduduk dari luar daerah yang mencari kerja akibat dampak dari pembangunan sektor Bangunan dan sektor Perdagangan Hotel Restoran yang tumbuh cukup tinggi sehingga hal ini menarik minat para pencari kerja diluar daerah dan berakibat pada bertambahnya jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan di kota Manado.

4.2.3 Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan rakyat sehubungan dengan kualitas hidupnya. Salah satunya adalah Penolong kelahiran pertama dengan tenaga kesehatan. Yang dimaksud penolong kelahiran dengan tenaga kesehatan yaitu dokter, bidan dan tenaga paramedis lainnya. Penolong persalinan bayi ini dijadikan salah satu indikator kesehatan, terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesejahteraan ibu dan pelayanan kesehatan secara umum.

Pada tabel 4.11 dapat terlihat bahwa dari tahun 2005 sampai tahun 2008 persentase balita menurut penolong kelahiran pertama yang mengalami peningkatan adalah kabupaten Bolaang Mongondow dan kota Tomohon, daerah lainnya mengalami penurunan terutama daerah kabupaten kepulauan Talaud yang paling jauh penurunannya.

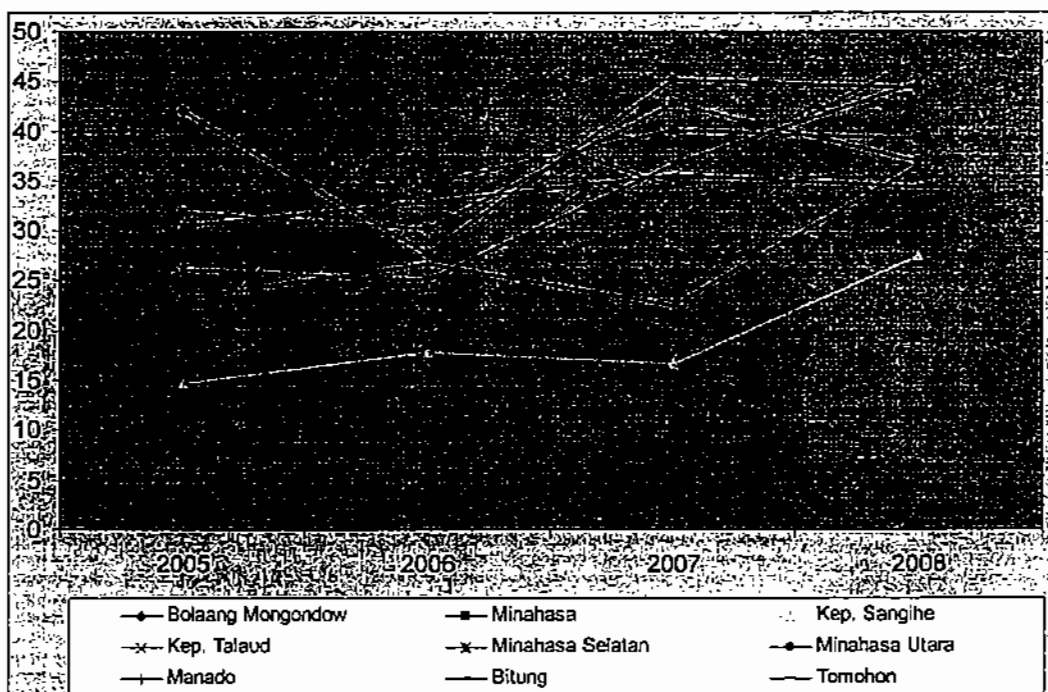
Tabel 4.11 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama per Kabupaten/kota Sulawesi Utara (%)

No	Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008
1	Bolaang Mongondow	68,48	69,8	84,15	79,65
2	Minahasa	95,89	91,26	83,37	82,54
3	Kep. Sangihe	85,18	78,21	78,76	70,02
4	Kep. Talaud	75,34	71,02	67,10	46,65
5	Minahasa Selatan	74,95	82,44	75,15	73,06
6	Minahasa Utara	83,93	85,57	81,76	77,03
7	Manado	95,35	86,17	93,82	89,81
8	Bitung	93,55	71,27	73,93	86,37
9	Tomohon	94,52	97,77	98,65	97,98
10	Sulawesi Utara	83,75	79,72	83,23	82,20

Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

Penurunan di hampir seluruh daerah berdasarkan informasi yang didapatkan karena adanya peraturan menteri kesehatan yang tidak lagi mewajibkan adanya dokter/perawat PTT (pegawai tidak tetap) di daerah-daerah sehingga banyak terjadi kekurangan tenaga medis di daerah-daerah terpencil seperti kabupaten kepulauan Talaud. Untuk daerah yang mengalami kemajuan/peningkatan dapat disebabkan karena adanya pemekaran wilayah yang berdampak pada keterjangkauan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap oleh masyarakat seperti yang terjadi di kabupaten Bolaang Mongondow yang mengalami pemekaran menjadi 5 wilayah otonom.

Berikut grafik 4.4 tentang persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan yang terdiri dari panas, pusing, batuk, pilek, diare, asma, sakit gigi dan penyakit umum lainnya untuk tahun 2005 sampai tahun 2008.



Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

Grafik 4.4 Persentase Penduduk dan Keluhan Kesehatan per kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Utara (%)

Secara umum seluruh daerah kabupaten/kota di Sulawesi Utara mengalami peningkatan keluhan kesehatan para penduduknya. Hal ini bisa diindikasikan bahwa kebersihan lingkungan maupun penerapan praktek kebersihan lingkungan masih kurang sehingga masyarakat mudah terserang penyakit. Indikator ini juga

menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang menderita sakit, maka hal tersebut akan membuat produktifitasnya berkurang sehingga akan mengganggu secara ekonomi yaitu akan mengurangi tabungan ataupun mengurangi pendapatan, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Angka harapan hidup dapat dijadikan indikator untuk melihat masalah kesehatan. Berdasarkan tabel 4.12 angka harapan hidup di seluruh daerah mengalami penurunan, dimana secara rata-rata di tahun 2005 berkisar pada angka 71,70 tahun perlahan-lahan naik menjadi 71,80 di tahun 2006 dan meningkat menjadi 74,40 di tahun 2007, tetapi turun pada angka 72,01 di tahun 2008.

Tabel 4.12 Angka Harapan Hidup per kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Utara (%)

No	Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008
1	Bolaang Mongondow	70,70	70,23	74,03	70,66
2	Minahasa	71,70	69,95	73,60	70,25
3	Kep. Sangihe	71,90	70,75	74,30	71,14
4	Kep. Talaud	70,30	70,70	74,20	71,29
5	Minahasa Selatan	71,30	71,50	75,30	71,89
6	Minahasa Utara	71,60	71,80	75,30	72,20
7	Manado	72,00	72,10	75,60	72,37
8	Bitung	69,60	69,90	73,60	70,20
9	Tomohon	71,60	71,70	75,30	72,16
10	Sulawesi Utara	71,70	71,80	74,40	72,01

Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

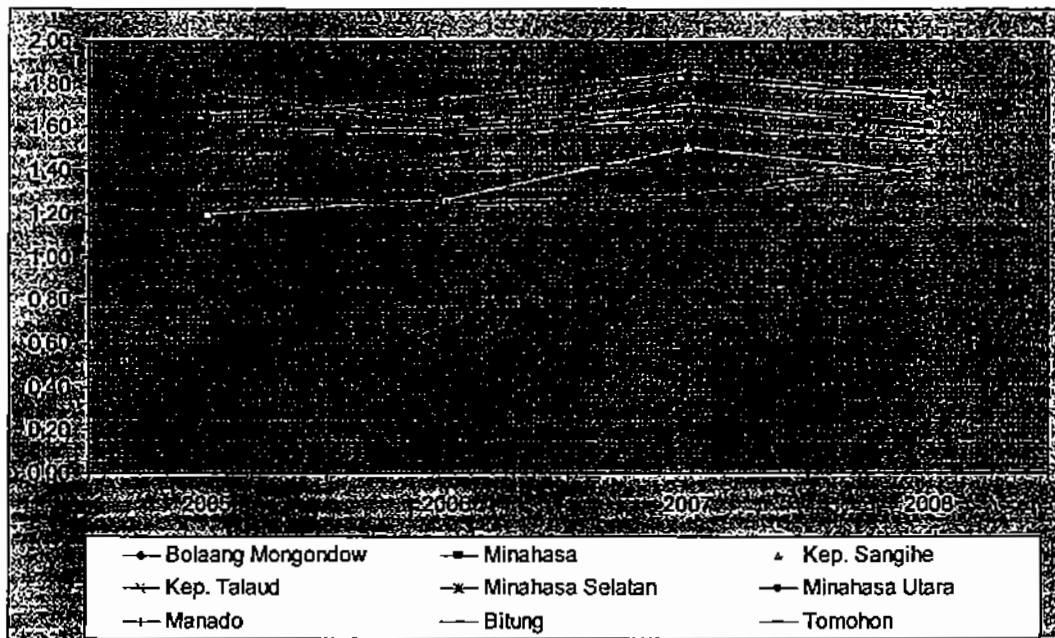
4.2.4 Fertilitas

Usia perkawinan wanita mempunyai pengaruh bagi perkembangan penduduk, karena berpengaruh terhadap fertilitas. Selain itu usia perkawinan juga berpengaruh terhadap stabilitassuatu keluarga terhadap kesehatan diri sendiri dan terhadap anak yang dilahirkan. Upaya menekan laju pertumbuhan penduduk erat kaitannya dengan program keluarga berencana.

Salah satu penyebab terjadinya penurunan angka kelahiran adalah berhasilnya pelaksanaan gerakan keluarga berencana yang dimulai sejak tahun 1980-an. Berikut merupakan rata-rata anak yang pernah dilahirkan per wanita per kabupaten/kota dari tahun 2005 sampai tahun 2008 di Propinsi Sulawesi Utara.

Pada grafik 4.5 terlihat bahwa pada tahun 2005 Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan daerah terendah rata-rata anak lahir hidup per wanita, namun di tahun 2008 kota Tomohon yang meraih predikat sebagai kota terendah rata-rata anak lahir hidup per wanita. Sedangkan untuk rata-rata tertingginya di tahun 2005 adalah kabupaten Minahasa Selatan dan di tahun 2008, rata-rata tertingginya ada pada kabupaten Bolaang Mongondow.

Untuk daerah yang mengalami penurunan di tahun 2008 dibandingkan tahun 2005 adalah Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan dan kabupaten Minahasa Utara. Hal ini menandakan bahwa penurunan rata-rata anak yang pernah dilahirkan per wanita di ketiga daerah tersebut telah berhasil dalam program keluarga berencana.



Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

Grafik 4.5 Rata-Rata Anak Lahir Hidup per Wanita per kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Utara

Berikutnya pada tabel 4.13 merupakan persentase wanita 15-49 tahun berstatus kawin yang masih KB per kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Utara tahun 2005 sampai tahun 2008. Bila diamati menurut kabupaten/kota, maka kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2005 merupakan kabupaten dengan persentase tertinggi sedangkan kota Manado merupakan daerah yang terendah persentasenya.

Untuk tahun 2008, kota Manado yang merupakan daerah persentase tertinggi sedangkan yang terendah persentasenya adalah kabupaten Minahasa.

Bila kita perhatikan pada tabel 4.13 maka di tahun 2008 seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara mengalami penurunan yang cukup besar dalam persentase yang masih ber-KB, hal ini tentunya menggambarkan bahwa animo penduduk untuk menggunakan KB sudah mulai mengalami penurunan.

Tabel 4.13 Persentase Wanita 15-49 Tahun berstatus kawin yg masih KB per kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Utara (%)

No.	Kabupaten/kota	2005	2006	2007	2008
1	Bolaang Mongondow	70,21	73,45	67,44	26,23
2	Minahasa	74,50	81,13	72,11	19,41
3	Kep. Sangihe	69,96	70,01	71,58	23,69
4	Kep. Talaud	67,13	66,74	61,51	27,56
5	Minahasa Selatan	75,47	61,98	73,82	26,84
6	Minahasa Utara	75,42	75,20	72,72	28,49
7	Manado	60,78	64,39	54,02	31,25
8	Bitung	71,72	64,11	65,80	28,73
9	Tomohon	70,47	66,09	71,37	25,42
10	Sulawesi Utara	70,01	69,75	67,07	25,55

Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

4.2.5 Rumah

Di samping kebutuhan akan pangan dan sandang, rumah juga merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk yang cukup vital. Keadaan tempat tinggal rumah tangga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk. Salah satu aspek yang dapat dilihat adalah melalui kepemilikan rumah, luas lantai dan penggunaan air bersih.

Bila dilihat dari tabel 4.14 persentase kepemilikan rumah sendiri di tahun 2005 rata-rata sudah diatas 60% dengan daerah yang tertinggi kepemilikan rumahnya adalah kabupaten kepulauan Talaud diikuti oleh kabupaten Bolaang Mongondow dan kabupaten kepulauan Sangihe. Begitu pula untuk tahun 2008, ketiga daerah ini yang masih tertinggi mendominasi kepemilikan rumah sendiri

yaitu kabupaten kepulauan Talaud diikuti oleh kabupaten kepulauan Sangihe dan kabupaten Bolaang Mongondow. Ketiga daerah ini memiliki persentase tertinggi disebabkan karena di daerah-daerah ini harga tanah masih relatif lebih murah terutama daerah kepulauan dibandingkan daerah lainnya.

Untuk daerah yang memiliki persentase kepemilikan rumah sendiri yang terendah di tahun 2005 adalah kota Manado dan begitu juga halnya di tahun 2008 kota Manado menjadi daerah yang persentase kepemilikan terendah dibanding daerah yang lainnya. Berdasarkan observasi di lapangan, rendahnya persentase kepemilikan rumah di Manado karena masalah harga tanah yang sangat tinggi sehingga banyak penduduk yang sulit menjangkau harga tanah sehingga banyak penduduk miskin di Kota Manado umumnya bertempat tinggal di bantaran aliran sungai tondano dan ada juga yang mengontrak rumah petak yang disewakan di daerah pinggiran kota atau di daerah dekat pelabuhan maupun pasar serta ada juga sebagian kecilnya yang bermukim di sekitar tempat pembuangan sampah.

Tabel 4.14 Persentase Rumah Milik Sendiri per kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2008 (%)

No.	Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008
1	Bolaang Mongondow	86,24	86,71	84,08	82,93
2	Minahasa	70,84	71,24	80,55	77,77
3	Kep. Sangihe	86,18	88,38	87,84	88,39
4	Kep. Talaud	91,12	90,95	90,46	90,44
5	Minahasa Selatan	85,11	83,29	74,00	80,33
6	Minahasa Utara	75,99	77,84	76,92	74,85
7	Manado	62,42	59,66	54,97	49,04
8	Bitung	71,21	59,47	67,92	61,95
9	Tomohon	76,19	76,71	71,65	62,97
10	Sulawesi Utara	76,58	75,95	74,65	72,11

Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan perumahan yang berarti kesejahteraan masyarakat diantaranya luas lantai rumah. Luas lantai rumah tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat juga erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga. Menurut Badan

Kesehatan Dunia (WHO), salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m².

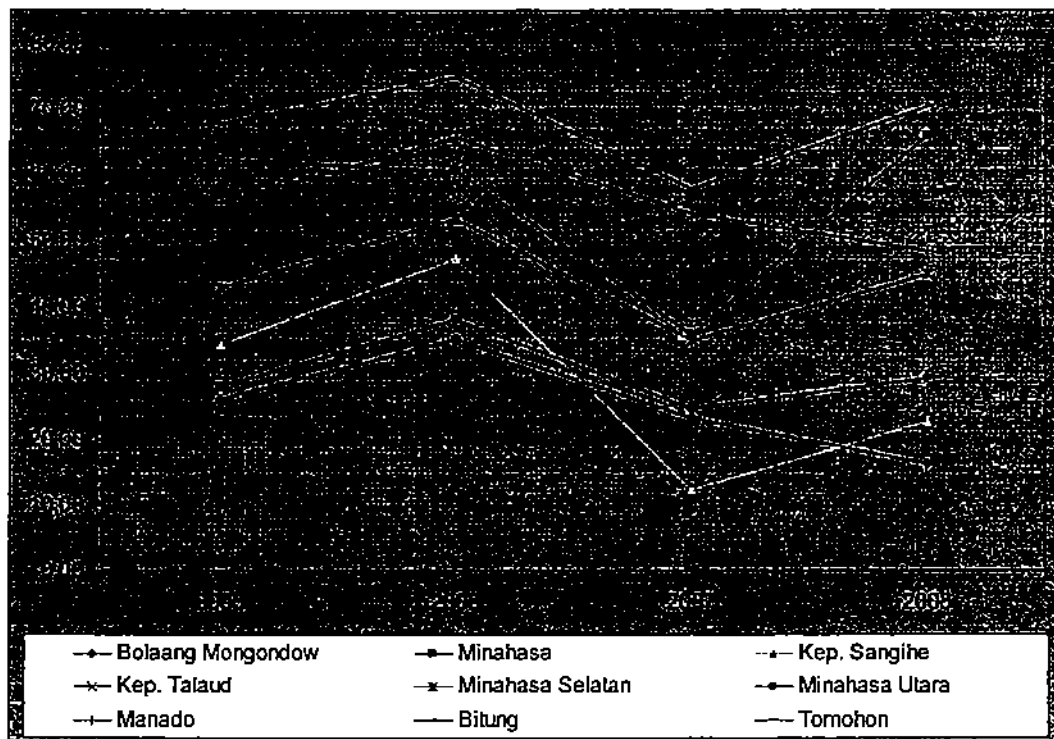
Berdasarkan tabel 4.15 Kota Bitung merupakan daerah tertinggi persentase rumah tangga dengan luas lantai rumah < 20 m² di tahun 2005 sedangkan untuk persentase terendahnya ada di kabupaten kepulauan Talaud. Untuk tahun 2008, persentase tertinggi ada pada kota Manado karena kepadatan penduduk dan mahalnya harga tanah sedangkan persentase terendahnya di kabupaten Minahasa disebabkan tingkat kepadatan yang masih rendah .

Tabel 4.15 Persentase Rumah Tangga dengan Luas Lantai Rumah < 20 m² per kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Utara (%)

No	Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008
1	Bolaang Mongondow	2,89	2,5	5,54	4,65
2	Minahasa	3,86	2,55	3,60	3,07
3	Kep. Sangihe	2,51	4,17	3,59	5,61
4	Kep. Talaud	0,49	3,78	5,92	4,55
5	Minahasa Selatan	2,62	4,15	5,46	4,49
6	Minahasa Utara	2,14	1,65	5,37	4,14
7	Manado	2,79	7,63	6,26	12,88
8	Bitung	6,64	8,78	9,44	7,97
9	Tomohon	0,70	4,78	6,18	5,22
10	Sulawesi Utara	2,91	4,38	5,47	6,28

Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah diantaranya tersedianya air bersih. Penyediaan air bersih merupakan suatu fasilitas yang memerlukan biaya tambahan tersendiri sehingga hal ini menjadi suatu hambatan bagi keluarga miskin untuk memilikinya. Dengan tersedianya air bersih di rumah rumah baik melalui air pipa / air ledeng atau air minum dalam kemasan atau sumur pompa akan dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan keluarga, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kesejahteraan anggota keluarga.



Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

Grafik 4.6 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih per kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2008 (%)

Berdasarkan Grafik 4.6 persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih terendah adalah kabupaten Bolaang Mongondow sedangkan yang tertinggi ada di kota Bitung. Begitu juga yang terjadi di tahun 2008, persentase terendah penggunaan air bersih di rumah tangga ada di kabupaten Bolaang Mongondow sedangkan persentase yang tertinggi ada di kota Bitung. Penyediaan air bersih yang relatif lebih baik di Kota Bitung dikarenakan kota Bitung merupakan kota bisnis dan jasa serta didukung adanya pelabuhan laut dan banyaknya pabrik pengolahan sehingga perlu adanya jalur air bersih yang baik guna menunjang akan hal tersebut.

4.2.6 Pengeluaran Konsumsi

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi

karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai perubahan tingkat kesejahteraan.

Berikut adalah persentase rata-rata pengeluaran/kapita/bulan menurut konsumsi bukan makanan per kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Utara. Semakin tinggi angka persentase rata-rata tersebut maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk di daerah tersebut. Hal ini mengisyaratkan seberapa banyak sisa pengeluaran yang didapat dipakai oleh penduduk setelah dikurangi untuk pengeluaran makanan.

Tabel 4.16 Persentase Rata-Rata Pengeluaran/kapita/bulan Penduduk menurut Konsumsi Bukan Makanan Per Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Utara (%)

No.	Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008
1	Bolaang Mongondow	33,82	35,13	36,87	35,27
2	Minahasa	40,83	42,23	35,69	39,58
3	Kep. Sandige	39,74	36,49	34,09	35,71
4	Kep. Talaud	38,46	35,71	32,73	35,63
5	Minahasa Selatan	34,02	30,32	27,37	30,57
6	Minahasa Utara	46,35	44,2	42,78	44,44
7	Manado	48,26	51,62	49,96	49,94
8	Bitung	42,68	47,42	40,49	43,53
9	Tomohon	40,07	43,44	39,50	41,00

Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

Berdasarkan tabel 4.16, daerah yang persentase rata-rata pengeluaran /kapita/bulan menurut konsumsi bukan makanan yang tertinggi di tahun 2005 adalah kota Manado sedangkan yang terendahnya di kabupaten Bolaang Mongondow. Pada tahun 2008, daerah yang persentase pengeluaran non

makanany tertinggi ada di kota Manado dan yang terendahnya di kabupaten Minahasa Selatan.

4.2.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Propinsi Sulawesi

Utara

Untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam hal mendapatkan sumber pendapatan dalam melaksanakan roda pemerintahannya maka perlu dilihat dari segi penerimaan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ada di masing-masing kabupaten / kota yang ada di propinsi Sulawesi Utara.

Penerimaan di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari segala sumber pendanaan yang berasal dari usaha daerah bersangkutan dan transfer dari anggaran pemerintah pusat . Berikut merupakan gambaran informasi mengenai jumlah keseluruhan penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah per kabupaten / kota.

Berdasarkan tabel 4.17 terlihat pada tahun 2005 kota Manado menempati posisi terbesar dalam porsi penerimaan di APBD diikuti oleh kabupaten Bolaang Mongondow dan kabupaten Minahasa.

Tabel 4.17 Jumlah Penerimaan APBD per kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2008 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Penerimaan APBD			
		2005	2006	2007	2008
1	Bolaang Mongondow	288.824	454.964	582.458	729.603
2	Minahasa	250.055	346.759	443.366	671.986
3	Kep. Sangihe	247.311	345.516	417.562	510.667
4	Kep. Tana Toraja	162.364	264.428	359.252	401.418
5	Minahasa Selatan	185.677	299.328	407.175	333.271
6	Minahasa Utara	123.323	288.213	344.283	407.500
7	Manado	290.543	439.520	549.089	630.426
8	Bitung	170.121	270.417	322.287	354.992
9	Tomohon	106.527	221.221	267.787	334.674

Sumber : Tim Kajian & Evaluasi Pemda se-Sulut, World Bank (2010), diolah

Hal ini merupakan suatu kewajiban mengingat kota Manado merupakan pusat perekonomian di Sulawesi Utara dan tentunya mempunyai banyak potensi-potensi yang bisa diberdayakan sebagai sumber-sumber pendapatannya,

sedangkan untuk kedua daerah yaitu kabupaten Bolaang Mongondow dan kabupaten Minahasa, potensi sumber penerimaan pendapatannya berasal dari kekayaan alam yang melimpah baik dari sektor pertanian dan sektor pertambangan khususnya emas serta sektor perikanan laut.

Bila kita melihat trend perkembangannya diantara ketiga daerah ini dalam tahun-tahun berikutnya, nampak kabupaten Bolaang Mongondow bisa mampu meraih posisi terbesar dalam hal penerimaan pendapatan mulai tahun 2006 sampai tahun 2008. Selanjutnya posisi kedua diikuti oleh Manado yang agak menurun setelah tahun 2006 dan tahun 2007 tetapi pada tahun 2008 kabupaten Minahasa bisa menduduki tempat kedua terbesar melewati kota Manado. Posisi kabupaten Bolaang Mongondow dan kabupaten Minahasa bisa meraih posisi kedua terbesar dalam penerimaan APBD mereka dikarenakan adanya daerah-daerah pemekaran baru yang terjadi selepas tahun 2005 sehingga daerah-daerah otonom yang baru ini dapat lebih kreatif mencari sumber-sumber pendapatan yang baru yang belum tergarap secara maksimal seperti adanya obyek pajak baru, retribusi-retribusi pasar / usaha baru atau bisa berasal dari dana-dana dekonsentrasi khususnya untuk daerah pemekaran yang berasal dari pemerintah pusat.

Tabel 4.18 Pendapatan Asli Daerah per kabupaten / kota Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2008

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kabupaten Kota	2005	(%)	2006	(%)	2007	(%)	2008	(%)
1	Bolaang Mongondow	8.089	2,80	10.264	2,26	11.587	1,99	13.387	1,83
2	Minahasa	10.987	4,39	14.233	4,10	15.140	3,41	19.439	2,89
3	Kep. Sangihe	11.500	2,65	15.684	2,54	23.601	5,65	25.574	5,01
4	Kep. Talaud	3.897	2,01	8.322	3,16	10.061	2,80	15.421	3,84
5	Minahasa Selatan	3.208	1,73	3.340	1,12	5.625	1,38	27.983	8,40
6	Minahasa Utara	3.784	3,07	4.640	1,61	6.202	1,80	8.264	2,03
7	Manado	37.500	29,1	42.888	9,70	52.250	9,52	62.042	9,98
8	Bulungan	10.645	5,90	10.366	3,83	11.353	3,52	12.767	3,59
9	Tomohon	3.177	2,98	2.713	1,23	3.319	1,24	3.538	1,06
10	Sulawesi Utara	138.894	33,25	184.394	29,85	217.855	29,72	238.949	28,20

Sumber : Tim Kajian & Evaluasi Pemda se-Sulut, World Bank (2010), diolah

Selain itu juga, perlu kita melihat lebih mendalam kemampuan masing-masing daerah dalam usaha meningkatkan pendapatan mereka dengan

mengukurnya dari Pendapatan Asli Daerah. Indikator ini merupakan suatu gambaran dari kontribusi daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Sedangkan dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara merupakan transfer dana dari pemerintah pusat untuk membantu daerah dalam menjalankan proses pembangunannya.

Dari tabel 4.18 tergambar secara umum pendapatan asli daerah mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2005 terlihat kota Manado merupakan kota yang terbesar dalam perolehan pendapatan asli daerah, yang notabene merupakan ibukota propinsi dan pusat pemerintahan serta pusat perekonomian, tetapi pada tahun selanjutnya sampai tahun 2008 kota Manado mengalami penurunan PAD-nya. Sedangkan daerah terkecil dalam hal penerimaan dari pendapatan asli daerah adalah kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Hal ini terjadi dapat karena kabupaten Minsel ini merupakan salah satu daerah pemekaran baru di periode sebelumnya, sehingga tentunya masih banyak menemui kendala dalam mencari sumber pemasukkan daerah. Yang menarik dari kabupaten Minsel ini, setelah 3 tahun berturut-turut menjadi daerah terkecil dalam penerimaan PAD, memasuki tahun 2008 daerah ini langsung melejit menjadi daerah terbesar kedua setelah Manado. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Minsel bisa menjadi contoh yang baik dalam rangka peningkatan PAD di daerahnya.

Yang agak menarik juga dapat terlihat kemampuan dari pemerintah Bolaang Mongondow, dimana untuk posisi total penerimaan APBD bisa menjadi terbesar tetapi melihat kemampuan untuk menghasilkan pendapatan di daerahnya sendiri dapat dikatakan kurang. Pada tahun 2005 kabupaten BolMong merupakan daerah ketiga terkecil dalam penerimaan APBDnya dan di tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan sampai di tahun 2008 menempati posisi kedua terkecil, sehingga dapat terlihat jelas bahwa kabupaten BolMong penerimaan terbesarnya bukan dari kemampuan dirinya sendiri melainkan banyak tergantung dari pemerintah pusat.

Selain itu juga, kota Bitung dapat dikatakan daerah yang mengalami penurunan kinerja dalam usaha perolehan PAD-nya, dimana pada tahun 2005 posisi kota Bitung menempati urutan kedua terbesar tetapi secara perlahan pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup berarti sampai di tahun

2008 yang menempati posisi kelima, hal ini ironis mengingat kota Bitung merupakan kota industri pengolahan dan kota pelabuhan yang terbesar di propinsi Sulawesi Utara, yang tentunya potensi-potensi penerimaan akan banyak tersedia.

Bila dilihat secara keseluruhan, hampir sebagian besar kabupaten / kota tidak dapat meningkatkan penerimaan dari hasil usahanya sendiri yaitu dari PAD yang tergambar secara rata-rata cenderung konstan atau tidak mengalami perubahan yang berarti kecuali kabupaten kepulauan Talaud, kabupaten kepulauan Sangihe dan kabupaten MinSel yang mengalami peningkatan.

Selanjutnya, untuk melihat gambaran tentang dana perimbangan per kabupaten / kota di Propinsi Sulawesi Utara akan tersaji pada tabel 4.24. Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Tabel 4.19 Dana Perimbangan per kabupaten / kota Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2008

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kabupaten Kota	2005	2006	2007	2008
1	Bolaang Mongondow	265.055	443.200	519.261	615.226
2	Minahasa	168.518	329.777	418.728	592.363
3	Kep. Sangihe	242.388	328.691	384.363	438.580
4	Kep. Talaud	134.528	250.378	299.027	334.997
5	Minahasa Selatan	156.972	292.088	377.936	299.102
6	Minahasa Utara	101.613	279.266	320.863	359.367
7	Manado	232.040	386.372	435.758	502.439
8	Bitung	150.328	260.051	292.515	329.470
9	Tomohon	93.193	216.008	259.455	295.928

Sumber : Tim Kajian & Evaluasi Pemda se-Sulut, World Bank (2010), diolah

Bila dilihat dari tabel 4.19 , penerimaan dana perimbangan di hampir seluruh kabupaten / kota di Propinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan. Dana perimbangan yang terbesar diterima oleh kabupaten Bolaang Mongondow dari tahun 2005 sampai dengan 2008. Hal ini bisa menjadi jawaban bahwa total penerimaan APBD-nya menjadi terbesar dikarenakan berasal dari kontribusi dana

perimbangan dan juga dapat dipahami bahwa daerah BolMong merupakan daerah yang paling luas melingkupi hampir 54,35% wilayah propinsi Sulawesi Utara dan jumlah penduduk yang terbesar mencapai 23% dari seluruh penduduk Sulawesi Utara. Untuk posisi kedua penerima dana keseimbangan terbesar adalah kota Manado, dimana hal ini karena posisi sebagai ibukota propinsi dan pusat pemerintah serta jumlah penduduk kedua terbesar mencapai 20%.

Kemudian ada hal yang cukup menarik yaitu kabupaten Minahasa dimana pada tahun 2005 dana keseimbangan yang diterima hanya terbesar keempat tetapi secara perlahan di tahun berikutnya sampai tahun 2008 kabupaten Minahasa bisa menjadi daerah terbesar kedua setelah kabupaten Bolaang Mongondow. Bila kita perhatikan lebih mendalam lagi khususnya untuk dua daerah ini yaitu kabupaten Bolaang Mongondow dan kabupaten Minahasa bahwa sangat besar kemungkinan selain dari besarnya wilayah dan penduduk, dana keseimbangan ini bisa berasal dari dana bagi hasil untuk kekayaan alamnya berupa pertambangan emas dimana untuk tahun 2006, kedua daerah ini memiliki beberapa perusahaan tambang emas skala besar yang telah beroperasi.

Tabel 4.20 Persentase Dana Perimbangan Terhadap APBD per kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2008
(dalam persen)

No	Kabupaten-Kota	Persentase thd Penerimaan APBD 2005	Persentase thd Penerimaan APBD 2006	Persentase thd Penerimaan APBD 2007	Persentase thd Penerimaan APBD 2008
1	Bolaang Mongondow	91,77	97,41	89,15	84,32
2	Minahasa	67,39	95,10	94,44	88,15
3	Kep. Sangihe	95,88	95,13	92,05	85,88
4	Kep. Talaud	95,21	92,69	82,24	83,45
5	Minahasa Selatan	84,54	97,58	92,82	89,75
6	Minahasa Utara	82,40	96,90	93,20	88,19
7	Manado	79,86	87,91	79,36	79,70
8	Bitung	88,97	96,17	90,76	92,81
9	Tomohon	87,48	97,64	96,89	88,42

Sumber : Tim Kajian & Evaluasi Pemda se-Sulut, World Bank (2010), diolah

Berdasarkan tabel 4.20 terlihat persentase dana perimbangan per kabupaten / kota di Propinsi Sulawesi Utara terhadap total penerimaan anggaran

pendapatan dan belanja daerah. Pada tahun 2005 persentase terbesar terdapat pada kabupaten kepulauan Talaud dan persentase terkecil terdapat pada kabupaten Minahasa. Kemudian bila dilihat pada tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2008, persentase terbesar ada pada kota Bitung dan persentase terkecil ada pada kota Manado. Terlihat juga kota Manado dari tahun ke tahun merupakan daerah yang cenderung menurun dan terkecil dalam persentase penerima dana perimbangan. Begitupula dengan kabupaten kepulauan Talaud, yang di tahun 2005 merupakan daerah terbesar secara persentase selanjutnya di tahun 2008 menjadi daerah kedua terkecil secara persentase yang menerima dana perimbangan.

Besar kecilnya persentase ini memberikan arti bahwa semakin kecil kontribusi dana perimbangan memberikan gambaran bahwa daerah tersebut memiliki potensi yang kuat pada pendapatan asli daerahnya dan memiliki ketergantungan yang kurang terhadap pemerintah pusat.

BAB V

HASIL PEMBAHASAN ANALISIS EKONOMETRIK

1.1 Pembahasan Hasil Penelitian

1.1.1 Hipotesis Tanda

Sebelum memutuskan apakah dugaan koefisien regresi sudah bermakna secara teoritis dan nyata secara signifikan maka ditetapkan terlebih dahulu hipotesis mengenai tanda dari koefisien regresi dugaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi. Jika nilai maupun tanda dari dugaan koefisien regresi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi maka dugaan koefisien tersebut harus ditolak, kecuali jika ada alasan kuat untuk menyatakan bahwa dalam kasus tersebut prinsip-prinsip ekonomi tidak berlaku (Azwar, 2000).

Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi makro, hipotesis hubungan variabel bebas terhadap tingkat kemiskinan di propinsi Sulawesi Utara dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Persentase penduduk berusia 10 tahun keatas tamat SMA/Umum (SMA)

Hubungan negatif, bersifat terbalik artinya jika persentase penduduk berusia 10 tahun keatas tamat SMA/Umum naik/turun, maka tingkat kemiskinan akan turun/naik.

Dengan adanya kenaikan persentase penduduk berusia 10 tahun keatas tamat SMA/Umum berimplikasi pada meningkatnya pengetahuan dari penduduk. Dengan meningkatnya pengetahuan akan menambah kualitas / daya tawar dalam posisi mencari pekerjaan yang lebih baik dan juga akan meningkatkan tingkat produktivitas kerja. Dengan posisi tawar yang lebih baik, maka para pekerja tersebut akan mendapatkan peningkatan pendapatan dari kenaikan gaji/upah yang didapatnya, sehingga tingkat kesejahteraannya pun akan meningkat pula (tingkat kemiskinan akan berkurang).

b. Persentase Angkatan Kerja yang belum bekerja (PGGRN)

Hubungan Positif, bersifat searah artinya jika persentase angkatan kerja yang belum bekerja naik/turun, maka tingkat kemiskinan akan naik/turun.

Dengan adanya kenaikan persentase angkatan kerja yang belum bekerja berimplikasi pada meningkatnya jumlah pengangguran. Orang yang

mengganggu ini tidak mempunyai penghasilan / pendapatan. Dengan tidak adanya pendapatan maka tidak dapat memenuhi kebutuhannya, yang akibatnya tingkat kesejahteraannya akan turun (tingkat kemiskinan akan bertambah).

c. Persentase Penduduk dan Keluhan Kesehatan (KLHSKT)

Hubungan Positif, bersifat searah artinya jika persentase penduduk akan keluhan kesehatannya naik/turun, maka tingkat kemiskinan akan naik/turun.

Kenaikan dalam persentase penduduk akan keluhan kesehatannya berimplikasi pada peningkatan pengeluaran rumah tangga untuk membeli obat agar memperoleh kesembuhan. Akibat dari kesehatannya yang terganggu maka penduduk yang bekerja sebagai buruh tidak dapat memperoleh penghasilan. Dengan pengeluaran rumah tangga meningkat dan pendapatan yang berkurang maka pemenuhan kebutuhan hidup lainnya akan dikurangi. Bila biaya pengobatannya menjadi lebih mahal maka rumah tangga tersebut bersedia untuk menjual aset-aset pribadi miliknya. Dengan adanya pengurangan pendapatan ini ataupun penjualan aset maka akan membuat tingkat kesejahteraannya akan berkurang (tingkat kemiskinan akan bertambah).

d. Persentase Wanita berumur 15 – 49 tahun Berstatus Kawin yang Masih Ikut Keluarga berencana (MSHKB)

Hubungan Negatif, bersifat terbalik artinya jika persentase wanita berumur 15 – 49 tahun berstatus kawin yang masih ikut keluarga berencana naik/turun, maka tingkat kemiskinan akan turun/naik.

Kenaikan dalam persentase wanita berumur 15 – 49 tahun berstatus kawin yang masih ikut keluarga berencana akan berimplikasi para wanita terutama di pedesaan untuk dapat bersekolah lebih tinggi yang akan meningkatkan pengetahuannya dan pada akhirnya para wanita tersebut dapat menambah penghasilan keluarga dengan adanya pengetahuan yang di dapat. Kemudian, dengan pengetahuannya para wanita dapat melakukan perencanaan keuangan keluarga yang lebih baik lagi. Selain itu, dengan adanya program KB ini juga perencanaan pengeluaran keluarga akan lebih terencana dengan baik yang dapat digunakan untuk ditabung ataupun untuk kegiatan produktivitas lainnya, sambil merencanakan waktu terbaik untuk persiapan kelahiran anak pada

waktu yang diinginkan. Pengeluaran yang tertunda ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, yang pada akhirnya tingkat kemiskinan akan berkurang.

e. Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih (AIR)

Hubungan Negatif, bersifat terbalik artinya jika Persentase Rumah Tangga menggunakan air naik/turun maka tingkat kemiskinan juga akan turun/naik.

Kondisi dan kualitas rumah yang ditempati dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Semakin baik kondisi dan kualitas rumah yang ditempati, menunjukkan semakin baik keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan suatu indikator bagi tingkat kesejahteraan para pemiliknya. Hal ini dikarenakan ketersediaan air minum baik yang berasal dari ledeng, air kemasan, pompa dan sumur / mata air terlindung dengan jarak ke tempat pembuangan limbah lebih dari 10 meter (air minum bersih) merupakan suatu hal yang sulit terjangkau bagi para penduduk miskin. Kenaikan persentase rumah tangga menggunakan air bersih menunjukkan bahwa daya beli rumah tangga untuk menyediakan air bersih di rumahnya semakin bertambah baik sehingga dapat dikatakan tingkat kesejahteraan akan semakin meningkat dan tingkat kemiskinan akan berkurang.

f. Persentase Rata-Rata Pengeluaran/kapita/bulan Penduduk menurut Konsumsi Bukan Makanan (BKNMKN)

Hubungan Negatif, bersifat terbalik artinya jika persentase rata-rata pengeluaran / kapita / bulan penduduk menurut konsumsi bukan makanan naik/turun, maka tingkat kemiskinan akan turun/naik.

Kenaikan persentase rata-rata pengeluaran/kapita/bulan penduduk menurut konsumsi bukan makanan menunjukkan bahwa penduduk tersebut mengalami peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan ini akan membuat pergeseran dalam pola pengeluaran dimana elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada

kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian hal ini dapat menunjukkan perubahan tingkat kesejahteraan yang lebih baik, dan hal ini juga menunjukkan tingkat kemiskinan berkurang.

g. Pengeluaran Pembangunan Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Hubungan negatif, bersifat terbalik artinya jika pengeluaran pembangunan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah naik/turun, maka tingkat kemiskinan akan turun/naik.

Dengan adanya kenaikan dalam pengeluaran pembangunan pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah berimplikasi pada peningkatan pengeluaran di sektor-sektor pelayanan publik. Dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor-sektor ini, maka akan menggerakkan perekonomian dengan meningkatnya permintaan barang dan jasa sehingga produsen akan meningkatkan kapasitas produksinya dan akan menciptakan lapangan kerja. Dengan adanya permintaan akan tenaga kerja akan mengakibatkan terserapnya angkatan kerja yang belum bekerja sehingga mereka akan mempunyai pendapatan. Dengan bertambahnya penduduk yang bekerja akan menekan angka pengangguran dan akan meningkatkan secara agregat permintaan terhadap barang dan jasa. Peningkatan permintaan secara agregat ini akan berkembang ke sektor-sektor lainnya sehingga secara makro perekonomian bertumbuh dan pendapatan domestik regional bruto akan bertambah serta pendapatan per kapita masyarakat akan meningkat pula. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat sehingga tingkat kemiskinan akan berkurang.

1.1.2 Hasil Pemilihan Variabel

Hal yang pertama yang dilakukan sebelum mencari model terbaik adalah melakukan pemilihan variabel-variabel terbaik untuk mewakili masing-masing indikator kesejahteraan rakyat. Dari kurang lebih 16 variabel yang ada, maka

dilakukan seleksi dengan mengukur besaran R^2 -adj dari masing-masing variabel dibandingkan dengan tingkat kemiskinan. Hasil yang didapat dapat dilihat di lampiran dan secara umum hasil yang ada adalah :

- Persentase penduduk berusia 10 tahun keatas tamat SMA/Umum (SMA) sebagai berikut proxy dari indikator pendidikan,
- Persentase angkatan kerja yang belum bekerja (PGGRN) adalah proxy dari indikator tenaga kerja,
- Persentase penduduk dan keluhan kesehatan (KLHSKT) adalah proxy dari indikator kesehatan,
- Persentase wanita berumur 15 – 49 tahun berstatus kawin yang masih ikut keluarga berencana (MSHKB) adalah dari indikator fertilitas,
- Persentase rumah tangga menggunakan air bersih (Air) adalah proxy dari indikator perumahan,
- Persentase rata-rata pengeluaran/kapita/bulan penduduk menurut konsumsi bukan makanan (BKNMKN) adalah proxy dari indikator taraf dan pola konsumsi,
- Pengeluaran pembangunan pemerintah daerah adalah proxy dari anggaran pendapatan belanja daerah

Selanjutnya, dilakukanlah pencarian metode yang cocok di dalam data panel yang akan dipakai dalam model. Di dalam data panel ada 3 metode yang dapat digunakan dan dengan bantuan program *evIEWS* yaitu dengan Uji Hausman maka didapatkanlah metode yang terbaik untuk ketiga model ini yaitu metode efek tetap. Pemilihan metode efek tetap ini dapat dilihat di dalam lampiran.

1.1.3 Hasil Estimasi Regresi Penduduk Miskin (P0)

Di dalam melakukan regresi data panel, diperlukan perhitungan untuk mengetahui metode yang terbaik dalam melakukan estimasi regresi dari model penduduk miskin. Untuk itu diperlukan dua uji untuk mengetahuinya yaitu Uji Chi-Kuadrat, yang membandingkan metode kuadrat terkecil (*pooled least square*) dengan metode efek tetap (*fixed effect*). Kemudian bila terpilih metode efek tetap, maka akan dilakukan uji Hausman (*Hausman Test*) yang membandingkan metode efek tetap (*fixed effect*) dengan metode efek acak (*random effect*).

Untuk pengujian 2 metode tersebut diatas untuk model penduduk miskin, maka digunakanlah program bantu yaitu software Eviews 6. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

Pertanyaannya adalah apakah pada model fixed effect (*cross-section*)-nya berbeda atau tidak berbeda (model Pool). Pengujian yang dilakukan menggunakan Chi-Kuadrat, yaitu:

H_0 : model mengikuti Pool

H_1 : model mengikuti Fixed

Tabel 5.1 Hasil Uji Chi-Kuadrat Model Penduduk Miskin Propinsi Sulawesi Utara

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: POVERTYSULUT
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.325303	(8,20)	0.0011
Cross-section Chi-square	41.078582	8	0.0000

Dari tabel 5.1 terlihat hasil yang menunjukkan baik F test maupun Chi-square signifikan (p-value 0,001 dan 0,0000 lebih kecil dari 5%) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka model mengikuti Fixed Effect.

Selanjutnya kita coba estimasi Model Random Effect. Pengujian yang dilakukan menggunakan Hausman test, yaitu:

H_0 : model mengikuti Random Effect

H_1 : model mengikuti Fixed Effect

Tabel 5.2 Hasil Uji Hausman Penduduk Miskin Sulawesi Utara

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: POVERTYSULUT
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.406122	7	0.0311

Berdasarkan tabel 5.2 hasil pengujian tersebut signifikan (p -value 0,031 kurang dari 5%), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, model mengikuti Fixed Effect.

Kemudian dengan menggunakan program software Eviews 6, dan menggunakan metode Fixed Effect dilakukan proses untuk mendapatkan variabel-variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin, maka hasil estimasi regresi penduduk miskin (P_0) untuk seluruh kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Utara tampak sebagai berikut :

Tabel 5.3 Hasil Estimasi Model Persentase Penduduk Miskin (P_0) Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2008

VARIABEL INDEPENDEN	MODEL P_0	
	MODEL AWAL	MODEL TERBAIK
(Constant)	2,105 (0,090)	38,126 (6,580)
SMA	-0,184 (-2,048)	-0,243 (-2,624)
PGGRN	-0,006 (-0,143)	-
KLHSKT	0,015 (0,324)	-
MSHKB	-0,008 (0,0443)	-0,03 (-2,20)
AIR	-0,021 (-0,767)	-0,034 (-5,380)
BKNMKN	-0,329 (-2,286)	-0,438 (-3,532)
APBD	1,086 (1,448)	-
Adj- R^2	0,874	0,875
F-stat	17,62	21,455
Prob (F-stat)	0,000	0,000
DW	2,97	2,779
F tabel / T tabel	2,36 / 2,045	
α	5%	

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 5.3 model awal dengan menggunakan metode data panel fixed effect didapatkan bahwa :

- Berdasarkan pengujian koefisien regresi secara parsial yaitu uji-t bisa dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistic dengan t-tabel (pada taraf $\alpha = 5\%$ yaitu 2,045) maupun dengan membandingkan nilai Probabilitas dengan

$\alpha = 5\%$. Output menunjukkan bahwa nilai t-statistic untuk masing-masing koefisien regresi ada yang lebih dan ada yang kurang dari t-tabel = 2,045. Ternyata hanya 2 variabel yaitu SMA dan BKNMKN mempunyai nilai lebih dari t-tabel dan nilai probabilitasnya juga mempunyai nilai kurang dari $\alpha = 5\%$ (0,05), sehingga variabel-variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap persentase penduduk miskin.

- Pengujian model secara Overall (uji-F) bisa dilakukan dengan membandingkan nilai F-statistik dengan F-tabel (pada taraf $\alpha = 5\%$ dan diperoleh F-tabel = 2,36) atau membandingkan nilai probabilitas (F-stat) dengan $\alpha = 5\%$. Berdasarkan output nilai F-stat jauh lebih besar yaitu 17,62 dari F-tabel. Begitu juga nilai Probabilitas (F-stat) nya jauh lebih kecil dibandingkan $\alpha = 5\%$. Artinya bahwa secara keseluruhan model berpengaruh secara signifikan menjelaskan tingkat kemiskinan.
- Uji kelayakan model dapat dilakukan dengan melihat nilai R^2 -adj. Dari output diperoleh nilai R^2 -adj sebesar 0,874 yang berarti proporsi keragaman tingkat kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen sebesar 87,4% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.
- Hasil estimasi regresi dari koefisien masing-masing variabel yang diperoleh juga ternyata ada beberapa tidak sesuai dengan hipotesis tanda yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana variabel PGGRN seharusnya bertanda positif dan variabel APBD seharusnya bertanda negatif. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya kondisi ini merupakan salah satu indikasi adanya multikolinearitas dan juga dapat dilihat dari tingginya R^2 -adj diiringi dengan banyaknya variabel yang tidak signifikan, sehingga hasil estimasi model ini tidak dapat dipergunakan.

Selanjutnya sesuai dengan analisis model yang pertama, maka dicarilah model-model lainnya dengan beberapa variabel yang dikeluarkan dari model dengan pertimbangan bahwa hasil pengujian secara parsial (uji-t) menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel-variabel yang dikeluarkan dari model itu adalah PGGRN, KLHSKT dan APBD. Selanjutnya, untuk mencari model terbaik pada persentase penduduk miskin (P_0), selain membuang variabel-variabel yang tidak

signifikan juga memperhatikan hipotesis tanda dari masing-masing variabel serta dengan bantuan program eviews akan melakukan pilihan untuk mengkonstantakan residual agar tidak terjadi heteroskedastisitas (Nachrowi, 2006, hal 336).

Adapun model terbaik yang didapat dari tabel 5.3 dengan menggunakan metode efek tetap dengan tingkat keyakinan sebesar 5% untuk P_0 ini adalah :

- Berdasarkan pengujian koefisien regresi secara parsial yaitu uji-t bisa dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistic dengan t-tabel (pada taraf $\alpha = 5\%$ yaitu 2,045) maupun dengan membandingkan nilai Probabilitas dengan $\alpha = 5\%$. Output menunjukkan bahwa nilai t-statistic untuk masing-masing koefisien regresi bernilai lebih dari t-tabel = 2,045 dan ternyata ada 4 variabel yaitu SMA, MSHKB, AIR dan BKNMKN mempunyai nilai lebih dari t-tabel dan nilai probabilitasnya juga mempunyai nilai kurang dari $\alpha = 5\%$ (0,05), sehingga variabel-variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap model penduduk miskin. Sedangkan 3 variabel lainnya yaitu PGGRN, KLHSKT dan APBD tidak berpengaruh secara signifikan sehingga tidak dimasukkan ke dalam model.
- Pengujian model secara Overall (uji-F) bisa dilakukan dengan membandingkan nilai F-statistik dengan F-tabel (pada taraf $\alpha = 5\%$ dan diperoleh F-tabel = 2,36) atau membandingkan nilai probabilitas (F-stat) dengan $\alpha = 5\%$. Berdasarkan output nilai F-stat jauh lebih besar yaitu 21,455 dari F-tabel (2,36). Begitu juga nilai Probabilitas (F-stat) nya yaitu 0,000 jauh lebih kecil dibandingkan $\alpha = 5\%$ (0,5). Artinya bahwa secara keseluruhan model berpengaruh secara signifikan menjelaskan penduduk miskin.
- Uji kelayakan model dapat dilakukan dengan melihat nilai R^2 -adj. Dari output diperoleh nilai R^2 -adj sebesar 0,875 yang berarti proporsi keragaman tingkat kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen sebesar 87,5% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.
- Hasil estimasi regresi dari koefisien dari 4 variabel ini mempunyai tanda yang sesuai dengan hipotesis teori yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana keempat variabel terbaik ini bertanda negatif.
- Untuk melihat ada atau tidaknya hubungan linier antara variabel independen maka diperlukan adanya Uji multikolinearitas. Indikasi adanya

multikolinieritas adalah bila tingginya nilai R^2 -adj, pengujian model secara overall (uji-F) signifikan, namun ada beberapa pengujian koefisien regresi secara parsial (uji-t) yang tidak signifikan dan juga dilihat dari ketidaksesuaian variabel dari hipotesis tandanya. Dalam model terbaik ini nilai R^2 -adj cukup tinggi (0,875) dan pengujian secara parsial maupun secara overall signifikan pada taraf $\alpha = 5\%$ dan juga model ini masing-masing variabelnya sesuai dengan hipotesis tandanya, sehingga dapat diindikasikan bahwa pada model terbaik ini tidak terjadi masalah multikolinieritas. Cara lain untuk mendeteksi adanya multikolinieritas bisa juga dengan menguji koefisien korelasi antar variabel independen, sebagai aturan main (rule of thumb), jika koefisien korelasi antar variabel bebasnya diatas 0,85 maka kita dapat duga adanya multikolinieritas dalam model, sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah maka kita duga model tidak mengandung unsur multikolinieritas (Widarjono, 2007:114).

Tabel 5.4 Matriks Koefisien Korelasi Antar Variabel Bebas Model Penduduk Miskin Sulawesi Utara Tahun 2005 - 2008

	SMA?	MSHKB?	AIR?	BKNMKN?
SMA?	-	0.000857	-0.000262	-0.000904
MSHKB?	0.000857	-	-7.58E-06	0.000653
AIR?	-0.000262	-7.58E-06	-	0.000704
BKNMKN?	-0.000904	0.000653	0.000704	-

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai koefisien korelasinya antar variabel bebas relatif rendah, tidak ada yang melebihi dari rule of thumb 0,85 seperti yang diisyaratkan oleh Widarjono (2007), sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik ini tidak mengandung unsur multikolinieritas.

- Untuk melihat apakah variabel gangguan di dalam model mempunyai varian yang tidak konstan dapat digunakan uji heteroskedastisitas. Dengan adanya heteroskedastisitas, estimator regresi tidak menghasilkan estimator yang Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) hanya Linier Unbiased Estimator (LUE), sehingga dapat menyebabkan perhitungan standard error metode regresi tidak lagi bisa dipercaya. Untuk mendeteksinya digunakan metode uji White yaitu didasarkan pada jumlah sampel (n) dikalikan R^2 yang akan mengikuti

distribusi chi-squares dengan degree of freedom sebanyak variabel independen tidak termasuk konstanta dalam regresi auxiliary. Jika nilai chi-square hitung ($n \cdot R^2$) lebih besar dari nilai X^2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu (α) maka ada heteroskedastisitas dan sebaliknya jika chi-square hitung lebih kecil dari nilai X^2 kritis menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas (Widarjono, 2007:127-129 dan 140). Selain itu kita dapat mengkonstantakan residual pada koefisien regresinya dengan bantuan program bantu software eviews 6 dan apabila ada perbedaan hasil sebelum dan sesudahnya maka hal ini menunjukkan adanya heteroskedastisitas di dalam model (Nachrowi, 2006:336). Hasil output yang didapatkan dari model penduduk miskin terlihat bahwa nilai chi-square hitung (7,875) lebih kecil dibandingkan nilai X^2 kritis (14,0671). Selain itu dengan bantuan program eviews, ternyata dikonstantkannya residual tidak memberikan perbedaan pada koefisien regresi, tetapi standard error koefisien memang menjadi sedikit lebih rendah. Ini sekaligus menunjukkan bahwa heteroskedastisitas sesungguhnya tidak ada pada data awal.

- Pengujian selanjutnya adalah dengan melihat ada atau tidaknya autokorelasi. Untuk mendeteksinya dapat digunakan metode Durbin Watson (DW), dimana nilai DW ini akan terlihat dari hasil output dan menurut rule of thumb nilainya harus lebih besar dari 1,9. Namun menurut Nachrowi (2006:334) bahwa sesungguhnya metode efek tetap tidak mensyaratkan persamaan bebas dari autokorelasi, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa data panel dengan metode fixed effect bebas autokorelasi. Tetapi agar lebih jelasnya terlihat pada tabel 5.3 bahwa di dalam model terbaik ini nilai DW adalah sebesar 2,779, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini bebas dari autokorelasi.

Analisis lebih lanjut mengenai masing-masing pengujian dijelaskan sebagai berikut :

- $C = 38,126$ artinya persentase penduduk miskin akan sebesar 38,126% jika variabel-variabel bebasnya dalam penelitian ini yang mempengaruhinya sama dengan 0.

- SMA = -0,243 artinya bila persentase penduduk berusia 10 tahun keatas tamat SMA/Umum per kabupaten / kota naik 1%, maka akan berkontribusi menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0,243%.
- MSHKB = -0,03 artinya jika persentase persentase wanita 15-49 Tahun berstatus kawin yg masih menggunakan alat KB naik 1%, maka akan berkontribusi menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0,03%.
- AIR = -0,034 artinya jika persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih turun 1%, maka akan berkontribusi menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0,034%.
- BKNMKN = -0,438 artinya jika persentase rata-rata pengeluaran/kapita/bulan penduduk menurut konsumsi bukan makanan naik 1%, maka akan berkontribusi menurunkan penduduk miskin sebesar 0,438%.
- Variabel-variabel dari cross section (*Fixed Effect-Cross*) menyatakan bahwa saat persentase penduduk miskin sebesar 38,126% cateris paribus maka pengaruhnya terhadap kabupaten/kota masing-masing adalah yang paling besar di kota Bitung sebesar 2,64%, kota Manado sebesar 2,41%, kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 1,59%, kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 0,84%, Kabupaten Minahasa Utara sebesar 0,066%, kabupaten Minahasa sebesar 0,23%, kota Tomohon sebesar -0,715%, kabupaten Minahasa Selatan sebesar -3,34% dan terakhir di kabupaten Bolaang Mongondow sebesar -3,72%.

Secara ekonomi, persamaan diatas tidak ditemukan masalah karena arah dan pengaruh yang sesuai dengan teori. Hasil regresi dari model terbaik ini pada tabel 5.3 tidak ditemukan adanya masalah bila dikaitkan dengan kriteria statistika melalui uji-t dan uji-F maupun kriteria ekonometrika. Seluruh variabel yang ada di dalam model terbaik diatas memiliki t-hitung yang lebih kecil untuk taraf keyakinan 5%. Secara keseluruhan, Uji-F memperlihatkan angka sebesar 21,455 sedangkan nilai dari F-tabel sebesar 2,36. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas pada model persentase penduduk miskin secara bersama-sama signifikan mempengaruhi penduduk miskin untuk taraf nyata 5%. Kemudian untuk pengujian kriteria ekonometrika hasilnya tidak ditemukan adanya

pelanggaran kriteria baik dari Multikolinieritas, Heteroskedastisitas dan Autokorelasi sehingga model ini dinyatakan memenuhi syarat dari BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

1.1.4 Hasil Estimasi Regresi Kedalaman Kemiskinan (P1)

Di dalam melakukan regresi data panel, diperlukan perhitungan untuk mengetahui metode yang terbaik dalam melakukan estimasi regresi dari model kedalaman kemiskinan. Untuk itu diperlukan dua uji untuk mengetahuinya yaitu Uji Chi-Kuadrat, yang membandingkan metode kuadrat terkecil (*pooled least square*) dengan metode efek tetap (*fixed effect*). Kemudian bila terpilih metode efek tetap, maka akan dilakukan uji Hausman (*Hausman Test*) yang membandingkan metode efek tetap (*fixed effect*) dengan metode efek acak (*random effect*).

Untuk pengujian 2 metode tersebut diatas untuk model kedalaman kemiskinan, maka digunakanlah program bantu yaitu software Eviews 6. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

Pertanyaannya adalah apakah pada model fixed effect (*cross-section*)-nya berbeda atau tidak berbeda (model Pool). Pengujian yang dilakukan menggunakan Chi-Kuadrat, yaitu:

H_0 : model mengikuti Pool

H_1 : model mengikuti Fixed

Tabel 5.5 Hasil Uji Chi-Kuadrat Model Kedalaman Kemiskinan Propinsi Sulawesi Utara

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: POVERTYSULUT
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.859316	(8,20)	0.0002
Cross-section Chi-square	47.522932	8	0.0000

Dari tabel 5.5 terlihat hasil yang menunjukkan baik F test maupun Chi-square signifikan (p-value 0,0002 dan 0,0000 lebih kecil dari 5%) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka model mengikuti Fixed Effect.

Selanjutnya kita coba estimasi Model Random Effect. Pengujian yang dilakukan menggunakan Hausman test, yaitu:

H_0 : model mengikuti Random Effect

H_1 : model mengikuti Fixed Effect

Tabel 5.6 Hasil Uji Hausman Model Kedalaman Kemiskinan Propinsi Sulawesi Utara

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: POVERTYSULUT
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.993189	7	0.0252

Berdasarkan tabel 5.6 hasil pengujian tersebut signifikan (p-value 0,025 kurang dari 5%), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, model mengikuti Fixed Effect.

Kemudian dengan menggunakan program software Eviews 6, dan menggunakan metode Fixed Effect dilakukan proses untuk mendapatkan variabel-variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kedalaman kemiskinan penduduk miskin, maka hasil awal estimasi regresi model kedalaman kemiskinan (P1) untuk seluruh kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Utara tampak sebagai berikut :

**Tabel 5.7 Hasil Estimasi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2008**

VARIABEL INDEPENDEN	MODEL P1	
	FULL MODEL	BEST MODEL
(Constant)	5,495 (1,001)	5,474 (9,402)
SMA	-0,051 (-2,425)	-0,049 (-5,398)
PGGRN	-0,001 (-0,174)	-
KLHSKT	0,003 (0,351)	-
MSHKB	-0,004 (-1,046)	-0,005 (-6,784)
AIR	-0,003 (-0,553)	-
BKNMKN	0,04 (-1,191)	-0,05 (-4,852)
APBD	-0,0132 (-0,075)	-
Adj- R ²	0,84	0,861
F-stat	13,28	20,731
Prob (F-stat)	0,000	0,000
DW	3,29	3,23
F tabel / T tabel	2,36 / 2,045	
α	5%	

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 5.7 model awal dengan menggunakan metode data panel fixed effect didapatkan bahwa :

- Berdasarkan pengujian koefisien regresi secara parsial yaitu uji-t bisa dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistic dengan t-tabel (pada taraf $\alpha = 5\%$ yaitu 2,045) maupun dengan membandingkan nilai Probabilitas dengan $\alpha = 5\%$. Output menunjukkan bahwa nilai t-statistic untuk masing-masing koefisien regresi ada yang lebih dan ada yang kurang dari t-tabel = 2,045. Ternyata hanya ada 1 variabel yaitu SMA yang mempunyai nilai lebih dari t-tabel dan nilai probabilitasnya juga mempunyai nilai kurang dari $\alpha = 5\%$ (0,05), sehingga variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kedalaman kemiskinan.
- Pengujian model secara Overall (uji-F) bisa dilakukan dengan membandingkan nilai F-statistik dengan F-tabel (pada taraf $\alpha = 5\%$ dan diperoleh F-tabel = 2,36) atau membandingkan nilai probabilitas (F-stat)

dengan $\alpha = 5\%$. Berdasarkan output nilai F-stat (yaitu 13,28) jauh lebih besar dari F-tabel. Begitu juga nilai Probabilitas (F-stat) nya jauh lebih kecil dibandingkan $\alpha = 5\%$. Artinya bahwa secara keseluruhan model berpengaruh secara signifikan menjelaskan tingkat kedalaman kemiskinan.

- Uji kelayakan model dapat dilakukan dengan melihat nilai R^2 -adj. Dari output diperoleh nilai R^2 -adj sebesar 0,84 yang berarti proporsi keragaman tingkat kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen sebesar 84% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.
- Hasil estimasi regresi dari koefisien masing-masing variabel yang diperoleh juga ternyata ada beberapa tidak sesuai dengan hipotesis tanda yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana variabel PGGRN seharusnya bertanda positif. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya kondisi ini merupakan salah satu indikasi adanya multikolinearitas dan juga dapat dilihat dari tingginya R^2 -adj diiringi dengan banyaknya variabel yang tidak signifikan, sehingga hasil estimasi model ini tidak dapat dipergunakan.

Selanjutnya sesuai dengan analisis model yang pertama, maka dicarilah model yang kedua ini dengan beberapa variabel yang dikeluarkan dari model dengan pertimbangan bahwa hasil pengujian secara parsial (uji-t) menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kedalaman kemiskinan. Variabel-variabel yang dikeluarkan dari model itu adalah PGGRN, KLHSKT, AIR dan APBD. Selanjutnya, untuk mencari model terbaik pada kedalaman kemiskinan (P_1), selain membuang variabel-variabel yang tidak signifikan juga memperhatikan hipotesis tanda dari masing-masing variabel serta dengan bantuan program eviews akan melakukan pilihan untuk mengkonstantakan residual agar tidak terjadi heteroskedastisitas (Nachrowi, 2006, hal 336).

Adapun model terbaik yang didapat dari tabel 5.7 dengan menggunakan metode efek tetap dengan tingkat keyakinan sebesar 5% untuk P_1 ini adalah :

- Berdasarkan pengujian koefisien regresi secara parsial yaitu uji-t bisa dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistic dengan t-tabel (pada taraf $\alpha = 5\%$ yaitu 2,045) maupun dengan membandingkan nilai Probabilitas dengan

$\alpha = 5\%$. Output menunjukkan bahwa nilai t-statistic untuk masing-masing koefisien regresi bernilai lebih dari t-tabel (yaitu 2,045) dan ternyata ada 3 variabel yaitu SMA, MSHKB dan BKNMKN mempunyai nilai lebih besar dari t-tabel dan nilai probabilitasnya juga mempunyai nilai kurang dari $\alpha = 5\%$ (0,05), sehingga variabel-variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap model kedalaman kemiskinan. Sedangkan 4 variabel lainnya yaitu PGGRN, KLHST, AIR dan APBD tidak berpengaruh secara signifikan sehingga tidak dimasukkan ke dalam model.

- Pengujian model secara Overall (uji-F) bisa dilakukan dengan membandingkan nilai F-statistik dengan F-tabel (pada taraf $\alpha = 5\%$ dan diperoleh F-tabel = 2,36) atau membandingkan nilai probabilitas (F-stat) dengan $\alpha = 5\%$. Berdasarkan output nilai F-stat (yaitu 20,731) jauh lebih besar dari F-tabel (2,36). Begitu juga nilai Probabilitas (F-stat) nya yaitu 0,000 jauh lebih kecil dibandingkan $\alpha = 5\%$ (0,5). Artinya bahwa secara keseluruhan model berpengaruh secara signifikan menjelaskan kedalaman kemiskinan.
- Uji kelayakan model dapat dilakukan dengan melihat nilai R^2 -adj. Dari output diperoleh nilai R^2 -adj sebesar 0,8611 yang berarti proporsi keragaman tingkat kedalaman kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen sebesar 86,11% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.
- Hasil estimasi regresi dari koefisien dari 3 variabel ini mempunyai tanda yang sesuai dengan hipotesis teori yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana ketiga variabel terbaik ini bertanda negatif.
- Untuk melihat ada atau tidaknya hubungan linier antara variabel independen maka diperlukan adanya Uji multikolinearitas.

Tabel 5.8 Matriks Koefisien Korelasi Antar Variabel Bebas Model Kedalaman Kemiskinan Sulawesi Utara Tahun 2005 - 2008

	SMA?	MSHKB?	BKNMKN?
SMA?	-	6.43E-06	4.62E-05
MSHKB?	6.43E-06	-	-7.69E-08
BKNMKN?	4.62E-05	-7.69E-08	-

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai koefisien korelasinya antar variabel bebas relatif rendah, tidak ada yang melebihi dari rule of thumb 0,85 seperti yang diisyaratkan oleh Widarjono (2007), sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik ini tidak mengandung unsur multikolinieritas.

- Untuk melihat apakah variabel gangguan di dalam model mempunyai varian yang tidak kosntan dapat digunakan uji heteroskedastisitas. Hasil output yang didapatkan dari model kedalaman kemiskinan terlihat bahwa nilai chi-square hitung (7,749) lebih kecil dibandingkan nilai X^2 kritis (14,0671). Selain itu dengan bantuan program eviews, ternyata dikonstankannya residual tidak memberikan perbedaan pada koefisien regresi, tetapi standard error koefisien memang menjadi sedikit lebih rendah (lihat lampiran). Ini sekaligus menunjukkan bahwa heteroskedastisitas sesungguhnya tidak ada pada data awal.
- Pengujian selanjutnya adalah dengan melih ada ada atau tidaknya autokorelasi. Menurut Nachrowi (2006:334) bahwa sesungguhnya metode efek tetap tidak mensyaratkan persamaan bebas dari autokorelasi, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa data panel dengan metode fixed effect bebas autokorelasi. Tetapi agar lebih jelasnya terlihat pada tabel 5.7 bahwa di dalam model terbaik ini nilai DW adalah sebesar 3,239, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini bebas dari autokorelasi.

Analisis lebih lanjut mengenai masing-masing pengujian dijelaskan sebagai berikut :

- $C = 5,474$ artinya tingkat kedalaman kemiskinan akan sebesar 5,474 jika variabel-variabel bebasnya dalam penelitian ini yang mempengaruhinya sama dengan 0.
- $SMA = -0,049$ artinya bila persentase penduduk berusia 10 tahun keatas tamat SMA/Umum per kabupaten / kota naik 1%, maka akan berkontribusi menurunkan tingkat kedalaman kemiskinan sebesar 0,049%.
- $MSHKB = -0,005$ artinya jika persentase persentase wanita 15-49 Tahun berstatus kawin yg masih menggunakan alat KB naik 1%, maka akan berkontribusi menurunkan tingkat kedalaman kemiskinan sebesar 0,005%.

- BKNMKN = -0,05 artinya jika persentase rata-rata pengeluaran/kapita/bulan penduduk menurut konsumsi bukan makanan naik 1%, maka akan berkontribusi menurunkan tingkat kedalaman kemiskinan sebesar 0,05%.
- Variabel-variabel dari cross section (*Fixed Effect-Cross*) menyatakan bahwa saat tingkat kedalaman kemiskinan sebesar 5,474% ceteris paribus maka pengaruhnya terhadap kabupaten/kota masing-masing adalah yang paling besar di kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 0,62%, kota Bitung sebesar 0,52%, kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 0,45%, kota Manado sebesar 0,11%, kabupaten Minahasa sebesar 0,005%, Kabupaten Minahasa Utara sebesar -0,14%, kabupaten Minahasa Selatan sebesar -3,38%, kota Tomohon sebesar -0,478% dan terakhir di kabupaten Bolaang Mongondow sebesar -0,719%.

Secara ekonomi, persamaan diatas tidak ditemukan masalah karena arah dan pengaruh yang sesuai dengan teori. Hasil regresi dari model terbaik ini pada tabel 5.3 tidak ditemukan adanya masalah bila dikaitkan dengan kriteria statistika melalui uji-t dan uji-F maupun kriteria ekonometrika. Seluruh variabel yang ada di dalam model terbaik diatas memiliki t-hitung yang lebih kecil untuk taraf keyakinan 5%. Secara keseluruhan, Uji-F memperlihatkan angka sebesar 20,73 sedangkan nilai dari F-tabel sebesar 2,36. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas pada model kedalaman kemiskinan secara bersama-sama signifikan mempengaruhi tingkat kedalaman kemiskinan dengan taraf nyata 5%. Kemudian untuk pengujian kriteria ekonometrika hasilnya tidak ditemukan adanya pelanggaran kriteria baik dari Multikolinieritas, Heteroskedastisitas dan Autokorelasi sehingga model ini dinyatakan memenuhi syarat dari BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

1.1.5 Hasil Estimasi Regresi Keperahan Kemiskinan (P2)

Di dalam melakukan regresi data panel, diperlukan perhitungan untuk mengetahui metode yang terbaik dalam melakukan estimasi regresi dari model keparahan kemiskinan. Untuk itu diperlukan dua uji untuk mengetahuinya yaitu Uji Chi-Kuadrat, yang membandingkan metode kuadrat terkecil (*pooled least*

square) dengan metode efek tetap (*fixed effect*). Kemudian bila terpilih metode efek tetap, maka akan dilakukan uji Hausman (*Hausman Test*) yang membandingkan metode efek tetap (*fixed effect*) dengan metode efek acak (*random effect*).

Untuk pengujian 2 metode tersebut diatas untuk model keparahan kemiskinan, maka digunakanlah program bantu yaitu software Eviews 6. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

Pertanyaannya adalah apakah pada model fixed effect (*cross-section*)-nya berbeda atau tidak berbeda (model Pool). Pengujian yang dilakukan menggunakan Chi-Kuadrat, yaitu:

H_0 : model mengikuti Pool

H_1 : model mengikuti Fixed

Tabel 5.9 Hasil Uji Chi-Kuadrat Keparahan Kemiskinan Propinsi Sulawesi Utara

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: POVERTYSULUT			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.641703	(8,20)	0.0090
Cross-section Chi-square	32.357209	8	0.0001

Dari tabel 5.9 terlihat hasil yang menunjukkan baik F test maupun Chi-square signifikan (p-value 0,009 dan 0,0001 lebih kecil dari 5%) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka model mengikuti Fixed Effect.

Selanjutnya kita coba estimasi Model Random Effect. Pengujian yang dilakukan menggunakan Hausman test, yaitu:

H_0 : model mengikuti Random Effect

H_1 : model mengikuti Fixed Effect

Tabel 5.10 Hasil Uji Hausman Keparahan Kemiskinan Propinsi Sulawesi Utara

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: POVERTYSULUT
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.208552	7	0.0334

Berdasarkan tabel 5.10 hasil pengujian tersebut signifikan (p-value 0,03 kurang dari 5%), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, model mengikuti Fixed Effect.

Tabel 5.11 Hasil Estimasi Keparahan Kemiskinan (P2) Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2008

VARIABEL INDEPENDEN	MODEL P2	
	FULL MODEL	BEST MODEL
(Constant)	1,458 (0,627)	1,371 (10,796)
SMA	-0,015 (-1,71)	-0,0156 (-6,6226)
PGGRN	0,00008 (0,0206)	-
KLHSKT	0,001 (0,263)	-
MSHKB	-0,001 (-0,9134)	-0,0018 (-6,3826)
AIR	-0,0003 (-0,1173)	-
BKNMKN	-0,0085 (-0,5914)	-0,0091 (-4,0158)
APBD	-0,0058 (-0,0779)	-
Adj- R ²	0,7057	0,753
F-stat	6,595	10,722
Prob (F-stat)	0,000078	0,000
DW	3,21	3,184
F tabel / T tabel	2,36 / 2,045	
α	5%	

Kemudian dengan menggunakan program software Eviews 6, dan menggunakan metode Fixed Effect dilakukan proses untuk mendapatkan variabel-

variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kedalaman kemiskinan penduduk miskin, maka hasil awal estimasi regresi model keparahan kemiskinan (P2) untuk seluruh kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Utara tampak pada tabel 5.11.

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 5.11 model awal dengan menggunakan metode data panel fixed effect didapatkan bahwa :

- Berdasarkan pengujian koefisien regresi secara parsial yaitu uji-t bisa dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistic dengan t-tabel (pada taraf $\alpha = 5\%$ yaitu 2,045) maupun dengan membandingkan nilai Probabilitas dengan $\alpha = 5\%$. Output menunjukkan bahwa nilai t-statistic untuk masing-masing koefisien regresi ada yang lebih dan ada yang kurang dari t-tabel = 2,045. Ternyata tidak ada satupun variabel yang mempunyai nilai lebih dari t-tabel dan nilai probabilitasnya juga mempunyai nilai kurang dari $\alpha = 5\%$ (0,05), sehingga tidak ada variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat keparahan kemiskinan.
- Pengujian model secara Overall (uji-F) bisa dilakukan dengan membandingkan nilai F-statistik dengan F-tabel (pada taraf $\alpha = 5\%$ dan diperoleh F-tabel = 2,36) atau membandingkan nilai probabilitas (F-stat) dengan $\alpha = 5\%$. Berdasarkan output nilai F-stat (yaitu 6,59) jauh lebih besar dari F-tabel. Begitu juga nilai Probabilitas (F-stat) nya 0,000078 jauh lebih kecil dibandingkan $\alpha = 5\%$. Artinya bahwa secara keseluruhan model berpengaruh secara signifikan menjelaskan tingkat keparahan kemiskinan.
- Uji kelayakan model dapat dilakukan dengan melihat nilai R^2 -adj. Dari output diperoleh nilai R^2 -adj sebesar 0,7057 yang berarti proporsi keragaman tingkat kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen sebesar 70,57% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.
- Hasil estimasi regresi dari koefisien masing-masing variabel yang diperoleh juga ternyata tidak ada variabel yang tidak sesuai dengan hipotesis tanda yang telah dijelaskan sebelumnya.

Selanjutnya sesuai dengan analisis model yang pertama , maka dicarilah model yang kedua ini dengan beberapa variabel yang dikeluarkan dari model dengan pertimbangan bahwa hasil pengujian secara parsial (uji-t) menunjukkan

bahwa variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat keparahan kemiskinan. Variabel-variabel yang dikeluarkan dari model adalah PGGRN, KLHST, AIR dan APBD. Selanjutnya, untuk mencari model terbaik pada keparahan kemiskinan (P₂), selain membuang variabel-variabel yang tidak signifikan juga memperhatikan hipotesis tanda dari masing-masing variabel serta dengan bantuan program eviews akan melakukan pilihan untuk mengkonstantakan residual agar tidak terjadi heteroskedastisitas (Nachrowi, 2006, hal 336).

Adapun model terbaik yang didapat dari tabel 5.11 dengan menggunakan metode efek tetap dengan tingkat keyakinan sebesar 5% untuk P₂ ini adalah :

- Berdasarkan pengujian koefisien regresi secara parsial yaitu uji-t bisa dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistic dengan t-tabel (pada taraf $\alpha = 5\%$ yaitu 2,045) maupun dengan membandingkan nilai Probabilitas dengan $\alpha = 5\%$. Output menunjukkan bahwa nilai t-statistic untuk masing-masing koefisien regresi bernilai lebih dari t-tabel (yaitu 2,045) dan ternyata ada 3 variabel yaitu SMA, MSHKB dan BKNMKN mempunyai nilai lebih besar dari t-tabel dan nilai probabilitasnya juga mempunyai nilai kurang dari $\alpha = 5\%$ (0,05), sehingga variabel-variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap model keparahan kemiskinan. Sedangkan 4 variabel lainnya yaitu PGGRN, KLHST, AIR dan APBD tidak berpengaruh secara signifikan sehingga tidak dimasukkan ke dalam model.
- Pengujian model secara Overall (uji-F) bisa dilakukan dengan membandingkan nilai F-statistik dengan F-tabel (pada taraf $\alpha = 5\%$ dan diperoleh F-tabel = 2,36) atau membandingkan nilai probabilitas (F-stat) dengan $\alpha = 5\%$. Berdasarkan output nilai F-stat (yaitu 10,722) jauh lebih besar dari F-tabel (2,36). Begitu juga nilai Probabilitas (F-stat) nya yaitu 0,000001 jauh lebih kecil dibandingkan $\alpha = 5\%$ (0,5). Artinya bahwa secara keseluruhan model berpengaruh secara signifikan menjelaskan keparahan kemiskinan.
- Uji kelayakan model dapat dilakukan dengan melihat nilai R²-adj. Dari output diperoleh nilai R²-adj sebesar 0,7534 yang berarti proporsi keragaman tingkat keparahan kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen sebesar 75,34% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

- Hasil estimasi regresi dari koefisien dari 3 variabel ini mempunyai tanda yang sesuai dengan hipotesis teori yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana ketiga variabel terbaik ini bertanda negatif.
- Untuk melihat ada atau tidaknya hubungan linier antara variabel independen maka diperlukan adanya Uji multikolinearitas.

Tabel 5.12 Matriks Koefisien Korelasi Antar Variabel Bebas Model Keparahan Kemiskinan Sulawesi Utara Tahun 2005 - 2008

	SMA?	MSHKB?	BKNMKN?
SMA?	-	6.79E-07	1.04E-06
MSHKB?	6.79E-07	-	-6.13E-09
BKNMKN?	1.04E-06	-6.13E-09	-

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai koefisien korelasinya antar variabel bebas relatif rendah, tidak ada yang melebihi dari rule of thumb 0,85 seperti yang diisyaratkan oleh Widarjono (2007), sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik ini tidak mengandung unsur multikolinieritas.

- Untuk melihat apakah variabel gangguan di dalam model mempunyai varian yang tidak kosntan dapat digunakan uji heteroskedastisitas. Hasil output yang didapatkan dari model kedalaman kemiskinan terlihat bahwa nilai chi-square hitung (6,78) lebih kecil dibandingkan nilai X^2 kritis (14,0671). Selain itu dengan bantuan program eviews, ternyata dikonstankannya residual tidak memberikan perbedaan pada koefisien regresi, tetapi standard error koefisien memang menjadi sedikit lebih rendah (lihat lampiran). Ini sekaligus menunjukkan bahwa heteroskedastisitas sesungguhnya tidak ada pada data awal.
- Pengujian selanjutnya adalah dengan melih ada ada atau tidaknya autokorelasi. Menurut Nachrowi (2006:334) bahwa sesungguhnya metode efek tetap tidak mensyaratkan persamaan bebas dari atuokorelasi, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa data panel dengan metode fixed effect bebas autokorelasi. Tetapi agar lebih jelasnya terlihat pada tabel 5.11 bahwa di

dalam model terbaik ini nilai DW adalah sebesar 3,184, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini bebas dari autokorelasi.

Analisis lebih lanjut mengenai masing-masing pengujian dijelaskan sebagai berikut :

- $C = 1,371$ artinya tingkat keparahan kemiskinan akan sebesar 1,371 jika variabel-variabel bebasnya dalam penelitian ini yang mempengaruhinya sama dengan 0.
- $SMA = -0,0156$ artinya bila persentase penduduk berusia 10 tahun keatas tamat SMA/Umum per kabupaten / kota naik 1%, maka akan berkontribusi menurunkan tingkat keparahan kemiskinan penduduk miskin sebesar 0,0156%.
- $MSHKB = -0,0018$ artinya jika persentase persentase wanita 15-49 Tahun berstatus kawin yg masih menggunakan alat KB naik 1%, maka akan berkontribusi menurunkan tingkat keparahan kemiskinan penduduk miskin sebesar 0,0018%.
- $BKNMKN = -0,0091$ artinya jika persentase rata-rata pengeluaran/kapita/bulan penduduk menurut konsumsi bukan makanan naik 1%, maka akan berkontribusi menurunkan tingkat keparahan kemiskinan sebesar 0,0091%.
- Variabel-variabel dari cross section (*Fixed Effect-Cross*) menyatakan bahwa saat tingkat keparahan kemiskinan sebesar 1,371 cateris paribus maka pengaruhnya terhadap kabupaten/kota masing-masing adalah yang paling besar di kota Bitung sebesar 0,183 , kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 0,175 , kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 0,145 , kabupaten Minahasa sebesar 0,0067 , kota Manado sebesar 0,00052 , kabupaten Minahasa Selatan sebesar -0,036 , Kabupaten Minahasa Utara sebesar -0,065 , kota Tomohon sebesar -0,184 dan terakhir di kabupaten Bolaang Mongondow sebesar -0,225.

Secara ekonomi, persamaan diatas tidak ditemukan masalah karena arah dan pengaruh yang sesuai dengan teori. Hasil regresi dari model terbaik ini pada tabel

5.3 tidak ditemukan adanya masalah bila dikaitkan dengan kriteria statistika melalui uji-t dan uji-F maupun kriteria ekonometrika. Seluruh variabel yang ada di dalam model terbaik diatas memiliki t-hitung yang lebih kecil untuk taraf keyakinan 5%. Secara keseluruhan, Uji-F memperlihatkan angka sebesar 10,72 sedangkan nilai dari F-tabel sebesar 2,36. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas pada model keparahan kemiskinan secara bersama-sama signifikan mempengaruhi tingkat keparahan kemiskinan dengan taraf nyata 5%. Kemudian untuk pengujian kriteria ekonometrika hasilnya tidak ditemukan adanya pelanggaran kriteria baik dari Multikolinieritas, Heteroskedastisitas dan Autokorelasi sehingga model ini dinyatakan memenuhi syarat dari BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

1.2 Analisa Hasil Regresi dan Implikasi Kebijakan

Hasil regresi pada model persentase penduduk miskin (P0), tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (P2) memperlihatkan bahwa dari tujuh variabel yang diteliti hanya terdapat 3 sampai 4 variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap variabel terikatnya.

1. Untuk model **persentase penduduk miskin (P0)**, hanya Indikator **Pendidikan** yang diproxy dari variabel persentase penduduk berusia 10 tahun keatas tamat SMA/Umum (SMA), Indikator **Fertilitas** yang diproxy dari persentase wanita berumur 15 – 49 tahun berstatus kawin yang masih ikut keluarga berencana (MSHKB), Indikator **Perumahan** yang diproxy dari persentase rumah tangga menggunakan air bersih (AIR) dan Indikator **Taraf Pola Konsumsi** yang diproxy dari persentase pengeluaran/kapita/bulan penduduk menurut konsumsi bukan makanan (BKNMKN). Keempat Indikator ini secara signifikan berpengaruh terhadap perubahan dari jumlah penduduk miskin.
2. Untuk model **tingkat kedalaman kemiskinan (P1)** yaitu Indikator **Pendidikan** yang diproxy dari persentase penduduk berusia 10 tahun keatas tamat SMA/Umum (SMA), Indikator **Fertilitas** yang diproxy dari persentase wanita berumur 15 – 49 tahun berstatus kawin yang masih ikut keluarga berencana (MSHKB), dan Indikator **Taraf Pola Konsumsi** yang diproxy dari

persentase pengeluaran/kapita/bulan penduduk menurut konsumsi bukan makanan (BKNMKN). Ketiga Indikator ini yang secara signifikan berpengaruh terhadap perubahan tingkat kedalaman kemiskinannya.

3. Untuk model tingkat keparahan kemiskinan (P2) yaitu Indikator **Pendidikan** yang diproxy dari persentase penduduk berusia 10 tahun keatas tamat SMA/Umum (SMA), Indikator **Fertilitas** yang diproxy dari persentase wanita berumur 15 – 49 tahun berstatus kawin yang masih ikut keluarga berencana (MSHKB), dan Indikator **Taraf Pola Konsumsi** yang diproxy dari persentase pengeluaran/kapita/bulan penduduk menurut konsumsi bukan makanan (BKNMKN). Ketiga Indikator ini yang secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat keparahan kemiskinannya.

Secara keseluruhan ketiga model diatas yaitu P0, P1 dan P2 memiliki 3 Indikator yang sama-sama berpengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu Indikator **Pendidikan**, Indikator **Fertilitas** dan Indikator **Taraf Pola Konsumsi**. Sedangkan khusus untuk model persentase penduduk miskin (P0) ditambah dengan Indikator **Perumahan** yang pengaruhnya secara signifikan pada perubahan jumlah penduduk miskin saja.

Yang menarik untuk dicatat bahwa variabel **Pengeluaran Pemerintah** pada APBD per kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang diharapkan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan ternyata tidak mempunyai pengaruh secara signifikan untuk mengurangi kemiskinan walaupun pada awalnya di model kedalaman dan keparahan kemiskinan nampak memiliki pengaruh tetapi setelah dilakukan perbaikan-perbaikan pada model akhirnya nilai uji-t variabel ini menjadi lebih besar persentase tingkat keyakinannya yang mengakibatkan variabel ini harus terlempar keluar dari model, walaupun juga variabel ini sudah diberi log namun hasil yang didapat juga hampir sama tidak dapat membantu, sehingga variabel ini terpaksa harus keluar dari model. Selain itu bila diperhatikan sebenarnya variabel APBD ini mempunyai hubungan korelasi yang positif terhadap tingkat kemiskinan namun arahnya yang berbeda dan juga terlihat bahwa variabel-variabel lainnya yang tidak masuk ke dalam model seperti variabel

PGGRN, KLHST dan AIR diindikasikan mempunyai korelasi dengan variabel APBD walaupun tingkat korelasinya tidak terlalu besar.

Di era otonomi daerah/desentralisasi, penanggulangan kemiskinan akan sangat bergantung juga pada peran pemerintah daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan sejalan dengan kemampuan keuangannya, pemerintah daerah kini menjadi ujung tombak dalam menyediakan berbagai pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, penyediaan air minum dan sebagainya. Kapasitas fiskal pemerintah daerah dan prioritas alokasi anggaran dalam APBD akan menjadi indikasi sejauhmana keberpihakan dan komitmen pemerintah daerah terhadap penanggulangan kemiskinan / anggaran yang pro-poor (Hardojo, 2008:94).

Melihat hal ini, menarik disimak bahwa **Pengeluaran Pemerintah** yang diharapkan menjadi gerbong lokomotif untuk mengurangi penduduk miskin baik secara kuantitas dan kualitasnya tidak mampu untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap model dalam penelitian ini. Memang harus disadari juga bahwa data yang dipergunakan di dalam variabel pengeluaran pemerintah ini berasal dari sektor pengeluaran pembangunan (belanja langsung) pemerintah secara agregat yang masih bersifat makro belum terpetakan per sektornya, dimana hal ini yang menjadi kendala dalam memperoleh data. Namun analisis diatas dapat memberikan gambaran kita secara umum bahwa secara agregat pengeluaran pembangunan merupakan indikator yang menggambarkan keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan di dalam masyarakatnya dibandingkan dengan pembangunan di internal pemerintah sendiri (belanja tidak langsung/pengeluaran rutin). Pada kasus ini terlepas dari keterbatasan data yang ada, terlihat bahwa selang waktu antara 2005 sampai 2008 menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten / kota yang ada di propinsi Sulawesi Utara dan variabel ini hanya mampu untuk menjelaskan keterkaitannya diluar model yang ada di dalam penelitian ini, sehingga dapat diartikan bahwa APBD di seluruh kabupaten/kota di propinsi Sulawesi Utara tidak pro-poor atau tidak berpihak pada penanggulangan kemiskinan. Langkah yang terbaik adalah diperlukan adanya perbaikan yang mendasar dalam penyusunan alokasi dana

dalam pos pengeluaran pembangunan agar ke depannya dapat lebih mementingkan penanggulangan kemiskinan / anggaran yang pro poor.

Indikator **Pendidikan** yang mempunyai proxy di dalam penelitian ini yaitu persentase penduduk berusia 10 tahun keatas tamat SMA/Umum (SMA) menunjukkan hubungan negatif terhadap persentase penduduk miskin dan tingkat kedalaman serta keparahan kemiskinan. Berdasarkan pengamatan data per kabupaten / kota , secara rata-rata di hampir seluruh daerah otonom di Sulawesi Utara menunjukkan trend peningkatan dalam persentase penduduk berusia 10 tahun keatas tamat SMA/Umum (SMA) dan hal ini juga diperkuat dengan data persentase penduduk yang belum pernah sekolah secara rata-rata mengalami penurunan kecuali kabupaten kepulauan Sangihe dan kabupaten kepulauan Talaud yang mengalami peningkatan namun persentasenya hanya kurang 2% yaitu masing-masing di tahun 2008 sebesar 1,79% dan 1,58%. Hal lain yang mendukung perbaikan variabel pendidikan ini adalah dari variabel persentase penduduk yang buta huruf mengalami penurunan secara rata-rata. Tercatat pada tahun 2005 di seluruh kabupaten / kota di propinsi Sulawesi Utara persentase penduduk yang buta huruf yang tertinggi mencapai angka 2,39% di kabupaten Bolaang Mongondow namun di tahun 2008 angka tertinggi untuk persentase ini turun menjadi 1,33% yang terdapat pada kabupaten Bolaang Mongondow dan kabupaten kepulauan Sangihe. Selain itu variabel pendidikan ini dapat dilihat dari peringkat Indeks Pembangunan Manusia propinsi Sulawesi Utara dari tahun 2005 sampai tahun 2008 berada di peringkat kedua secara nasional dibawah DKI Jakarta. Melalui model penelitian ini terlihat bahwa variabel Pendidikan merupakan variabel yang secara signifikan dapat membantu memperbaiki tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara.

Kemudian untuk Indikator **Fertilitas** yang diwakili oleh variabel persentase wanita berumur 15 – 49 tahun berstatus kawin yang masih ikut keluarga berencana (MSHKB) per kabupaten / kota di propinsi Sulawesi Utara menunjukkan hubungan negatif dengan nilai koefisiennya sebesar 0,03% untuk model persentase penduduk miskin dan 0,005% untuk model tingkat kedalaman kemiskinan serta 0,0018% untuk model tingkat keparahan kemiskinan. Melalui variabel ini diharapkan dengan wanita yang sudah berkeluarga mengikuti program

keluarga berencana akan meningkatkan kualitas kehidupan keluarganya karena para wanita tersebut akan mempunyai waktu luang yang terencana karena menunda kelahiran yang akan digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif seperti mempunyai waktu untuk meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi ataupun mempunyai waktu untuk menambah ketrampilannya guna melakukan kegiatan usaha kecil untuk keluarga. Selain itu juga para ibu rumah tangga ini bisa melakukan perencanaan keuangan keluarga dengan menabung yang digunakan untuk mempersiapkan biaya kehidupan untuk kelahiran anaknya kelak yang sudah terencana sebelumnya. Dengan memperhatikan dari persentase masih KB terlihat adanya penurunan persentase walaupun masih signifikan, yang terlihat bahwa di seluruh kabupaten / kota pada tahun 2005 berkisar di angka antara 60% - 75% dan tetap konstan/stabil di tahun-tahun berikutnya, tetapi memasuki tahun 2008 seluruh kabupaten / kota mengalami penurunan yang tajam sampai di angka 19% - 31%. Hal ini dapat diartikan bahwa peran program keluarga berencana semakin berkurang di tahun-tahun mendatang sehingga momentum untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan menggunakan indikator ini akan menjadi berkurang.

Hal ini perlu adanya suatu kebijakan yang terencana agar penanganan program keluarga berencana dapat digalakkan kembali sehingga program keluarga berencana yang terbukti mempunyai pengaruh secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara. Kemungkinan yang ada mengapa penurunan terjadi karena lembaga yang mengurus keluarga berencana hanya efektif di tingkat pusat yaitu lembaga BKKBN sedangkan di daerah-daerah dengan adanya otonomi daerah sudah memotong jalur BKKBN ini hanya masuk di dalam sub dinas sosial saja, yang tentunya akan menjadi kendala dan hambatan di kemudian hari. Hal lain yang perlu juga menjadi perhatian adalah program posyandu yang dulunya rutin diadakan di seluruh pelosok-pelosok desa di tanah air, setelah adanya otonomi daerah menjadi terbengkalai alias tidak ada perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Tentunya hal ini juga menjadi salah satu alasan yang dapat mengurangi kualitas hidup masyarakat bawah, karena dengan adanya program posyandu dapat mengangkat kualitas hidup ibu dan balita, yang didalamnya sudah termasuk program perbaikan gizi balita dan pengontrolan

program keluarga berencana untuk para ibu. Diharapkan ke depannya, pemerintah di masing-masing daerah dapat memperhatikan indikator fertilitas ini karena dengan perbaikan kualitas fertilitas yaitu dengan menekan jumlah kelahiran pada suatu daerah akan berdampak besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan tingkat kelahiran yang rendah akan memberikan peluang yang semakin kecil bagi lahirnya bayi yang miskin dan semakin besar peluang adanya waktu yang digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif.

Selain itu juga perlu dilihat bahwa adanya kedekatan hubungan antara fertilitas dan kesehatan, karena dengan persentase wanita berumur 15 – 49 tahun berstatus kawin yang masih ikut keluarga berencana semakin membaik maka akan mencerminkan tingkat kesadaran akan kesehatan. Dengan anggota keluarga yang kecil pada setiap keluarga akan semakin meningkatkan alokasi dana kesehatan bagi masing-masing anggota keluarga. Dari argumen empiris menyebutkan bahwa penambahan penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin. Hal ini dikarenakan mereka akan menjadi korban atas penghematan negara yang terjadi akibat adanya pembatasan dana untuk program-program kesehatan dan pendidikan sehubungan dengan semakin tingginya jumlah penduduk. Sesuai dengan observasi dan data yang ada, persoalan kesehatan yang terjadi lapangan seperti mereka (masyarakat) yang termasuk kelompok keluarga miskin (gakin) seringkali direpotkan masalah biaya pelayanan kesehatan awal saat berhadapan di rumah sakit, bahwa terdapat enam kabupaten yang tidak semua masyarakat miskinnya terjangkau oleh askeskin, masyarakat miskin hanya mendapat pelayanan kesehatan umum/ dasar (Dinkes Sulut Online, 2010).

Kemudian, Indikator lainnya yang mendukung pengurangan tingkat kemiskinan adalah Indikator **Taraf dan Pola Konsumsi** yang diwakili oleh variabel persentase pengeluaran/kapita/bulan penduduk menurut konsumsi bukan makanan (BKNMKN). Variabel ini memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pengeluaran konsumsi penduduk non makanan maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya akan meningkat sehingga tingkat kemiskinan akan berkurang. Variabel ini memiliki nilai koefisien sebesar 0,03% untuk model persentase penduduk miskin dan 0,005% untuk tingkat kedalaman kemiskinan serta 0,0018% untuk tingkat

keparahan kemiskinan. Melalui variabel ini juga dapat diterangkan bahwa dengan peningkatan pola konsumsi non makanan memperlihatkan pendapatan masyarakat mengalami peningkatan sehingga masyarakat yang pola makanannya yang cenderung elastis akan mengalokasikan sisa pendapatannya yang bertambah tersebut selain menabung, ke hal-hal yang bersifat meningkatkan kualitas hidupnya seperti hiburan / rekreasi, barang sandang atau elektronik, sehingga inipun dapat memicu pada kenaikan *multiplier effect* pada sektor-sektor manufaktur yang tentunya berimbas kepada masyarakat lapisan bawah. Hal ini yang mengakibatkan masyarakat lapisan bawah tersebut mendapatkan penghasilan tambahan sehingga akan menaikkan tingkat kesejahteraannya.

Bila kita perhatikan pada tabel 4.16 persentase pengeluaran/kapita/bulan penduduk menurut konsumsi bukan makanan (**BKNMKN**) terlihat bahwa di hampir seluruh kabupaten / kota di Sulawesi Utara, pengeluaran penduduknya untuk konsumsi bukan makanan rata-rata 39,52% . Pada tahun 2005 kota Manado merupakan kota yang memiliki persentase pengeluaran bukan makanan tertinggi yaitu sebesar 48,23% terus mengalami peningkatan sebesar 51,62% di tahun 2006 namun terus menurun sampai di tahun 2008 menjadi 49,94%. Untuk daerah yang terendah persentase pengeluaran konsumsi bukan makanan di tahun 2005 adalah kabupaten Bolaang Mongondow sebesar 33,82% dan pada tahun 2008 persentase terendahnya ada pada kabupaten Minahasa Selatan sebesar 30,57%. Di kedua daerah ini yang merupakan daerah penghasil bahan makanan, hampir sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah pedesaan sehingga pola dan taraf konsumsi mereka masih terbatas sehingga kelebihan daripada pendapatan mereka banyak dipergunakan untuk keperluan pembelian sarana produksi pertanian yang lebih dominan bukan untuk hal-hal konsumtif lainnya.

Yang cukup menarik untuk diamati adalah hampir sebagian besar kabupaten/kota di Sulawesi Utara mengalami fluktuatif taraf pola konsumsi, dan kecenderungan mengalami penurunan trend dibandingkan pada tahun 2005 dengan 2008, hanya Kota Manado, Kota Tomohon dan Kota Bitung serta Kabupaten Bolaang Mongondow yang sedikit mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di pedesaan terutama di kabupaten lebih cenderung mengutamakan alokasi pendapatan mereka untuk mengkonsumsi bahan

kebutuhan pokok karena sejak tahun 2006 terjadi peningkatan harga pada kebutuhan pokok yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM dan juga adanya perubahan musim tanam dengan kemarau yang berkepanjangan yang berakibat mahalnya harga-harga kebutuhan pokok yang ada di pasar. Selain itu juga, karena adanya kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan penduduk di pedesaan yang hampir sebagian penduduk miskin dan bertani kesulitan memperoleh penghasilan karena ketidakpastiannya musim tanam. Tetapi di Kabupaten Bolaang Mongondow persentase Taraf Pola Konsumsi bukan makanan cukup baik cenderung bertolak belakang dengan kabupaten lainnya. Hal ini didukung oleh penghasilannya sebagai petani tidak mengalami penurunan karena di daerah tersebut memiliki sistem irigasi pertaniannya cukup baik sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan musim tanam / kemarau berkepanjangan dan mereka juga memperoleh berkah dengan meningkatnya pendapatan karena naiknya harga produk pertanian sehingga terlihat bahwa persentase Taraf Pola Konsumsi bukan makanan di tahun 2008 lebih besar dibandingkan tahun 2005. Sedangkan di daerah perkotaan, pola konsumsi bukan makanan mengalami trend peningkatan karena kebanyakan penduduknya adalah sebagai karyawan atau pegawai atau usahawan yang mempunyai pendapatan yang tetap cenderung meningkat dari tahun ke tahun sehingga tidak berpengaruh terhadap meningkatnya produk pertanian. Kecenderungan yang lainnya adalah bahwa penduduk di perkotaan sudah mempunyai pengetahuan tentang tabungan dan ekspektasi resiko yang harus dihadapi di depan sehingga mereka sudah lebih siap mengantisipasi apa yang akan terjadi.

Selain itu yang perlu diperhatikan secara umum/rata-rata di dalam variabel **Taraf dan Pola Konsumsi bukan makanan** di Sulawesi Utara pada tahun 2008, komponen yang paling besar kontribusinya adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga sekitar pada angka 40%-45% kemudian diikuti oleh komponen Barang dan Jasa (termasuk di dalamnya biaya kesehatan dan biaya pendidikan) sekitar 31%-33% dan barang tahan lama pada angka 10%-12% serta pakaian alas kaki sekitar 7%-8%, dan sisanya oleh barang-barang keperluan lainnya. Artinya adalah bahwa pengeluaran konsumsi penduduk untuk bahan, bukan makanan khususnya pada penduduk miskin dibelanjakan terutama untuk perumahan dan biaya

kesehatan serta biaya pendidikan. Hal ini menunjukkan ketiga komponen ini yang menjadi kunci untuk dapat menekan tingkat Taraf dan Pola Konsumsi, yang membuat penduduk terutama penduduk miskin tergerus pengeluarannya diluar bahan kebutuhan pokok.

Hal menarik lainnya bila kita cermati pada tabel 4.16 memperlihatkan bahwa di tahun 2007 terjadi penurunan secara signifikan pada Taraf Pola Konsumsi bukan makanan di hampir seluruh kabupaten/kota. Penurunan ini disebabkan oleh faktor inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar 10,13% yang merupakan angka tertinggi ketiga secara nasional pada tahun yang bersangkutan. Sumber-sumber tekanan inflasi Kota Manado berasal dari sisi permintaan, penawaran dan impor. Dari sisi permintaan, faktor seasonal berupa perayaan hari besar keagamaan (lebaran dan natal) serta Tahun Baru 2008 menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat khususnya untuk kelompok bahan makanan. Dari sisi penawaran, tekanan harga bersumber dari terganggunya pasokan beberapa komoditi antara lain beras, ikan dan bumbu-bumbuan serta belum berjalan baiknya proses konversi minyak tanah ke elpiji. Terganggunya pasokan beras antara lain disebabkan oleh pergeseran masa tanam dan panen yang mengakibatkan berkurangnya stock sedangkan terganggunya pasokan ikan dan bumbu-bumbuan, lebih disebabkan oleh kurang bersahabatnya iklim/cuaca selama triwulan laporan dimana cenderung hujan dengan disertai angin kencang. Akibatnya para petani dan nelayan mengalami kesulitan untuk bercocok tanam dan melakukan kegiatan melaut. Selain itu, dampak kenaikan harga minyak internasional yang terus menunjukkan tren hingga hampir menyentuh level psikologis sebesar USD 100 per barel menyebabkan meningkatnya harga barang khususnya yang banyak mengandung komponen impor (BI Manado, 2007: 7).

Selanjutnya, khusus untuk model penduduk miskin ada penambahan variabel yaitu variabel persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (AIR) yang merupakan proxy dari variabel perumahan. Todaro (2006:247) menyatakan bahwa UNDP yakin bahwa kemiskinan manusia harus diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama (*three key deprivations*) yaitu kehidupan, pendidikan dasar dan ketetapan ekonomi, dimana salah satu faktor dari ketetapan ekonomi adalah penyediaan air bersih. Variabel air bersih ini juga berkaitan erat

dengan tingkat kesehatan masyarakat terlebih pada akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu, air bersih juga berkaitan dengan kepemilikan aset terutama tanah. Todaro menyatakan bahwa penyebab nomor satu atas timpangnya distribusi pendapatan per kapita di hampir semua negara berkembang adalah sangat tidak meratanya kepemilikan aset/kekayaan (asset ownership) di negara-negara ini. Salah satu strategi di dalam kebijakan pengurangan kemiskinan yang baik adalah pengurangan pemusatan penguasaan atau kepemilikan aset tersebut dengan melakukan reformasi hak pertanahan (land reform) bagi penduduk miskin di suatu negara. Namun land reform ternyata kurang bisa diandalkan sebagai instrumen pemerataan pendapatan apabila distorsi harga faktor produksi dan lembaga-lembaga dalam sistem ekonomi yang bersangkutan masih menghambat para petani kecil pemilik tanah untuk mendapatkan berbagai input yang sangat diperlukannya seperti kredit modal kerja, pupuk, bibit, fasilitas pemasaran dan pelatihan metode pertanian yang paling efisien. Reformasi yang serupa juga bisa dilakukan di daerah-daerah perkotaan yakni melalui pemberian kredit komersial dengan bunga pasar yang wajar (kredit micro) agar perekonomian dapat berjalan dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para tenaga kerja setempat (Todaro, 2006:279-280).

Implikasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan melalui indikator Taraf Pola Konsumsi antara lain adalah

1. Pemerintah daerah perlu berusaha untuk melakukan stabilisasi harga maupun subsidi bahan kebutuhan pokok dan ketersediaannya bagi penduduk miskin terutama beras, minyak goreng, gula, bawang, cabe dan tomat karena komoditas-komoditas tersebut yang sangat sensitif bagi tingkat inflasi di Sulawesi Utara sehingga hal ini dapat mengganggu pengeluaran rumah tangga khususnya rumah tangga miskin.
2. Menyediakan fasilitas perumahan yang sehat dan terjangkau seperti skema kredit murah bersubsidi dengan nilai angsuran yang rendah atau penyediaan rumah susun dengan sistem sewa beli yang ringan yang tidak jauh dari pusat perekonomian. Hal ini sangat diperlukan khususnya di daerah perkotaan dan juga di daerah hasil pemekaran kabupaten, dan juga pemerintah daerah harus

melakukan penataan dan pendataan ulang kawasan pemukiman untuk penduduk terutama penduduk miskin guna adanya kepastian hukum di bidang pertanahan dikarenakan masih banyaknya kasus hukum pertanahan yang terjadi akibat dampak dari belum tersertifikasinya sebagian besar tanah yang ada di hampir seluruh propinsi Sulawesi Utara.

3. Memperbaiki fasilitas dan sistem kesehatan khusus untuk penduduk miskin dengan memperhatikan aspek pendataan yang tepat dan juga meningkatkan peran aktif lembaga keluarga berencana di tingkat kabupaten/kota dengan penyuluhan keluarga berencana di sekolah maupun di lingkungan pemukiman khususnya di daerah kawasan penduduk miskin. Persoalan kesehatan yang terjadi ini karena tidak adanya pengawasan yang memadai saat sistem asuransi kesehatan masyarakat miskin dilaksanakan di lapangan yang mengakibatkan banyaknya kasus terjadi dikarenakan masyarakat miskin diharuskan membayar biaya awal perawatan, juga terjadi ketidakakuratan data jumlah penduduk miskin di bidang kesehatan sehingga masih banyak penduduk miskin yang belum memiliki kartu asuransi kesehatan, dan minimnya pelayanan kesehatan yang didapat oleh peserta asuransi kesehatan keluarga miskin yang hanya meliputi pelayanan kesehatan umum/dasar.
4. Menyediakan pendidikan yang gratis khusus bagi penduduk miskin dengan program sekolah gratis dengan skema pembebasan SPP, pemberian biaya buku, biaya seragam dan biaya transport. Selain itu juga, pemerintah daerah bisa melakukan sosialisasi / penyuluhan kepada keluarga miskin bahwa sebaiknya anak dari keluarga miskin diarahkan ke sekolah menengah kejuruan agar anak tersebut dapat memperoleh keahlian/ketrampilan sehingga setelah selesai sekolah dapat mencari pekerjaan dan membantu ekonomi keluarga.
5. Selain itu, pemerintah dapat melakukan penyuluhan kepada seluruh penduduknya agar tidak terlalu konsumtif dalam merayakan perayaan keagamaan ataupun perayaan budaya, sehingga pengeluaran konsumtif tersebut dapat ditabung untuk peningkatan pendapatan. Selama ini sesuai dengan observasi/pengamatan, bahwa hampir sebagian besar penduduk di Sulawesi Utara selalu bersifat konsumtif pada saat menjelang hari-hari besar seperti Natal/Lebaran, Hari Pengucapan Syukur, maupun peristiwa khusus

keluarga seperti baptisan anak, pernikahan (resepsi dan hari balas gereja) maupun kematian (3 malam, mingguan/kumaus, 40 hari dan 1 tahun) yang harus selalu dengan perayaan yang agak besar, tentunya hal ini dapat menguras pendapatan ataupun tabungan keluarga. Perlu adanya terobosan yang efektif agar kebiasaan masyarakat ini dapat dikurangi dengan tidak mengurangi makna dari perayaan tersebut.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yang antara lain adalah :

1. Sesuai dengan identifikasi antar wilayah didapati bahwa Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan daerah yang mempunyai persentase penduduk miskin , indeks kedalaman dan indeks keparahan tertinggi di Propinsi Sulawesi Utara. Selain itu juga hampir sebagian besar indikator kesejahteraan rakyat di kedua kabupaten kepulauan ini sangat rendah dan sangat tertinggal dibandingkan tujuh daerah otonom lainnya di Sulawesi Utara, terutama untuk sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Rendahnya indikator ini dapat disebabkan kesulitan dalam pembangunan daerah kepulauan otonom yang terbatas sarana dan prasarana dan jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk daerah otonom yang memiliki persentase penduduk miskin, indeks kedalaman dan keparahan yang terendah ada pada kota Manado, kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Utara. Di hampir sebagian besar indikator kesejahteraan rakyat di ketiga daerah ini menunjukkan peringkat yang tinggi dan paling maju dibandingkan daerah lainnya, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. Unggulnya ketiga daerah ini memang disebabkan letak geografis ketiga kota ini sangat dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi yaitu kota Manado, dan sarana prasarana yang mendukung perbaikan tingkat kesejahteraan tersedia dengan baik. Kemudian untuk kabupaten Minahasa, kabupaten Minahasa Selatan dan kota Bitung merupakan daerah yang bervariasi tingkat kemiskinannya, khusus Minahasa dan Minahasa Selatan hal ini dapat disebabkan karena terjadinya migrasi penduduk produktif ke daerah-daerah pertumbuhan yang mengakibatkan berkurangnya penduduk usia produktif di daerah tersebut sehingga membuat sektor utama yaitu pertanian mengalami kendala dengan kekurangan tenaga dan juga adanya faktor musim/cuaca yang tidak menentu akibat perubahan musim secara global sehingga banyak

tanaman pertanian mengalami kegagalan panen dan penghasilan penduduk di perdesaan mengalami kendala. Untuk itu diperlukan usaha pemerintah daerah untuk mengintensifkan upaya perbaikan di sektor pertanian dengan cara penggunaan bibit unggul yang tahan cuaca ekstrim dan pemberian bantuan kredit lunak bagi para petani. Khusus untuk kota Bitung, permasalahan mendasar adalah masalah urbanisasi tenaga kerja yang tidak terdidik dari daerah-daerah sekitar baik antar daerah di dalam maupun dari luar propinsi Sulawesi Utara sehingga hal ini menjadi kendala dalam penanganan kemiskinan. Secara agregat, kesenjangan yang terjadi di masing-masing daerah otonom ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor sumber daya manusia, sistem kesehatan dan terbatasnya infrastruktur.

2. Berdasarkan hasil interpretasi output komputer, Variabel-Variabel Kunci yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara adalah :
 - A. Untuk perubahan **Penduduk Miskin (P0)** dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu :
 - 1) **Pendidikan**, yang diproxy dari variabel persentase penduduk berusia 10 tahun keatas tamat SMA/Umum (SMA),
 - 2) **Fertilitas**, yang diproxy dari persentase wanita berumur 15 – 49 tahun berstatus kawin yang masih ikut keluarga berencana (MSHKB),
 - 3) **Perumahan**, yang diproxy dari persentase rumah tangga menggunakan air bersih (AIR) dan
 - 4) **Taraf Pola Konsumsi**, yang diproxy dari persentase pengeluaran/kapita/bulan penduduk menurut konsumsi bukan makanan (BKNMKN)
 - B. Untuk **kedalaman kemiskinan (P1)** dipengaruhi oleh 3 variabel yaitu :
 - 1) **Pendidikan**, yang diproxy dari persentase penduduk berusia 10 tahun keatas tamat SMA/Umum (SMA),
 - 2) **Fertilitas**, yang diproxy dari persentase wanita berumur 15 – 49 tahun berstatus kawin yang masih ikut keluarga berencana (MSHKB) dan
 - 3) **Taraf Pola Konsumsi**, yang diproxy dari persentase pengeluaran/kapita/bulan penduduk menurut konsumsi bukan makanan (BKNMKN)

C. Untuk **keparahan kemiskinan (P2)** dipengaruhi oleh 3 variabel yaitu :

- 1) **Pendidikan**, yang diproxy dari persentase penduduk berusia 10 tahun keatas tamat SMA/Umum (SMA),
- 2) **Fertilitas**, yang diproxy dari persentase wanita berumur 15 – 49 tahun berstatus kawin yang masih ikut keluarga berencana (MSHKB) dan
- 3) **Taraf Pola Konsumsi**, yang diproxy dari persentase pengeluaran/kapita/bulan penduduk menurut konsumsi bukan makanan (BKNMKN)

3. Model yang terbaik yang dapat menjelaskan untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya adalah :

A. Model Persentase Penduduk Miskin

Variabel penduduk berusia 10 tahun keatas tamat SMA/Umum, variabel wanita 15-49 Tahun berstatus kawin yg masih menggunakan alat KB, variabel rumah tangga yang menggunakan air bersih dan variabel rata-rata pengeluaran/kapita/bulan penduduk menurut konsumsi bukan makanan yang masing-masing baik secara parsial dan overall berpengaruh secara signifikan terhadap model penduduk. Selain itu proporsi keragaman tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen sebesar 87,5% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Hasil estimasi regresi dari koefisien keempat variabel ini mempunyai tanda yang sesuai dengan hipotesis teori.

B. Model Kedalaman Kemiskinan

Variabel penduduk berusia 10 tahun keatas tamat SMA/Umum, variabel wanita 15-49 Tahun berstatus kawin yg masih menggunakan alat KB dan variabel rata-rata pengeluaran/kapita/bulan penduduk menurut konsumsi bukan makanan yang masing-masing baik secara parsial dan overall berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kedalaman kemiskinan di Sulawesi Utara. Selain itu proporsi keragaman tingkat kedalaman kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen sebesar 86,1% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Hasil estimasi regresi dari koefisien ketiga variabel ini mempunyai tanda yang sesuai dengan hipotesis teori.

C. Model Keparahan Kemiskinan

Variabel penduduk berusia 10 tahun keatas tamat SMA/Umum, variabel wanita 15-49 Tahun berstatus kawin yg masih menggunakan alat KB dan variabel rata-rata pengeluaran/kapita/bulan penduduk menurut konsumsi bukan makanan yang masing-masing baik secara parsial dan overall berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat keparahan kemiskinan. Selain itu proporsi keragaman tingkat keparahan kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen sebesar 75,3% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Hasil estimasi regresi dari koefisien.

6.2 Saran dan Implikasi Kebijakan

Dengan memperhatikan model diatas, maka untuk menekan ataupun mengurangi tingkat kemiskinan di propinsi Sulawesi Utara, para pembuat kebijakan hendaknya lebih memfokuskan kebijakan:

- a. Di Bidang Pendidikan, bahwa pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Utara harus mendorong agar para siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk bersekolah sampai di tingkat pendidikan menengah kejuruan agar mempunyai keahlian/ketrampilan, dan dibantu dengan program sekolah gratis yang mempunyai skema pembebasan SPP, pemberian biaya buku, biaya seragam dan biaya transport. Skema program sekolah gratis ini dibuat agar keluarga miskin dapat berkurang tekanan pengeluarannya yang berkaitan dengan pengeluaran konsumsi bukan makanannya. Selain itu juga perlu diadakan kebijakan pemberian beasiswa ke perguruan tinggi khusus siswa miskin yang berprestasi di tiap sekolah negeri. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Tambunan (2006) bahwa untuk mengurangi kemiskinan di bidang pendidikan diperlukan adanya kemudahan akses ke sekolah, dan juga Todaro (2006) menyebutkan bahwa kemiskinan yang meluas menciptakan kondisi yang membuat kaum miskin tidak mampu membiayai pendidikan anak, sedangkan Nurkse (Jhingan, 1994) menyatakan bahwa lingkaran kemiskinan salah satu faktornya adalah berasal dari kurangnya tenaga kerja yang terampil.

- b. Di Bidang Fertilitas dan Kesehatan, kebijakan yang perlu diambil dari pemerintah kabupaten/kota adalah perlu adanya peningkatan peran aktif bagian penyuluhan/pemberdayaan di bidang keluarga berencana (eks BKKBN) di tiap kabupaten/kota yang berguna untuk mendorong kesadaran para pasangan muda untuk mengikuti program keluarga berencana dan dapat pula dimasukkan program KB ini ke dalam muatan lokal di sekolah-sekolah menengah. Selain itu untuk pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, perlu adanya evaluasi yang menyeluruh guna perbaikan/peningkatan sistem pelayanan asuransi kesehatan bagi penduduk miskin (ASKESKIN), yang selama ini sesuai observasi banyak penduduk miskin menemui masalah di dalam prakteknya di lapangan. Pembebasan biaya kesehatan ini bertujuan agar tekanan pengeluaran penduduk miskin akan berkurang dan hal ini erat kaitannya dengan pengurangan taraf pola konsumsi bukan makanan penduduk miskin, sehingga pengeluaran pada biaya kesehatan dapat dikurangi dan dapat ditabung. Kebijakan di bidang kesehatan ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Tambunan (2006) bahwa masalah kesehatan untuk kaum miskin yang dominan di kebanyakan negara sedang berkembang adalah bukan tidak adanya pelayanan kesehatan tetapi ketidakmampuan dari sistem-sistem pelayanan kesehatan publik untuk memberikan pelayanan kesehatan berkualitas baik di semua wilayah. Kurang baiknya pelayanan kesehatan yang didapat oleh kelompok miskin membuat suatu masa kehidupan yang tidak terjamin bagi mereka yang miskin. Sedangkan di bidang Fertilitas, hal ini sejalan dengan apa yang telah diutarakan oleh Suyono (2002) bahwa Keluarga Berencana harus lebih ditingkatkan terutama di keluarga miskin dan Program keluarga berencana juga dapat dilakukan dengan pendekatan dimasukkannya ke dalam ajaran Departemen Pendidikan Nasional, yang memungkinkan anak-anak perempuan membekali dirinya dengan ketrampilan dan pengetahuannya tentang keluarga berencana. Selain itu pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah merupakan kesempatan yang sangat baik untuk "menyulap" lembaga BKKBN daerah dengan petugas lapangannya yang handal menjadi dinas kependudukan dan pemberdayaan keluarga yang utuh dengan tugas melanjutkan

pemberdayaan keluarga yang telah dimulai dengan berhasil secara massal di masa lalu bukan malah dibubarkan.

- c. Di bidang Taraf dan Pola Konsumsi, kebijakan pemerintah propinsi adalah perlu adanya kebijakan yang komprehensif untuk mewujudkan ketahanan pangan dan ketersediaan yang cukup serta stabilisasi harga bagi bahan kebutuhan pokok terutama untuk masyarakat miskin. Kemudian pemerintah kabupaten/kota membantu dengan kebijakan program subsidi beras bagi penduduk miskin dan peningkatan kualitas berasnya. Kemudian juga perlu adanya penyuluhan secara berkala kepada masyarakat oleh pemerintah kabupaten/kota agar mengurangi budaya konsumtif yang berlebihan dalam merayakan acara keagamaan ataupun acara budaya lainnya maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini didasarkan atas pendapat Todaro (2006) yang menyatakan bahwa uang kebanyakan disimpan atau ditanam dalam bentuk emas, permata, atau gedung mewah atau dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban sosial pada berbagai kesempatan upacara demi status. Pengeluaran gagah-gagahan, atau lebih dikenal sebagai **konsumsi mewah** yang dilakukan, juga membatasi kemampuan untuk menabung dan menanam modal.
- d. Di bidang Perumahan, pemerintah kabupaten/kota perlu membuat kebijakan skema pemberian kredit murah untuk pembelian rumah sederhana dan memberikan subsidi untuk membangun kompleks-kompleks perumahan seperti rumah susun sederhana dengan konsep sewa beli yang terjangkau, yang tidak terlalu jauh dari pusat kota kepada masyarakat menengah ke bawah terutama penduduk miskin dan pembangunan penyediaan air bersih khusus untuk daerah-daerah yang kurang terjangkau oleh air bersih seperti pembangunan bak-bak penampung air dan juga pembuatan saluran air bersih baik di daerah pedesaan maupun di daerah pemukiman penduduk miskin berada. Hal ini sejalan dengan Todaro (2006) yang mengemukakan bahwa adanya variasi kemiskinan yang disebabkan oleh perbedaan geografis, penduduk dan pendapatan serta kemiskinan yang meluas menciptakan kondisi yang membuat kaum miskin tidak mempunyai akses terhadap pinjaman kredit. Selain itu juga hal kepemilikan rumah/tempat tinggal sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Rajadhyaksha (2008) bahwa kurangnya hak milik

membuat kaum miskin tidak dapat mengubah aset mereka menjadi modal produktif. Hak milik ini dapat berupa hak atas tanah, dimana dengan adanya kepemilikan hak atas tanah (terutama tempat tinggal) keluarga miskin akan mempunyai harapan untuk dapat lebih maju di masa depannya dibandingkan dengan keluarga miskin yang tidak mempunyai hak kepemilikan.

- e. Untuk pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehubungan adanya hasil penelitian ini menunjukkan APBD tidak *pro-poor* maka perlu adanya perbaikan kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah yang ada selama ini menjadi anggaran yang lebih *pro-poor* di tahun-tahun berikutnya, sehingga pengeluaran pemerintah di kemudian hari lebih berfokus pada penanggulangan kemiskinan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya secara keseluruhan. Pendapat mengenai anggaran *pro-poor* ini sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Hardojo (2008) bahwa jika terjadi perbedaan tingkat pendapatan yang tajam antar wilayah dan antar sektor tertentu maka pemerintah bisa membuat kebijakan yang memastikan lapisan masyarakat yang kaya memberikan kontribusi yang lebih besar untuk kemudian didistribusikan ke lapisan masyarakat yang lebih miskin melalui program-program yang direncanakan dalam anggaran atau dengan kata lain dinamakan Pro-Poor Budget.

Di dalam penelitian ini penulis menyadari adanya kekurangan yaitu adanya keterbatasan masalah pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Keterbatasan data ini dapat menyebabkan tidak maksimalnya hasil yang diperoleh. Oleh sebab itu diharapkan di kemudian hari dengan penelitian yang sejenis, diperlukan data *time series* yang agak panjang dan data *cross section* daerah kabupaten/kota secara keseluruhan. Untuk menggali lebih dalam penelitian mengenai kemiskinan, sangat diperlukan kombinasi antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif agar didapatkan hasil yang saling melengkapi dan komprehensif yang dapat menjawab persoalan yang ada menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR REFERENSI

- Adam Jr, Richard H. (2004). *Economic Growth, Inequality and Poverty : Estimating the Growth Elasticity of Poverty*. World Development, 32 (12), hal. 1989-2014 .
- Achmad dan Linda.(2010). Analisis Kemiskinan dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan pada Peternak Sapi Perah (Survey di Wilayah Kerja KUD Sinar Jaya Kabupaten Bandung). <http://pustaka.unpad.ac.id/archives/8332/> diakses pada tanggal 24 juni 2010 pkl. 02.13 wib.
- Alfian. (1980). *Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai*. YIIS dan HIPIS. Jakarta.
- Alam, Jaoharul. (2006). Disparitas Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bekasi. Tesis MPKP-UI. Program Pasca Sarjana FE-UI. Jakarta.
- Alawi, Nadhif. (2006). Pengaruh Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Terhadap Kemiskinan Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 – 2004. Tesis MPKP-UI. Program Pasca Sarjana FE-UI. Jakarta.
- Andre, Bayo Ala. (1996). *Kemiskinan dan Strategi memerangi Kemiskinan*. Penerbit Liberti. Yogyakarta.
- Andika, Muhammad Nova. (2004). *Pengaruh APBD Jakarta Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Kota*. Tesis. MPKP FE-UI. Tidak Dipublikasikan.
- Arsyad, Lincoln. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln. (2004). *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-4. Penerbit STIE YKPN. Yogyakarta.
- Ardani, Amirudin. (1992). *Analisis of Regional Growth and Disparity: the Impact Analysis of The Project on Indonesian Development*. Ph.D. Dissertation City and Regional Planning. University of Pennsylvania Philadelphia, USA (tidak dipublikasikan).
- Bank Indonesia Cabang Manado (2007). *Perkembangan Ekonomi Daerah Sulawesi Utara Triwulan IV tahun 2007*. Publikasi BI Manado. Manado.
- Bank Indonesia Cabang Manado (2009). *Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sulawesi Utara Triwulan IV tahun 2009*. Publikasi BI Manado. Manado.

- Badan Pusat Statistik Pusat. (2008). *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007*. Jakarta, BPS Pusat.
- (2007). Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2008. *Berita Resmi Badan Pusat Statistik no. 37/07/Th. XI*. Jakarta.
- (2003). *Data dan Informasi Kemiskinan 2002 Kabupaten/Kota*. Jakarta, BPS Pusat.
- (2004). *Data dan Informasi Kemiskinan 2003 Kabupaten/Kota*. Jakarta, BPS Pusat.
- (2005). *Data dan Informasi Kemiskinan 2004 Kabupaten/Kota*. Jakarta, BPS Pusat.
- (2006). *Data dan Informasi Kemiskinan 2005 dan 2006 Kabupaten/Kota*. Jakarta, BPS Pusat.
- (2007). *Data dan Informasi Kemiskinan 2007 Kabupaten/Kota*. Jakarta, BPS Pusat.
- (2008). *Data dan Informasi Kemiskinan 2008 Kabupaten/Kota*. Jakarta, BPS Pusat.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara.(2005). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Utara tahun 2005*. Manado. BPS Sulawesi Utara
- .(2006). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Utara tahun 2005*. Manado. BPS Sulawesi Utara
- .(2007). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Utara tahun 2006*. Manado. BPS Sulawesi Utara
- .(2007). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Utara tahun 2006/2007*. Manado. BPS Sulawesi Utara
- .(2008). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Utara tahun 2008*. Manado. BPS Sulawesi Utara
- .(2009). *Keadaan Ketenagakerjaan Propinsi Sulawesi Utara*. Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 59/12/71/Th. III, 1 Desember 2009 . BPS Sulawesi Utara.
- .(2003-2009). *Sulawesi Utara Dalam Angka* . Manado. BPS Sulawesi Utara.
- Barata, Atep A. Dan Bambang T. (2004). *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*. PT. Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta.

- Bourguignon, F. (2004). *The Poverty-Growth-Inequality Triangle*. New Delhi: International Economic Relation.
- Fuady, Ahmad H. & Dati F., Riono A., Wahyu W. B. (2002). *Memahami Anggaran Publik*. Yogyakarta. IDEA Press.
- Friedman. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. Publisher Blackwell. Cambridge, MA. United State of America.
- Gujarati, Damodar. (1999). *Essential of Econometrics*. Singapore: Irwin McGraw-Hill.
- Hardoyo, Antonio P. (2008). *Mendahulukan Si Miskin : Buku Sumber Bagi Anggaran Pro Rakyat*. Penerbit LkiS Yogyakarta. Yogyakarta.
- Hasibuan, Guntur. (2006). *Variabel-Variabel Utama Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Propinsi Sumatera Utara*. Jakarta. Tesis. MPKP FE Universitas Indonesia.
- Hidayat, Saeful dan Patunru, Arianto A. (2007). *Pertumbuhan Ekonomi, Ketidakmerataan Pendapatan dan Kemiskinan : Estimasi Parameter Elastisitas Kemiskinan Tingkat Propinsi Di Indonesia Tahun 1996 – 2005*. Paper. FE Universitas Indonesia. Depok.
- Jhingan, M.L. (1994). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kakwani, Nanak, Shahid Khandker, dan Hyun H. Son. (2004). *Pro-Poor Growth : Concepts and Measurement with Country Case Studies*. Working Paper No.1, International Poverty Centre.
- Kristiningsih, Titien. (2009). *Identifikasi Potensi Ekonomi Kawasan Perbatasan (Kasus Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara)*. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Departemen Ilmu Ekonomi IPB. Bogor.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Kuznets, S. (1955). *Economics Growth and Income Inequality*. American Economic Review 59, hal. 3-42.
- Lubis, Djoharis. (2004). *Ketidakadilan dan Kemiskinan Musuh Kita Bersama*. Jurnal ALNI Indonesia. Jakarta.
- Moeis, Jossy. (2007). *Kemiskinan, Pemerataan, dan Kebijakan Publik*. Tidak Dipublikasikan. Bahan Kuliah MPKP FE-UI. Salemba Jakarta.

- Nanga, M. (2006). *Dampak Transfer Fiskal Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Parwoto. (2001). *Makalah Penanggulangan Kemiskinan (Unpublished)*. Jakarta. Departemen Permukiman dan Pembangunan Sarana Wilayah.
- Panji Indra. (2001). *An Analysis Towards Urban Poverty Alleviation Program in Indonesia*. Philosophy Doctor Dissertation. Faculty of the School Policy, Planning, and Development. University of Southern California, California.
- Partoatmodjo, Sadj. (2004). *Masalah Kemiskinan dan Kompleksitas Penanggulangannya*. Jurnal ALNI Indonesia. Jakarta.
- Patilima, Hamid. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Purwantini, Ari. (2000). *Kesenjangan Pembangunan Ekonomi di Propinsi Nusa Tenggara Barat*. Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.
- Rajadhyaksha, Niranjana. (2008). *The Rise of India : Transformasi dari Kemiskinan Menuju Kemakmuran*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Santoso, Budi. (1989). *Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Propinsi Bali*. Pasca Sarjana UGM. Program KDK UGM Universitas Brawijaya. Malang.
- Setyarini, Djati. (1999). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesenjangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah di Propinsi Jawa Tengah*. Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.
- Sumanta, Jaka. (2005). *Fenomena Lingkaran Kemiskinan : Analisis Ekonometrika Regional*. Jakarta . Jurnal Kebijakan Ekonomi 1 (2) Desember 2005.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Jaring Pengaman Sosial dan Pemberdayaan*. Penerbit Gramedia. Jakarta
- Suyanto. (1996). *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa*. Penerbit Adytya Media. Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus. (2006). *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Pasca Krisis*. Pustaka Quantum. Jakarta.
- Sjafrizal. (1997). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Majalah Prisma LP3ES No 3. Jakarta.
- Suyono, Haryono. (2002). *Otonomi Daerah, BKKBN dan Keluarga Berkualitas*. Artikel Gemari. Jakarta. (<http://kbi.gemari.or.id/beritadetail.php?id=1321>), diakses pada 28 Juni 2010 pkl. 11.35 wib.

- Todaro, Michael P. (2006). *Pembangunan Eeonomi di Dunia Ketiga, edisi kesembilan*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Widarjono, Agus. (2005). *Ekonometrika, Teori dan Aplikasi, untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Pertama*. Yogyakarta. Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.
- Yani, Ahmad. (2002). *Seri Keuangan Publik : Hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Zulfakar (2005). *Tinjauan Terhadap Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Rumah Tangga Di Propinsi Banten*. Jakarta. Tesis. MPKP FE Universitas Indonesia.
- Antara News. (2010). ([http://www.antara.co.id/view/?i=1212065891&c=EKB&s=tanggal 24 Pebruari 2010 pkl. 21.03 wib](http://www.antara.co.id/view/?i=1212065891&c=EKB&s=tanggal%2024%20Pebruari%202010%20pkl.%2021.03%20wib))
- Berita Manado Online. (2010). *Masalah Pendidikan di Talaud dan perjuangan wakil rakyat*. (<http://beritamanado.com/2010/06/22/rompis-siap-kawal-daerah-perbatasan/>) diakses tanggal 25 Juni 2010 pkl. 0020 wib.
- Dinkes Sulut Online. (2010). *Upaya Pelayanan Kesehatan – Pelayanan Kesehatan Rujukan*. (<http://www.sulut.go.id/diskes1/pelkr.html>) diakses tanggal 28 Juni 2010 pkl 15.47 wib.
- Harian Komentor Online. (2008). *PKL sebagai Kebutuhan dan Parasit Kota*. (http://www.hariankomentor.com/arsip/arsip_2008/nov_15/lkOpin001.htm l) diakses tanggal 24 Juni 2010 pkl. 11.02 wib.
- Koran Jakarta Online. (2010). *Tingkat Pengangguran Sulut Tertinggi Keenam Nasional*. (<http://www.koran-jakarta.com/berita-detail-terkini.php?id=23691>) tanggal 24 Pebruari 2010 pkl. 22.05 wib.

Lampiran - Lampiran

Model Penduduk Miskin (P0)

Statistik Uji F atau Chi-Kuadrat : Common Effect atau Fixed Effect

Pengujian yang dilakukan menggunakan Likelihood ratio test, yaitu:

H_0 : model mengikuti Pool

H_1 : model mengikuti Fixed.

Dengan Eviews, klik--> View-Fixed/Random Effect Testing-Redundant Fixed Effect maka dipeoleh hasil sebagai berikut :

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: POVERTYSULUT
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.325303	(8,20)	0.0011
Cross-section Chi-square	41.078582	8	0.0000

hasil tersebut diatas menunjukkan baik F test maupun Chi-square signifikan (p-value 0,0011 dan 0,0000 lebih kecil dari 5%) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka model mengikuti **Fixed Effect**.

HAUSSMAN TEST : Fixed Effect or Random Effect

Selanjutnya kita coba estimasi Model Random Effect. Pertanyaannya adalah apakah model sesuai dengan Random Effect atau Fixed Effect.

Pengujian yang dilakukan menggunakan Hausman test, yaitu:

H_0 : model mengikuti Random Effect

H_1 : model mengikuti Fixed Effect.

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: POVERTYSULUT
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.406122	7	0.0311

Hasil pengujian tersebut signifikan (p-value 0,000 kurang dari 5%), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, model mengikuti **Fixed Effect**.

Model Kedalaman Kemiskinan (P1)

Statistik Uji F atau Chi-Kuadrat : Common Effect or Fixed Effect

Pertanyaannya adalah apakah pada model fixed effect (*cross-section*)-nya berbeda atau tidak berbeda (model Pool). Pengujian yang dilakukan menggunakan Chi-Kuadrat, yaitu:

- H_0 : model mengikuti Pool
 H_1 : model mengikuti Fixed

Redundant Fixed Effects Tests
 Pool: POVERTYSULUT
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.859316	(8,20)	0.0002
Cross-section Chi-square	47.522932	8	0.0000

Dari tabel 5.5 terlihat hasil yang menunjukkan baik F test maupun Chi-square signifikan (p-value 0,0002 dan 0,0000 lebih kecil dari 5%) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka model mengikuti **Fixed Effect**.

HAUSSMAN TEST : Fixed Effect atau Random Effect

Selanjutnya kita coba estimasi Model Random Effect. Pengujian yang dilakukan menggunakan Hausman test, yaitu:

- H_0 : model mengikuti Random Effect
 H_1 : model mengikuti Fixed Effect

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Pool: POVERTYSULUT
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.993189	7	0.0252

Berdasarkan tabel 5.6 hasil pengujian tersebut signifikan (p-value 0,025 kurang dari 5%), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, model mengikuti **Fixed Effect**.

Model Keperahan Kemiskinan (P2)

Statistik Uji F atau Chi-Kuadrat : Common Effect or Fixed Effect

Pertanyaannya adalah apakah pada model fixed effect (*cross-section*)-nya berbeda atau tidak berbeda (model Pool). Pengujian yang dilakukan menggunakan Chi-Kuadrat, yaitu:

- H_0 : model mengikuti Pool
 H_1 : model mengikuti Fixed

Redundant Fixed Effects Tests
 Pool: POVERTYSULUT
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.641703	(8,20)	0.0090
Cross-section Chi-square	32.357209	8	0.0001

hasil tersebut menunjukkan baik F test maupun Chi-square signifikan (p-value 0,000 lebih kecil dari 5%) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka model mengikuti **Fixed Effect**.

HAUSSMAN TEST : Fixed Effect atau Random Effect

Selanjutnya kita coba estimasi Model Random Effect. Pengujian yang dilakukan menggunakan Hausman test, yaitu:

- H_0 : model mengikuti Random Effect
 H_1 : model mengikuti Fixed Effect

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Pool: POVERTYSULUT
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.208552	7	0.0334

Hasil pengujian tersebut signifikan (p-value 0,000 kurang dari 5%), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, model mengikuti **Fixed Effect**.

Model Awal : P0 (Model Penduduk Miskin)

Dependent Variable: P0?

Method: Pooled Least Squares

Date: 06/12/10 Time: 22:59

Sample: 2005 2008

Included observations: 4

Cross-sections included: 9

Total pool (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.105385	23.24407	0.090577	0.9287
SMA?	-0.184846	0.090246	-2.048241	0.0539
PGGRN?	-0.006161	0.042975	-0.143368	0.8874
KLHSKT?	0.015421	0.047519	0.324521	0.7489
MSHKB?	-0.008480	0.019138	-0.443089	0.6625
AIR?	-0.021744	0.028348	-0.767018	0.4520
BKNMKN?	-0.329484	0.144099	-2.286514	0.0333
APBD?	1.086322	0.750037	1.448358	0.1630
Fixed Effects (Cross)				
_BM-C	-3.114975			
_MIN-C	-0.074815			
_KS-C	2.591469			
_KT-C	1.578853			
_MINS-C	-1.951024			
_MINU-C	-0.409995			
_MDO-C	0.644517			
_BTG-C	1.937738			
_TMH-C	-1.201768			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.928298	Mean dependent var	11.46139
Adjusted R-squared	0.874521	S.D. dependent var	3.578923
S.E. of regression	1.267763	Akaike info criterion	3.613487
Sum squared resid	32.14447	Schwarz criterion	4.317274
Log likelihood	-49.04277	Hannan-Quinn criter.	3.859128
F-statistic	17.26205	Durbin-Watson stat	2.970668
Prob(F-statistic)	0.000000		

Model Terpilih : P0 (Model Penduduk Miskin)

Dependent Variable: P0?

Method: Pooled Least Squares

Date: 06/13/10 Time: 01:01

Sample: 2005 2008

Included observations: 4

Cross-sections included: 9

Total pool (balanced) observations: 36

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	38.12632	5.794264	6.580010	0.0000
SMA?	-0.243801	0.092880	-2.624913	0.0151
MSHKB?	-0.030169	0.013708	-2.200924	0.0380
AIR?	-0.034401	0.006393	-5.380808	0.0000
BKNMKN?	-0.438723	0.124189	-3.532702	0.0018
Fixed Effects (Cross)				
_BM-C	-3.726215			
_MIN-C	0.237813			
_KS-C	1.591560			
_KT-C	0.840781			
_MINS-C	-3.349224			
_MINU-C	0.066430			
_MDO-C	2.414174			
_BTG-C	2.640306			
_TMH-C	-0.715625			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.917994	Mean dependent var	11.46139
Adjusted R-squared	0.875208	S.D. dependent var	3.578923
S.E. of regression	1.264287	Akaike info criterion	3.581091
Sum squared resid	36.76370	Schwarz criterion	4.152917
Log likelihood	-51.45964	Hannan-Quinn criter.	3.780674
F-statistic	21.45556	Durbin-Watson stat	2.779283
Prob(F-statistic)	0.000000		

Model Awal : P1 (Model Kedalaman Kemiskinan)

Dependent Variable: P1?

Method: Pooled Least Squares

Date: 06/13/10 Time: 01:04

Sample: 2005 2008

Included observations: 4

Cross-sections included: 9

Total pool (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.495197	5.487350	1.001430	0.3286
SMA?	-0.051674	0.021305	-2.425471	0.0249
PGGRN?	-0.001768	0.010145	-0.174307	0.8634
KLHSKT?	0.003938	0.011218	0.351036	0.7292
MSHKB?	-0.004728	0.004518	-1.046444	0.3078
AIR?	-0.003701	0.006692	-0.553092	0.5863
BKNMKN?	-0.040531	0.034018	-1.191458	0.2474
APBD?	-0.013299	0.177065	-0.075110	0.9409
Fixed Effects (Cross)				
_BM-C	-0.809995			
_MIN-C	0.020201			
_KS-C	0.644408			
_KT-C	0.471080			
_MINS-C	-0.312500			
_MINU-C	-0.266420			
_MDO-C	0.125897			
_BTG-C	0.583164			
_TMH-C	-0.455835			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.908787	Mean dependent var	1.932778
Adjusted R-squared	0.840377	S.D. dependent var	0.749101
S.E. of regression	0.299287	Akaike info criterion	0.726278
Sum squared resid	1.791460	Schwarz criterion	1.430064
Log likelihood	2.926998	Hannan-Quinn criter.	0.971918
F-statistic	13.28441	Durbin-Watson stat	3.299442
Prob(F-statistic)	0.000000		

Model Terpilih : P1 (Model Kedalaman Kemiskinan)

Dependent Variable: P1?

Method: Pooled Least Squares

Date: 06/13/10 Time: 01:11

Sample: 2005 2008

Included observations: 4

Cross-sections included: 9

Total pool (balanced) observations: 36

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.474333	0.582219	9.402528	0.0000
SMA?	-0.049078	0.009092	-5.398049	0.0000
MSHKB?	-0.005557	0.000819	-6.784970	0.0000
BKNMKN?	-0.050577	0.010423	-4.852217	0.0001
Fixed Effects (Cross)				
_BM-C	-0.719738			
_MIN-C	-0.005902			
_KS-C	0.628976			
_KT-C	0.457657			
_MINS-C	-0.381733			
_MINU-C	-0.142217			
_MDO-C	0.117706			
_BTG-C	0.523686			
_TMH-C	-0.478436			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.904780	Mean dependent var	1.932778	
Adjusted R-squared	0.861137	S.D. dependent var	0.749101	
S.E. of regression	0.279147	Akaike info criterion	0.547045	
Sum squared resid	1.870153	Schwarz criterion	1.074885	
Log likelihood	2.153185	Hannan-Quinn criter.	0.731275	
F-statistic	20.73160	Durbin-Watson stat	3.239846	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Model Awal : P2 (Model Keperahan Kemiskinan)

Dependent Variable: P2?

Method: Pooled Least Squares

Date: 06/13/10 Time: 01:17

Sample: 2005 2008

Included observations: 4

Cross-sections included: 9

Total pool (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.458024	2.324006	0.627375	0.5375
SMA?	-0.015441	0.009023	-1.711261	0.1025
PGGRN?	8.88E-05	0.004297	0.020659	0.9837
KLHST?	0.001254	0.004751	0.263899	0.7946
MSHKB?	-0.001748	0.001913	-0.913421	0.3719
AIR?	-0.000333	0.002834	-0.117363	0.9077
BKNMKN?	-0.008521	0.014407	-0.591443	0.5608
APBD?	-0.005845	0.074991	-0.077938	0.9387
Fixed Effects (Cross)				
_BM-C	-0.233740			
_MIN-C	0.004588			
_KS-C	0.191477			
_KT-C	0.149248			
_MINS-C	-0.032619			
_MINU-C	-0.077824			
_MDO-C	0.003021			
_BTG-C	0.186302			
_TMH-C	-0.190453			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.831844	Mean dependent var	0.512778
Adjusted R-squared	0.705726	S.D. dependent var	0.233662
S.E. of regression	0.126754	Akaike info criterion	-0.992028
Sum squared resid	0.321334	Schwarz criterion	-0.288242
Log likelihood	33.85651	Hannan-Quinn criter.	-0.746388
F-statistic	6.595797	Durbin-Watson stat	3.218855
Prob(F-statistic)	0.000078		

Model Terpilih : P2 (Model Keparahan Kemiskinan)

Dependent Variable: P2?

Method: Pooled Least Squares

Date: 06/13/10 Time: 01:21

Sample: 2005 2008

Included observations: 4

Cross-sections included: 9

Total pool (balanced) observations: 36

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.371519	0.127037	10.79624	0.0000
SMA?	-0.015620	0.002508	-6.226978	0.0000
MSHKB?	-0.001896	0.000297	-6.382699	0.0000
BKNMKN?	-0.009117	0.002270	-4.015884	0.0005
Fixed Effects (Cross)				
_BM-C	-0.225818			
_MIN-C	0.006714			
_KS-C	0.175116			
_KT-C	0.145968			
_MINS-C	-0.036443			
_MINU-C	-0.065861			
_MDO-C	0.000529			
_BTG-C	0.183866			
_TMH-C	-0.184070			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.830926	Mean dependent var	0.512778
Adjusted R-squared	0.753433	S.D. dependent var	0.233662
S.E. of regression	0.116026	Akaike info criterion	-1.208807
Sum squared resid	0.323088	Schwarz criterion	-0.680967
Log likelihood	33.75853	Hannan-Quinn criter.	-1.024577
F-statistic	10.72268	Durbin-Watson stat	3.184754
Prob(F-statistic)	0.000001		

Tabel Persentase Penduduk yang belum pernah sekolah per Kabupaten/ Kota Propinsi Sulawesi Utara

No.	Kabupaten Kota	2005	2006	2007	2008
1	Bolaang Mongondow	0,89	1,16	1,26	0,95
2	Minahasa	0,89	0,89	0,39	0,53
3	Kep. Sangihe	1,07	1,28	1,67	1,79
4	Kep. Talaud	0,45	1,42	0,76	1,58
5	Minahasa Selatan	0,29	0,39	0,97	0,62
6	Minahasa Utara	0,66	0,05	0,67	0,63
7	Manado	0,73	0,43	0,36	0,17
8	Bitung	0,80	0,74	0,55	0,44
9	Tomohon	0,47	0,13	0,63	0,32
10	Sulawesi Utara	0,74	0,74	0,90	0,77

Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

Tabel Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun keatas Tamat SMA/Umum per kabupaten / kota Propinsi Sulawesi Utara

No.	Kabupaten Kota	2005	2006	2007	2008
1	Bolaang Mongondow	13,03	10,43	17,75	19,38
2	Minahasa	26,06	23,05	24,03	26,14
3	Kep. Sangihe	16,7	12,16	20,49	23,37
4	Kep. Talaud	20,81	17,91	21,26	19,9
5	Minahasa Selatan	20,08	18,68	25,19	22,09
6	Minahasa Utara	23,39	22,63	24,69	30,72
7	Manado	40,79	34,23	40,26	34,4
8	Bitung	31,73	23,23	27,66	31,8
9	Tomohon	37,37	26,44	31,10	33,9
10	Sulawesi Utara	24,99	20,79	26,20	18,97

Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

Tabel Persentase Angkatan Kerja yang belum bekerja per kabupaten/ kota Propinsi Sulawesi Utara

No.	Kabupaten Kota	2005	2006	2007	2008
1	Bolaang Mongondow	9,54	10,01	1,76	1,31
2	Minahasa	20,67	33,63	4,52	1,43
3	Kep. Sangihe	20,27	16,14	4,72	4,75
4	Kep. Talaud	14,19	20,57	9,15	9,42
5	Minahasa Selatan	21,32	15,76	1,80	4,41
6	Minahasa Utara	13,21	16,92	4,74	2,04
7	Manado	23,69	15,35	14,29	24,98
8	Bitung	22,16	30,59	9,66	9,65
9	Tomohon	37,45	35,51	13,41	6,98
10	Sulawesi Utara	18,40	18,70	5,39	6,66

Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

Tabel Persentase Penduduk dan Keluhan Kesehatan per kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Utara

No.	Kabupaten Kota	2005	2006	2007	2008
1	Bolaang Mongondow	42,06	27,79	45,23	44,28
2	Minahasa	34,36	34,63	40,15	39,14
3	Kep. Sangihe	14,74	17,89	16,65	27,44
4	Kep. Talaud	22,88	35,02	33,62	36,57
5	Minahasa Selatan	26,06	25,08	36,60	44,92
6	Minahasa Utara	31,80	30,21	42,72	36,94
7	Manado	23,20	26,69	22,55	36,53
8	Bitung	30,48	32,83	35,65	34,32
9	Tomohon	18,35	42,92	34,38	47,33
10	Sulawesi Utara	29,46	29,27	35,05	38,43

Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

**Tabel Rata-Rata Anak Lahir Hidup per Wanita
per kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Utara**

No.	Kabupaten Kota	2005	2006	2007	2008
1	Bolaang Mongondow	1,65	1,72	1,85	1,75
2	Minahasa	1,47	1,46	1,73	1,61
3	Kep. Sangihe	1,20	1,27	1,51	1,39
4	Kep. Talaud	1,43	1,49	1,66	1,38
5	Minahasa Selatan	1,75	1,63	1,82	1,72
6	Minahasa Utara	1,62	1,58	1,62	1,52
7	Manado	1,27	1,24	1,28	1,43
8	Bitung	1,57	1,59	1,70	1,60
9	Tomohon	1,32	1,41	1,43	1,35
10	Sulawesi Utara	1,47	1,49	1,61	1,57

Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

**Tabel Persentase Rumah Tangga Menggunakan
Air Bersih per kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Utara**

No.	Kabupaten Kota	2005	2006	2007	2008
1	Bolaang Mongondow	26,06	35,05	23,24	16,20
2	Minahasa	62,18	60,63	35,68	66,00
3	Kep. Sangihe	34,23	47,12	12,39	22,49
4	Kep. Talaud	30,00	56,51	35,21	35,15
5	Minahasa Selatan	42,80	53,31	34,79	45,00
6	Minahasa Utara	28,05	37,93	24,61	29,26
7	Manado	55,77	65,59	54,17	48,48
8	Bitung	67,72	74,69	57,86	70,38
9	Tomohon	60,14	58,64	22,50	51,85
10	Sulawesi Utara	41,00	53,79	29,89	40,80

Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)

**Tabel Laju Pertumbuhan PDRB atas Harga Konstan
Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2002 - 2008**

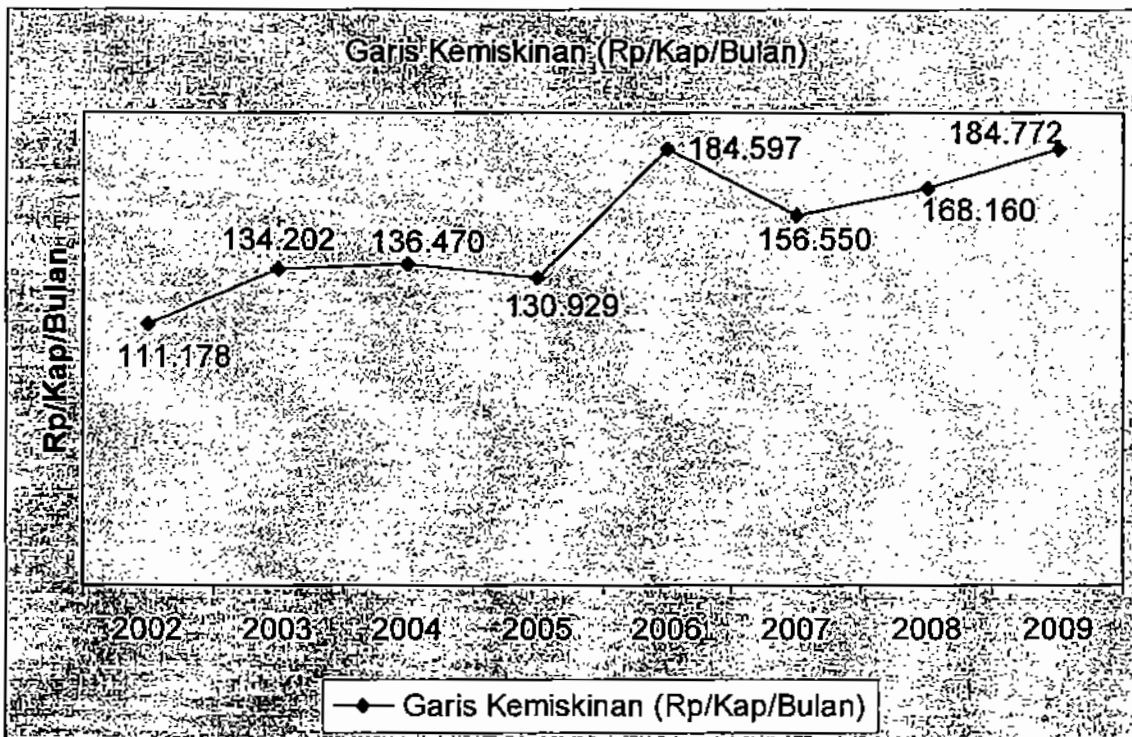
No.	Keterangan	Tahun						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Pertanian	4,46	0,87	6,66	4,90	3,83	7,57	2,66
2	Pertambangan & Penggalian	(4,05)	(5,61)	(3,59)	(3,74)	8,09	8,73	9,39
3	Industri Pengolahan	1,00	2,40	(3,94)	4,64	6,73	6,32	6,20
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	3,02	2,45	2,39	12,05	7,05	5,65	7,53
5	Bangunan	6,04	7,43	6,08	5,55	6,57	7,59	10,73
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	4,27	5,22	6,37	6,89	7,58	7,86	10,88
7	Pengangkutan & Komunikasi	3,40	4,47	6,79	8,13	6,91	5,97	11,02
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4,07	5,37	5,39	5,64	10,42	5,72	7,34
9	Jasa-Jasa	2,49	3,58	2,79	2,79	4,57	2,70	5,42

Sumber : BPS Sulawesi Utara, Sulut Dalam Angka (2003 -2009)

Tabel Tabel Laju Inflasi Kota Manado Tahun 2002 – 2009

Keterangan	Tahun							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Inflasi Tahun Kalendar Manado	15,22	0,69	4,69	18,72	5,09	10,13	9,71	2,31
Inflasi Tahun Kalendar Nasional	10,03	5,06	6,4	17,11	6,6	6,59	11,06	2,45

Sumber : BPS Sulawesi Utara, Sulut Dalam Angka (2003 -2009)

Grafik Garis Kemiskinan Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2002 - 2009

Sumber : BPS Sulawesi Utara (2005 -2008)